

CITRA PAPUA DALAM ARSIP



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, Desember 2004



SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Papua merupakan salah satu daerah penting di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan dinamika. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Dari arsip-arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) disusunlah suatu program, yang disebut dengan Program Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah mencakup arsip yang berupa teks, peta, foto dan film sebagai satu kesatuan. Di dalamnya akan tampak sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia.

Sebuah perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menurut undang-undang kearsipan disebut arsip statis. Dengan mencermati lembar demi lembar arsip yang disajikan dalam Citra Daerah ini, akan diperoleh gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini hanyalah berisi sebagian dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, Desember 2004

Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Arsip Nasional RI	i
Daftar Isi	iii
Pendahuluan	1
Daftar Pustaka	20
Citra Papua Dalam Arsip.....	22
Geografi Papua.....	23
Pemerintahan	30
Politik.....	35
Kependudukan	72
Pendidikan	78
Kesehatan.....	84
Keagamaan.....	88
Bangunan	91
Kebudayaan	102
Perekonomian	116
Transportasi	125
Daftar Arsip Papua Yang Diserahkan	130
Penutup.....	143

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam perjalanannya telah menimbulkan berbagai persoalan, sehingga undang-undang ini disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mengamanatkan diterapkannya pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan layanan masyarakat serta menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing secara optimal. Kebijakan ini merupakan usaha untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk Provinsi Papua yang telah diberi Otonomi Khusus sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Dalam pelaksanaannya, penerapan Otonomi Daerah ini tidak luput dari eksekusi negatif. Eksekusi ini berupa euforia yang berlebihan, yakni munculnya keinginan dari sekelompok masyarakat di daerah yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada gilirannya eksekusi ini dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

Citra Papua Dalam Arsip diharapkan dapat menampilkan gagasan pembangunan dan membangkitkan kesadaran anak bangsa di Provinsi Papua bahwa NKRI yang kita nikmati saat ini merupakan warisan perjuangan yang panjang dari para pendahulu kita. Oleh karena itu kesadaran berbangsa dan bernegara dalam satu wadah NKRI perlu ditingkatkan sebagai suatu tanggung jawab yang perlu dipikul bersama.

Hal lain yang cukup mendasar dengan penerapan Otonomi Daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah bahwa kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk ini perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, ANRI mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Program "**Citra Daerah**", yaitu penyerahan hasil alih media dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang akan diserahkan arsipnya pada Tahun 2004 ini adalah **Provinsi Papua**.

Arsip Papua yang akan diserahkan tersebut mencakup kurun waktu dari mulai awal abad 19 sampai dengan abad 20, yakni sejak Hindia Belanda sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan ini berisi informasi tentang berbagai interaksi yang terjadi di Papua pada periode tersebut, yang diharapkan dapat mendorong lahirnya rasa nasionalisme bagi masyarakat Papua dan memancing peningkatan upaya perluasan khasanah arsip statis yang dimiliki Provinsi Papua.

Lingkungan dan Penduduk

Provinsi Papua yang berada di wilayah salah satu pulau terbesar di dunia, diperkirakan mulai dihuni manusia sejak jaman glasial pertama dan menjadi jembatan bagi kemungkinan terjadinya migrasi manusia dan hewan dari daratan Asia. Di atas peta Pulau Irian tampak sebagai seekor burung raksasa atau ada

yang menganggapnya mirip seekor dinosaurus. Empat puluh tujuh persen dari bagian wilayah itu yang berada di bagian barat adalah wilayah Irian sebelah barat, dan lima puluh tiga persen sisanya adalah wilayah sebelah timur, Papua Niugini.

Penduduk pribumi Irian adalah rumpun bangsa **Papua–Melanesid** yang bermukim di daerah **Melanesia** yakni sekelompok pulau yang berada di sebelah Timur Laut Australia. Rumpun bangsa **Papua–Melanesid** yang hidup di Pulau Irian, penduduknya mempunyai ciri-ciri berkulit hitam, rambutnya hitam keriting, muka bulat, hidungnya tinggi serta lebar sering melengkung dan badannya agak besar. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa penduduk Irian itu adalah Bangsa **Proto–Melanesia** yang masuk secara bergelombang ke wilayah itu. Selanjutnya berdatangan pula Bangsa Asia **Paleo-Mongoloid** dan bangsa-bangsa **Negro** serta **Weddid** ke Indonesia.

Dikenalnya Pulau Irian oleh bangsa-bangsa pendatang seperti Cina, Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda dapat ditelusuri bahwa sejak abad ke-8 para pelaut dan pedagang Sriwijaya mengenalnya dengan nama **Janggi**. Sementara itu, pada abad ke-13 para pelaut dan pedagang Cina memberi nama Pulau Irian tersebut dengan **Tungki**. Masa Kerajaan Majapahit berkuasa pada abad ke-14 dan 15, dinyatakan bahwa Pulau Irian sebagai bagian "**wilayah yang kedelapan**" dari kerajaan tersebut.

Pada awal abad ke-16, pelaut Portugis **Antonio d'Abrau** dan **Francesco Serano** menyebut Pulau Irian itu dengan nama **Os Papuas**. Sedangkan pelaut Portugis lain menyebut pulau itu **Ilha de Papo Ia** dan **De Jorge de Menetes** menamakannya **Papua** yang dalam Bahasa Melayu berarti rambut keriting. Pada saat itulah nama Papua dikenal diseluruh dunia, **bahkan penduduk pribumi telah menerima dengan baik nama tersebut, sebab Papua itu mencerminkan identitas mereka sebagai**

manusia hitam dan rambut keriting. Sejak saat itu nama Papua terus dipertahankan. Selanjutnya, didalam pembahasan ini akan dipergunakan nama Papua. Secara yuridis nama itu dipakai sejak adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Kedatangan Bangsa Eropa

Bangsa Eropa yang pertama menginjakkan kakinya di wilayah Papua pada tahun 1528 adalah orang Spanyol yaitu **Alvaro de Savedra** seorang pimpinan Armada Laut Spanyol. Ia memberi nama pulau itu dengan sebutan **Isla del Oro** atau **Island of Gold** yang artinya **Pulau Emas**. Tahun 1545, **Inigo Oertis de Retes** seorang nahkoda kapal Spanyol singgah di Pulau Biak dan Padaido, karena penduduk pribumi tidak menerima, maka ia singgah lagi di Sungai Mamberamo dan memberi nama Papua itu dengan **Nova Guinea** atau **Nueva Guinea**. Nama ini diberikan setelah melihat penduduk setempat yang hampir mirip dengan penduduk Afrika Selatan. Mulai saat itu **Inigo Oertis de Retes** memproklamkan Papua itu sebagai milik Kerajaan Spanyol. Tahun 1663 Spanyol meninggalkan Papua setelah Belanda menghambat perdagangan rempah-rempah Spanyol di wilayah itu.

Luiz Vaez de Torres, pelaut spanyol yang tergabung dalam armada Inggris pertama kali melihat Papua dalam perjalanannya tahun 1605 – 1607. Torres menemukan beberapa pulau termasuk Pulau Louissiade di Papua sebelah Timur dan selanjutnya ia bermukim dan menguasai wilayah itu. Perang besar yang berkecamuk di Eropa membawa akibat Papua jatuh ke tangan Inggris tahun 1774, yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, tahun 1775 dengan menggunakan kapal **La**

Tartare dengan Nahkoda Kapten **Forrest**, Inggris berlayar ke Papua bagian barat dan berlabuh di Manokwari di Teluk Doreri untuk mengambil kembali rempah-rempah yang ditinggalkannya itu. Tahun 1793 merupakan tahun yang penting bagi Inggris untuk menguasai dan menjadikan wilayah itu sebagai koloni baru. Atas perintah Gubernur Inggris di Maluku, Inggris mulai mengadakan penjajakan dan membagi garis pulau sekitar Papua serta mendirikan benteng **Coronation** di Teluk Doreri. Karena adanya tentangan keras dari **Kamaludin Syah**, Sultan Tidore yang berkuasa atas seluruh wilayah Kesultanan Tidore, tahun 1814 Inggris meninggalkan Papua bagian barat.

Penanaman Kekuasaan Kolonial Belanda

Kedatangan Bangsa Belanda ke Papua dimulai pada tahun 1606 melalui sebuah ekspedisi **Duyfken** yang terdiri dari tiga buah perahu di bawah komandan **Wiliam Jansen** yang berlayar meninggalkan pantai Utara Jawa singgah di Kepulauan Kai, Aru dan pantai Baratdaya Papua. Pada saat itu Belanda hanya mengenal nama Papua untuk wilayah yang telah disinggahi tersebut. Namun sekitar tahun 1770, Belanda mengganti Papua dengan **Nieuw Guinea**. Nama tersebut merupakan hasil terjemahan dari **Nova Guinea** atau **Nueva Guinea** yang diambil dari Bahasa Spanyol. Nama ini dimuat untuk pertama kalinya dalam peta-peta yang dicetak dan diterbitkan oleh **Isaac Tiron**. Pada tahun-tahun ke depan, nama Papua dan **Nieuw Guinea** dipakai bergantian hingga pertengahan abad ke-20.

Usaha Belanda untuk menjadikan Papua sebagai sebuah koloni, baru terwujud setelah Belanda meresmikan berdirinya benteng pertama di daratan Papua pada tanggal 24 Agustus 1828. Segera setelah pendirian benteng pertama yang diberi

nama **Fort Du Bus**, hubungan antara pihak Belanda dan penduduk pribumi ditentukan dalam surat-surat perjanjian. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh **Raja Namatote, Kasa (Raja Lokaijhia), Lutu (Orang Kaya di Lobo, Mewara dan Sendawan)**. Mereka diangkat sebagai kepala di daerah masing-masing oleh Belanda dengan diberi surat pengangkatan sebagai kepala daerah, berikut tongkat kekuasaan berkepala perak. Selain ketiga kepala daerah ini diangkat pula 28 kepala daerah bawahan. Meskipun daerah Papua sudah sejak tahun 1823 dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai bagian dari tanah jajahan Belanda di Kepulauan Nusantara, kekuasaan pemerintah jajahan itu baru sungguh-sungguh terwujud di Papua pada akhir abad ke-19.

Sebelumnya Belanda kurang memperhatikan daerah ini, karena dinilai kurang memiliki potensi ekonomi yang menguntungkan. Tetapi karena timbulnya pemberontakan pasukan Nuku dari Tidore pada tahun 1870 dan minat bangsa-bangsa Eropa lainnya untuk menguasai Papua semakin besar, Belanda menganggapnya sebagai ancaman serius. Pada tahun 1884, Inggris memproklamasikan bagian Tenggara Papua sebagai daerah jajahannya. Pada tahun yang sama, Jerman mengklaim Timur Laut Papua sebagai koloninya. Belanda sendiri tetap mempertahankan wilayah Barat Pulau Papua. Daya tarik pulau ini terletak pada kekayaan alamnya dengan berbagai bahan mentah yang sangat dibutuhkan Eropa untuk memacu industri.

Konfrontasi yang terjadi antara Belanda, Inggris dan Jerman untuk menguasai Papua masih terus berlanjut. Hal tersebut baru dapat diselesaikan setelah dapat ditentukan sebuah batas wilayah jajahan Belanda atas Papua, melalui sebuah pertemuan antara Pemerintah Belanda, Inggris dan Jerman Gravenhage pada tanggal 16 Mei 1895. Penetapan batas antara Belanda, Inggris dan Jerman ini disebabkan karena pemerintah

Inggris menguasai wilayah bagian Timur Papua dan Jerman menguasai Wilhelmstad (bagian lain dari Timur Papua), sementara bagian Barat Papua dikuasai oleh Belanda. Garis batas wilayah ini oleh Belanda dinyatakan dalam **Staatsblad van Nederlandsch Indie**, 1895 No. 220 dan 221.

Tahun 1898 Parlemen Belanda mensyahkan pengeluaran anggaran belanja untuk mendirikan "pemerintahan di daerah Papua bagian Barat", supaya dapat dinyatakan bahwa Papua itu sungguh-sungguh merupakan bagian dari kekuasaan Belanda. Selanjutnya Pemerintah Belanda membagi daerah Papua ke dalam dua bagian yang masing-masing dikuasai oleh seorang kontrolir Belanda. Bagian utara dinamakan **Afdeeling Noord Nieuw Guinea**, dan bagian barat dan selatan dinamakan **Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea**. Kedua daerah itu merupakan sub-bagian dari Keresidenan Maluku. Kontrolir penguasa daerah **Noord Nieuw Guinea** ditempatkan di Manokwari, sedangkan kontrolir penguasa daerah **West en Zuid Nieuw Guinea** ditempatkan di Fakfak.

Pada awal abad ke-20 kembali terjadi pemisahan daerah **Zuid Nieuw Guinea** dari daerah **West Nieuw Guinea**. Bahkan tahun 1901 daerah **Zuid Nieuw Guinea** dipisah menjadi satu *afdeeling* tersendiri, dengan seorang asisten residen sebagai penguasa daerah. Pada tanggal 14 Februari 1902 untuk pertama kali bendera Belanda dinaikkan di muara Sungai Maro, di tempat yang sekarang dikenal sebagai Merauke. Dalam tahun 1904 di Teluk Humboldt ditempatkan pula seorang petugas pemerintahan jajahan Belanda. Tempat kedudukan petugas militer yang mendapat kekuasaan untuk memerintah suatu daerah bagian dari **Afdeeling Noord Nieuw Guinea** ini adalah perkampungan yang dinamakan **Hollandia** dan yang sekarang dikenal sebagai **Jayapura**. Hollandia dijadikan ibukota **Onderafdeeling**

Hollandia, suatu daerah yang baru menjadi penting pada akhir Perang Dunia II.

Penyebaran Agama Kristen Protestan dan Katolik Serta Peningkatan Pendidikan

Upaya pertama orang Belanda untuk menyebarkan agama Kristen Protestan di Papua sudah dimulai tahun 1855, dan kemudian berpusat di Manokwari tahun 1872. Namun baru pada awal abad ke-20 ada kemajuan yang cukup berarti. Penyebaran agama Kristen Protestan terutama dilakukan di daerah pantai utara Papua oleh *Utrechtsche Zendingsvereniging* dan kemudian oleh *Zending der Nederlands Hervormde Kerk*, aktivitas dari Zending der Nederlands Hervormde Kerk itu mula-mula di Pulau Yapen dan pulau-pulau di Teluk Cenderawasih lainnya, di daerah Kepala Burung bagian barat, di Kepulauan Raja Ampat, Pulau Wakde yang berhadapan dengan Sarmi dan dari sana ke seluruh daerah pantai utara dan ke Genyem.

Setelah Perang Dunia II jumlah pendeta pribumi mulai bertambah, dan dalam tahun 1956 Gereja Kristen Papua menjadi suatu organisasi yang mandiri. Berbeda dengan daerah Papua bagian utara yang didominasi oleh agama Kristen Protestan, bagian selatan penyebaran agama Nasrani didominasi oleh para pendeta Katolik. Upaya pertama orang Belanda untuk menyebarkan agama Katolik diawali dalam tahun 1894. Kemudian tahun 1905 organisasi penyebaran agama Katolik yang bernama *Misionarissen van het Heilige Hart* membuka pusat penyebaran agama di Merauke. Tahun 1936 kegiatan penyebaran agama Katolik juga mulai dilakukan di daerah-daerah bagian utara. Dalam tahun yang sama penyebaran agama Katolik dari Ordo Fransiskan mendirikan pusat penyiaran di Manokwari.

Berdampingan dengan peningkatan kegiatan penyebaran agama Kristen Protestan dan Katolik, upaya pendidikan formal dan pelayanan kesehatan pun mulai dikembangkan. Sekolah-sekolah guru yang pertama didirikan di daerah Teluk Cenderawasih oleh kelompok zending Kristen Protestan, dengan guru-guru yang berasal dari Ambon dan Sangir. Sedangkan kaum terpelajar yang pertama di Irian Jaya memang berasal dari Biak.

Pengadaan sekolah-sekolah Katolik dimulailah di daerah sekitar Merauke dan daerah suku bangsa Muyu sejak tahun 1923, dan kurang lebih satu dasawarsa kemudian, yaitu dalam tahun 1934, sudah ada 107 sekolah Katolik yang tersebar di Irian Jaya Selatan, di Agats dan Mimika.

Peranan Digul Dalam Gerakan Kebangsaan Indonesia

Papua, terutama daerah Digul, memperoleh tempat yang istimewa dalam gerakan kebangsaan Indonesia ketika daerah ini dipilih oleh orang Belanda sebagai tempat pengasingan kaum nasionalis Indonesia yang dianggap membahayakan kedudukan pemerintah jajahan Hindia-Belanda.

Memasuki abad ke-20 kesadaran politik di kalangan rakyat Indonesia makin meluas. Di berbagai daerah terbentuk kesatuan-kesatuan politik yang ikut serta dalam gerakan menentang kolonialisme. Dalam berbagai kongres, rapat, pertemuan, tulisan dalam majalah, surat kabar dan surat-surat selebaran tampak arus kuat jiwa perjuangan kemerdekaan yang makin lama makin deras dan tegas.

Dalam tahun 1926 pecah suatu pemberontakan terhadap kekuasaan penjajah Belanda. Mula-mula di Banten, lalu meluas di daerah lain di Jawa dan juga menyebar ke Sumatera Barat. Pemberontakan besar yang dipimpin Partai Komunis Indonesia ini

berhasil dipadamkan oleh alat-alat kekuasaan pemerintah jajahan. Meskipun orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan tahun 1926 dan 1927 adalah orang-orang yang dapat dituntut berdasarkan undang-undang, pemerintah jajahan belum merasa aman. Untuk mencegah timbulnya pemberontakan baru Gubernur Jenderal De Graeff memerintahkan pengasingan secara besar-besaran dari orang-orang yang dianggap membahayakan kedudukan pemerintah Belanda di Kepulauan Indonesia. Sejumlah 1.308 orang ditangkap dan ditempatkan dalam pengasingan tanpa melalui pengadilan.

Dari para pejuang Indonesia yang diasingkan, 823 orang dikirim ke Tanah Merah, wilayah di pedalaman Papua, suatu tempat terpencil yang berjarak 500 kilometer dari daerah pantai selatan di hulu sungai Digul. Tempat ini bisa dikatakan sangat buas dari segi alam, misalnya ancaman dari serangan malaria, tetapi juga adanya serangan penduduk asli untuk mendapatkan kepala manusia dengan jalan mengayau, yang mereka anggap menyimpan kekuatan sakti.

Mereka yang disebut para "orang buangan" itu sebagian diperbolehkan membawa istri dan anak-anak karena mereka dianggap tidak sebagai orang hukuman biasa. Kedudukan daerah Digul dalam pergerakan kebangsaan Indonesia makin istimewa sebagai lambang perlawanan rakyat terhadap kekuasaan penjajah, ketika tempat pengasingan para pemimpin komunis di hulu Sungai Digul juga dijadikan tempat pengasingan para pemimpin gerakan kebangsaan yang tidak tergolong komunis. Dalam bulan November 1934 Tanah Merah juga menjadi tempat pengasingan Sutan Sjahrir, bekas mahasiswa Universitas Leiden yang memimpin kaum Golongan Merdeka sekembalinya ke tanah air. Tiga bulan kemudian menyusul Mohammad Hatta pun dikirim ke daerah pengasingan ini. Dengan demikian daerah Digul

dijadikan sebagai tempat pengasingan para pemimpin gerakan kebangsaan Indonesia yang benar-benar dianggap membahayakan kekuasaan penjajah Belanda.

Sejarah Eksplorasi

Di Papua gejala kapitalisme modern sebagai pengolahan bahan-bahan mentah bagi kebutuhan industri baru tampak tahun 1931. Kegiatan eksplorasi pertama ditujukan untuk eksplorasi minyak tanah. Sejumlah perusahaan besar Belanda, Inggris dan Amerika dalam tahun 1935 menggabungkan modal mereka untuk mendirikan perusahaan **NV Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM)**. Usaha-usaha eksplorasi minyak tanah telah membuka mata pencaharian baru bagi banyak orang. Karena tenaga kerja penduduk asli Papua tidak mencukupi, maka tenaga kerja seperti orang Makassar, Bugis, Buton dan akhirnya juga dari Jawa didatangkan.

Usaha untuk membangun industri minyak di Papua mendorong timbulnya kegiatan eksplorasi yang lebih luas. Disamping eksplorasi yang dilakukan oleh satuan patroli militer Belanda ke berbagai daerah pedalaman, perkembangan industri minyak kemudian dapat membiayai berbagai lembaga ilmiah di Negeri Belanda untuk mengirimkan para sarjana berbagai disiplin ilmu seperti zoologi, botani, kehutanan, geologi, antropologi, tetapi juga para tokoh petualang ke berbagai daerah seperti Kepala Burung dan Pegunungan Jaya Wijaya.

Pembentukan Wilayah Administratif

Berkali-kali pemerintah Belanda berusaha mengadakan pembagian wilayah Papua, yang memungkinkan pementapan

kekuasaannya melalui pemerintah daerah. Namun usaha pembagian wilayah ke dalam kesatuan-kesatuan daerah administratif selalu terbentur pada kenyataan yang ada, yang pada akhirnya hanya terwujud di atas kertas saja. Pembagian terakhir dari wilayah administratif Papua sebelum perang terjadi pada tahun 1940. Diputuskan bahwa daerah Papua sebagai bagian dari Karesidenan Maluku terdiri dari tiga *afdeeling* seperti yang telah disebutkan di atas, meliputi sejumlah *onderafdeeling* yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Kontroleur* dan di bawahnya terdiri dari satu *Bestuurressort* di Boven Digul dan empat *Bestuurressort* di Merauke. Tiga *afdeeling* ini dikepalai oleh tiga *asisten-residen* yang masing-masing berkedudukan di Tual, Fakfak dan Manokwari. Ketiganya berada dibawah residen Maluku yang berkedudukan di **Ambon**.

Ketika Perang Pasifik pecah daerah Papua bagian barat dan utara secara cepat dapat dikuasai oleh militer Jepang. Hal ini dimungkinkan karena pada periode sebelumnya banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di daerah ini yang ternyata merupakan jaringan mata-mata Jepang. Selama pendudukan Jepang pada umumnya penduduk Papua berada dalam penderitaan. Di berbagai tempat timbul perlawanan penduduk pribumi yang sering ditindas dengan kejam oleh tentara Jepang. Kekejaman Jepang mendorong rakyat menyambut baik kedatangan pasukan Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Mac Arthur pada tanggal 22 April 1944. Jayapura sendiri berubah menjadi pangkalan angkatan perang Sekutu. Tetapi tidak lama kemudian kesatuan-kesatuan Sekutu meneruskan serangan ke arah Barat, dan meninggalkan kesatuan Belanda yang ikut mendarat di Jayapura. Para penguasa Belanda selanjutnya menjadikan Jayapura sebagai ibukota Papua.

Setelah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Bangsa Indonesia tidak pernah berhenti memperjuangkan kemerdekaan Papua dan terus berupaya agar daerah tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Hal ini telah tercermin dalam keputusan rapat **Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)** dan Pembukaan UUD 1945 bahwa **wilayah Papua adalah hak mutlak wilayah Pemerintah Indonesia karena sesuai dengan batas negara yaitu daerah bekas Hindia Belanda dahulu**. Kedudukan Papua terus diperdebatkan antara Indonesia dengan Belanda. Namun dengan kegigihan diplomasi, akhirnya disepakati bahwa Papua akan dibicarakan setahun lagi dan penyerahan seluruh bekas wilayah Hindia Belanda kepada Indonesia akan dilaksanakan pada akhir tahun 1950.

Pada awal tahun 1950, segera setelah pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, pemerintah Belanda memperkuat kedudukannya di Papua dengan mengangkat S.I.J. van Waardenburg menjadi Gubernur **Nederlandsch Nieuw Guinea**, yang dibantu oleh tiga orang residen yang ditempatkan di Jayapura, Manokwari dan Merauke. Di Enarotali, di daerah pedalaman sekitar Danau Paniai, ditempatkan seorang *controleur* yang langsung bertanggungjawab kepada *resident* di Jayapura. Kemudian pada tahun 1952 diadakan perubahan pembagian wilayah pemerintahan ke dalam empat *afdeeling*. **afdeeling Noord Nieuw Guinea** dengan ibukotanya Hollandia, **afdeeling Zuid Nieuw Guinea** dengan ibukota Merauke, **afdeeling Centraal, Nieuw Guinea** yang ibukotanya belum ditetapkan, **afdeeling West Nieuw Guinea** dengan ibukota Sorong.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah Belanda adalah membentuk Dewan **Nieuw Guinea** pada tahun 1961. Dalam

tahun 1961 juga Gubernur **Nederlandsch Nieuw Guinea** membentuk Komite Nasional Papua yang terdiri dari 80 orang anggota. Tujuan pembentukan komite ini adalah untuk pembentukan Negara Papua. Usaha ini terus ditentang oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. **Karena Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.**

Tri Komando Rakyat dan Penyerahan Papua Kepada Indonesia

Perundingan-perundingan mengenai kedudukan Papua yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda belum menunjukkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Berulang kali masalah Papua diajukan oleh wakil-wakil Indonesia ke hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, tanpa mengakibatkan perubahan sikap di pihak Belanda. Pemerintah Belanda justru melakukan tindakan penguatan diri di daerah Papua, baik dari segi politik, ekonomi maupun militer. Sementara itu Pemerintah Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh kemerdekaan bagi Papua. Hal itu diperkuat dengan penetapan **Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956** tentang **Pembentukan Provinsi Irian Barat**. Sejak undang-undang tersebut ditetapkan, selanjutnya nama yang dipakai adalah **Irian Barat**.

Pada tanggal 19 Desember 1961 pimpinan Republik Indonesia mengubah cara perjuangan pembebasan Irian Barat. Selanjutnya Presiden Soekarno mengumumkan keputusan yang kemudian dikenal dengan **Tri Komando Rakyat (TRIKORA)**. Isinya adalah menggagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat dan mempersiapkan diri untuk mobilisasi umum. Disamping itu, Amerika Serikat

mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat. Dengan adanya tuntutan tersebut, Belanda tidak dapat memaksakan kehendak untuk menguasai Irian Barat. Untuk menyelesaikan masalah Irian Barat tersebut akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 dicapai suatu kesepakatan yang dikenal dengan **New York Agreement**, yang berisi :

1. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (***United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA***) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Sejak hari itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
2. Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan, bersama-sama dengan alat-alat keamanan putra-putra Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.
3. Pasukan-pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat, tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah kekuasaan Pemerintah Sementara PBB.
4. Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan. Yang belum pulang, ditempatkan di bawah pengawasan PBB, dan tidak boleh dipakai untuk operasi-operasi militer.
5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.
6. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB.

7. Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 Pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dari Pemerintah Sementara PBB.

Berdasarkan **New York Agreement** tersebut, prosedur penyerahan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia melalui tiga tahap. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera Perserikatan Bangsa Bangsa dikibarkan di Irian Barat, berdampingan dengan bendera Belanda, mulai saat itu pemerintah jajahan Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa Bangsa, yang kemudian membentuk pemerintahan sementara yang dinamakan **United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)**. Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Merah Putih dikibarkan secara resmi di Irian Barat berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa Bangsa, sedangkan bendera Belanda diturunkan untuk selama-lamanya dari Irian Barat. Pada tanggal 1 Mei 1963 kedaulatan atas Irian Barat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia dan bendera Perserikatan Bangsa Bangsa diturunkan, sejak saat itu UNTEA menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia.

Setelah kesepakatan itu dipatuhi oleh kedua belah pihak, selanjutnya dilaksanakan pula **Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)** yang akan diadakan pada tahun 1969, tepatnya mulai tanggal 14 Juli – 2 Agustus 1969. Pepera akan dilaksanakan di 8 (delapan) kabupaten, yaitu : **Merauke, Jayawijaya, Penidi, Fakfak, Sorong, Manokwari, Teluk Cendrawasih dan Jayapura**. Hasil dari Pepera menyatakan bahwa rakyat Irian Barat berintegrasi dengan Indonesia.

Pada tahun 1973, nama **Irian Barat** berubah menjadi **Irian Jaya**. Perubahan nama tersebut didasarkan pada **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973** dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Provinsi Irian Barat Nomor 1/DPRD/1973. Selanjutnya pada tahun 2001, nama **Irian Jaya** berubah nama menjadi **Papua** didasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya menjadi Papua.

Materi Arsip Yang Ditampilkan Dalam Citra Daerah

Dalam Citra Daerah Papua ini pokok masalah pertama yang ditampilkan adalah mengenai ***Geografi Papua***. Penjelasan geografis ini digambarkan melalui Arsip Peta Nieuw-Guinea yang berangka tahun 1912, peta hasil foto udara Nieuw-Guinea yang berangka tahun 1935, peta Boven Digul yang berangka tahun 1929, hingga peta perkampungan narapidana di Boven Digul.

Masalah ***pemerintahan*** lebih banyak digambarkan lewat arsip periode setelah Perang Dunia II. Dimulai dari arsip yang berangka tahun 1953 mengenai Serah Terima Jabatan Kepala Daerah Merauke, kemudian Risalah Dewan Perwakilan Rakyat mengenai keterangan pemerintah tentang persoalan Irian Barat. Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat tahun 1956, kemudian juga perubahan undang-undang tersebut. Juga diketengahkan foto tentang pelantikan Gubernur Papua E.J. Bonay oleh Wakil Perdana Menteri Dr. Subandrio tahun 1963.

Masalah **Politik** diawali dengan menampilkan arsip sekitar kamp tawanan Boven Digul sebagai tempat buangan kaum pergerakan yang dianggap berbahaya bagi pemerintah Belanda. Disini terdapat daftar orang-orang yang dikirim ke Boven Digul antara tahun 1927 sampai dengan 1931, kondisi kamp tawanan dan buku harian mengenai kebijaksanaan perkampungan narapidana. Kemudian laporan dilanjutkan dengan suasana sekitar upaya pengembalian Papua masa Republik Indonesia Serikat (RIS) dan setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) hingga arsip tentang naskah Pidato Presiden Soekarno menyambut masuknya Papua ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

Tema **Kependudukan** mengetengahkan laporan penduduk di Kaimana tahun 1858, laporan tentang cacah jiwa di Tanah Merah tahun 1933. Terdapat juga laporan mengenai rencana emigrasi dan transmigrasi ke Nieuw-Guinea oleh pemerintah Belanda. Ditambah laporan tentang pegawai-pegawai Indonesia di Irian Barat tahun 1950-1951.

Perkembangan **pendidikan** digambarkan oleh arsip foto dari **Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)** tentang peresmian sekolah di Wambi tahun 1923, kegiatan sekolah di Eranotali. Kondisi mengenai sekolah, murid dan pengajarnya di Tanah Merah juga ditampilkan baik lewat laporan tertulis maupun lewat arsip foto.

Usaha pemeliharaan **kesehatan** di Papua bisa dilihat melalui arsip foto juga dari KIT. Surat mengenai pelayanan kesehatan kepada penduduk sekitar daerah kerja PT Freeport Indonesia masa kontemporer melengkapi tema kesehatan ini.

Kegiatan **keagamaan** diwakili oleh arsip tentang penempatan petugas rohaniawan Katolik di wilayah Nederlandsch

Nieuw Guinea dan arsip foto rumah dinas untuk pastor di Merauke.

Bagian selanjutnya mengetengahkan mengenai ***bangunan***. Informasi ini digambarkan melalui arsip foto dari KIT dan NIGIS. Secara detail ada rumah adat, rumah panggung, rumah di pulau Saba dan Biak, rumah pejabat di Tanah Merah, stasiun radio, gereja, kantor pos dan lingkungan kamp militer.

Kekayaan ***budaya*** Papua juga banyak ditampilkan lewat arsip foto. Dari sini kita bisa melihat orang Papua beserta perlengkapannya baik berupa pakaian, aksesoris, senjata dan alat musik. Lebih jauh tema ini juga menggambarkan upacara pernikahan dan tarian tradisional masyarakat setempat.

Kegiatan ***perekonomian*** tergambar dari arsip foto pusat penambangan minyak dan gudang penyimpanan barang di Sorong, kegiatan penangkapan ikan oleh pemuda Papua dan tas tradisional wanita Papua. Sedangkan laporan tertulis menyangkut subsidi anggaran masa kolonial, selebihnya tentang garis besar pimpinan ekonomi menjelang pembebasan Papua, kontrak kerja penambangan minyak Caltex tahun 1961 dan pembangunan masyarakat sekitar wilayah penambangan PT Freeport tahun 1974.

Kegiatan ***transportasi*** digambarkan melalui arsip foto yang menampilkan moda transportasi tradisional semacam gerobak sampai transportasi udara berupa pesawat Dakota. Juga laporan tentang pembangunan lapangan terbang di Serui tahun 1936 dan pembangunan jalan di Nimboran tahun 1951.

Daftar Pustaka

- Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*,
1917-1921. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Haenen, Paul & Fre Huizinga.
2001 *Sources on Netherlands New Guinea in Indonesian National Archives: The General and Political Reports of Ternate Residency*. Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar.
1964 *Penduduk Irian Barat*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat.
1994 *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta : Djambatan.
- Maniagasi, Frans.
2001 *Masa Depan Papua*, Jakarta : Yayasan Studi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal.
- Mansoben, Johszua Robert.
1995 *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
-
1950 *Naskah dan Lampiran dari Bagian Pokok dari Pihak Belanda untuk Laporan Dari Komisi Gabungan Irian Nieuw-Guinea*. De Unie
- Pigay, Decki Natalis.
2000 *Evaluasi Nasionalisme dari Sejarah Konflik Politik di Papua*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indie*. 1901, 1916, 1940.
Batavia, Landsdrukkerij

Renwarin, Herman dan John Pattiara.

1984 *Sejarah Sosial Daerah Irian Jaya: Dari Hollandia Ke Kota Baru (1910-1963)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sairin, Weinata dan J.M. Pattiasina.

1996 *Visi dan Misi dari Bumi Cendrawasih*. Jakarta: PGI.

Staatsblad van Nederlandsch-Indie. 1884, 1897.

Batavia: Landsdrukkerij.

Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.

1992 *Profil Propinsi RI: Irian Jaya*. Jakarta.

CITRA PAPUA DALAM ARSIP

GEOGRAFI PAPUA



Peta Nieuw Guinea tahun 1912.
M. Yamin no. 1031

UITTREKSEL uit het Register der Besluiten
van den Gouverneur der Molukken.-

Amboina, den 17den Maart 1928.-

De Gouverneur der Molukken.

Gehoord het Hoofd van Plaatselijk Bestuur te Tanah-
Merah en den Resident van Amboina.

Gelet op Staatsblad 1905 No. 396 in verband met
Staatsblad 1925 No. 589 juncto 1925 No. 686 en in verband met
Staatsblad 1925 No. 594.

Heeft besloten:

TEN EERSTE: De grenzen der Onderafdeelingsoverhoofdplaats
Tanah-Merah der onderafdeeling Boven-Digoel vast te stellen
als aangegeven op de bij dit besluit behoorende kaart, te
weten:

ten Westen: De linkeroever van de Digoelrivier vanaf
het punt A, liggende 3 K.M. ten Zuiden van de kolenopslag-
plaats stroomopwaarts, tot aan de plaats, waar de Kali Bening
in de Digoel uitmondt (punt B);

ten Noorden: Door een rechte lijn loopende van de
monding van de Kali Bening (punt B), in zuiver Oostelijke
richting, over een afstand van 8 K.M. naar punt C;

ten Zuiden: Door een rechte lijn, loopende in zuiver
Oostelijke richting, vanaf het punt, gelegen op 3 K.M. ten
Zuiden van de kolenopslagplaats (punt A), over een afstand
van 4 K.M. naar punt D;

ten Oosten: Door een rechte lijn die de Oostelijke
punten C en D respectievelijk van Noord en Zuidgrens met
elkaar verbindt.

TEN TWEDE: Te bepalen dat binnen de Onderafdeelingsover-
hoofdplaats Tanah-Merah voor de gainterneerden verboden terrein
is het terrein, gelegen binnen de volgende grenzen:

ten Noorden: Vanaf punt I de monding van het rivier-
tje, loopende ten Zuiden van de doorgangsbarakken langs de
rivier tot aan het punt II en vanaf dit punt in zuiver Oos-
telijke richting naar het punt III, gelegen op de Oostelijke
grens van de Onderafdeelingsoverhoofdplaats Tanah-Merah.

ten Zuiden: Een rechte lijn loopende van de kolen-
opslagplaats (punt IV) in zuiver Oostelijke richting tot het
punt V, gelegen op de Oostgrens van de Onderafdeelingsover-
hoofdplaats Tanah-Merah;

ten Oosten: De Oostelijke grens van de Onderafdeelingso-
verhoofdplaats Tanah-Merah;

ten Westen: De linkeroever van de Digoelrivier.

Aan
het Hoofd van Plaatselijk Bestuur
te

Afschrift dezes

Tanah-Merah.

(119)

Salinan Surat Keputusan Gubernur Maluku tanggal 17 Maret
1928 tentang penetapan batas-batas ibukota yang terdapat di
Tanah Merah onderafdeling Boven Digoel.

Boven Digoel no. 84



Peta Boven Digoel, 1929.
Boven Digoel no.88

Afschrift.-

Uittreksel dagboek van den Bestuurs-Assistent van Moeting
over de maand September 1935.-

17. Selasa.
(di kampong Goeis).

Pagi-pagi kumpulkan orang kampong Goeis enz.
Kemoedian berurusan tentang keadaan bahagian oedik kali
Fly sampai ke Koem.-

Moela-moela orang kampong ber kepala-kepala semoes takoet
memberi tahoe tentang keadaan bahagian oedik itoe dan set
lalo menjatakan tidak tahoe dan beioem pernah sampai
kesitoe. Dengan pemboedjoekan jang perlahan-lahanlah da-
tangleh orang menjatakan sedikit-dikit tentang kampong
jang letaknja di oedik sampai ke Koem tempat orang inggris
itoe.

Moela-moela seorang Digoel bernama Koetim jang mengi-
ring Rapporteur sampai ke Goeis dengan keloeanganja dapat
tjeriterakan tanah2 bahagian oedik sedjoeb tiga hari
perdjalan dan teroes ke kali Moejoe bahagian Digoel
dimana ada seorang t. Pastoor berdiam disitoe. Koetim me-
njatakan bahwa dari Goeis sampai ketempat djalan (mata
djalan) Moejoe haroes berperahoe tiga hari lamanja, dan
disitoe bisa bertemoes seboeah kampong Digoel bangsa Moe-
joe jang bernama Karinkon, dengan bahasa Gap-Gap Dambonakwa
Dari Dambonakwa ke Moejoe berdjalan kaki 3 hari lamanja
ketempat Pastoor ada itoe.

Perdjalan ke oedik dimana tempat orang inggris, beioem
sekali dilakoeskan dan tegal itoe ia tida sempat menerang-
kan hal itoe dengan sebenarnya.

Kemoedian dari pada itoe maka Rapporteur t. oea menggambar
diatas tanah pada tengah djalan didalam kampong Goeis
bagaimana kedoeoekan kampong2 pada sebelah-mensebelah
kali Fly. Seorang laki2 bangsa Biak moelai menondjoek
kedoeoekan kampong bertoeoet-toeroet lalo sebentar
masing2 moelaai bekerdja bersama sama menggambar
kali Fly diatas djalan besar sepanjang kampong Goeis
dan mengatoer letaknja tiap2 kampong dengan tjabang2 so-
ngai jang mengalir masoek ke Fly, begitoe djadilah peta
kali Fly dilokiskan diatas tanah pada djalan sepanjang
kampong Goeis dan semoes orang toea moelai bergirang
menondjoek pengatahoesannja tentang bahagian tanah ter-
seboet kesedik.

Dengan demikian njatalah semoes orang ini tahoe benar akan
tanah sepanjang kali Fly sampai ke-Koem. Moela2 mereka
itoe takoet karena persangkaannja barangkali inilah soe-
toe pemeriksaan akan mengatahoesi perboentan mereka itoe
jang selaloe soeka mengajao kepada orang Digoel bahagian
oedik dan selendjoetnja mereka itoe takoet kalau2 mereka
itoe dibokoem sebab soedah bisda berkenalan dengan orang
Inggris dari doeloes.

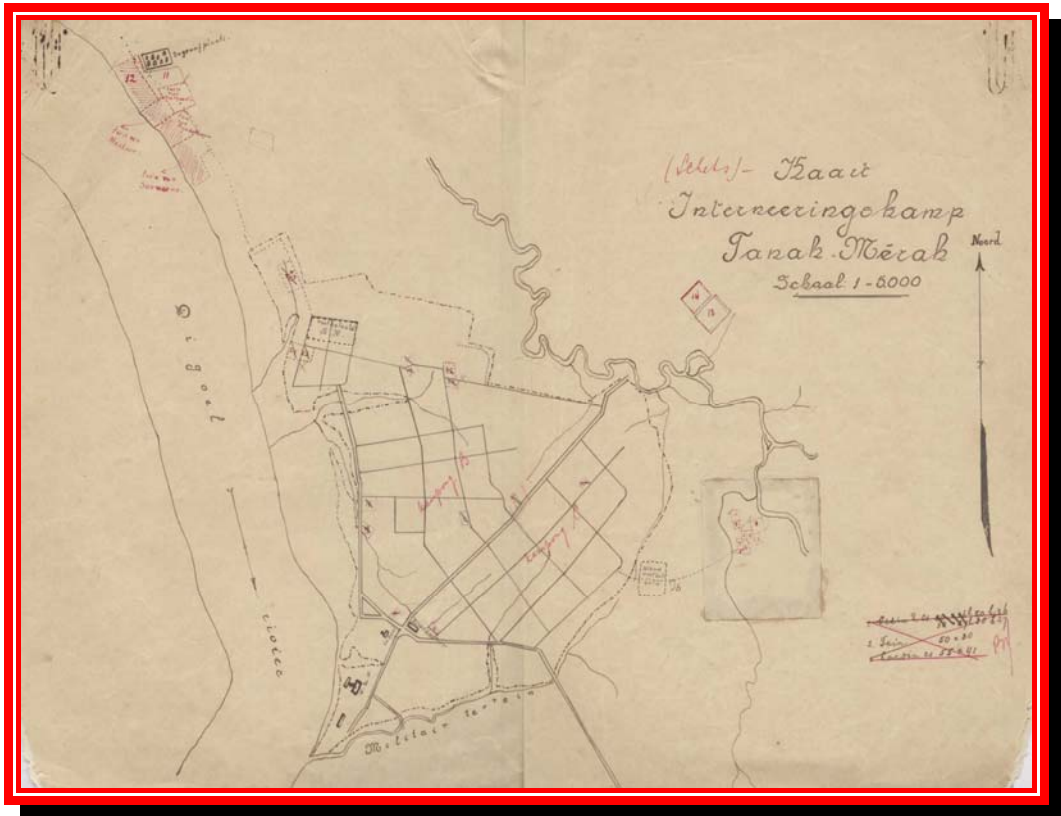
Seoedah Rapporteur mempertetapan kepertjajaan mereka
itoe terhadap Pemerintah jang selaloe moes melindoengi
mereka, djika mereka soeka toeroet dan tauloek dengan baik
mana moelai orang semoes bersama-sama menondjoek doedoek-
nja (letaknja) kampong2 dengan nama2nja moelai dari Goeis
hingga ke-Koem sebagai teratoer dibawah ini:

Dari Goeis moedik ke Koem moela2 bertemoes bangsa Biak
jang kampongnja bernama:

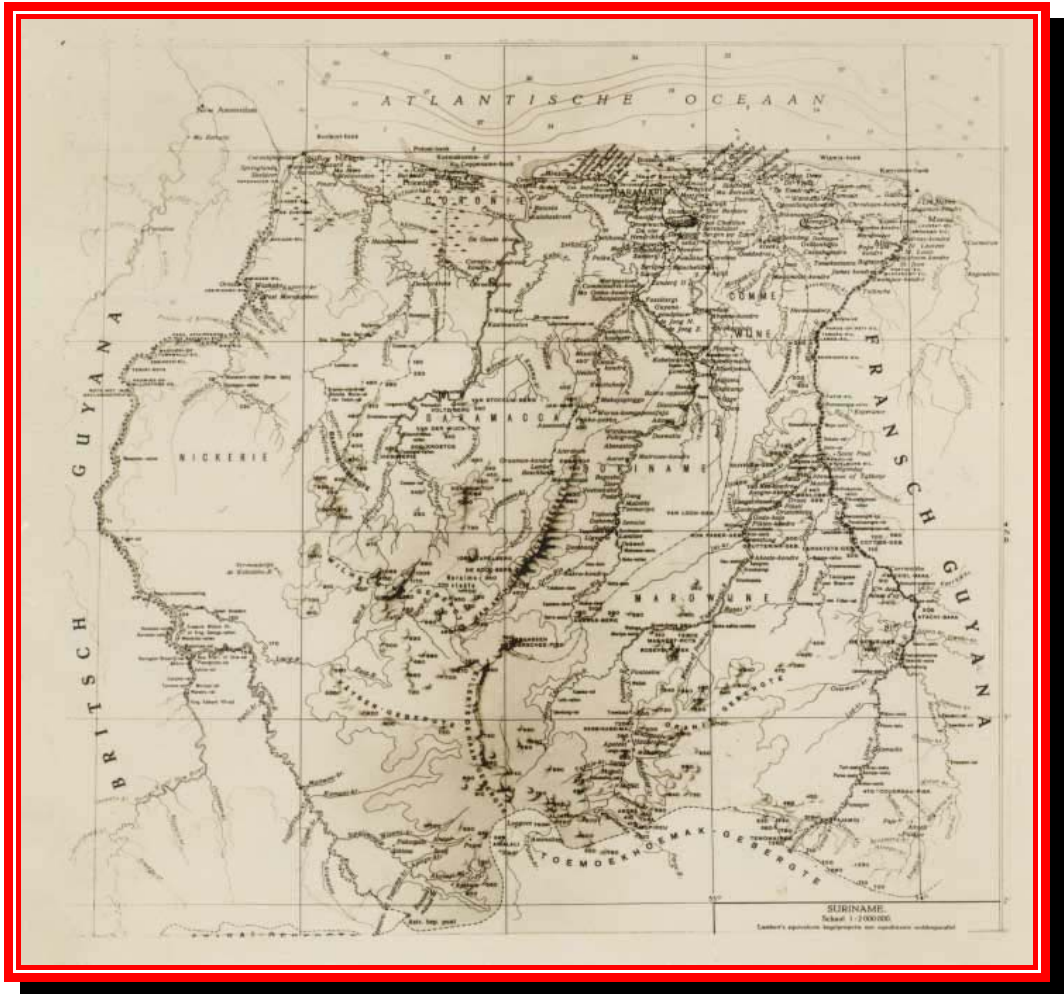
1. Dengoos (Ranakanim)
2. Koejoe (Biak anim)
3. Dowa (orang Moejoe)
4. Dambonakwa (orang Moejoe) djalan ke Moejoe.
5. Gemberre.
6. Ijoes.
7. Gena.
8. Bico.
9. Kwambit.
10. Bandimoskoei.
11. Boewa (letak disebelah kali Fly inggris).
12. Dakeke.
13. Teri. ada kali Teri jang masoek ke Fly.

Salinan dari buku harian asisten pemerintah di Moeting selama
bulan September 1935

Boven Digoel no.86



Peta kamp tahanan Tanah Merah.
Boven Digoel no.89



Detail peta dari *Dutch New Guinea*, 1944-1945
NIGIS/RVD B2170

PEMERINTAHAN

E/s. Afschrift.

Uittreksel "Memorie van Overgave van de
Onderafdelingschef van Merauke
(13 Maart 1954)".

ag/ret a mij
Tevens afschrift in 1x
maken, ook van Delling 1954

5. De Mandobo's vormen een onderdeel van een grote gelijknamige stam in de onderafdeling Boven-Digoel die in de jaren 1928/1929 gedeeltelijk uit hun stamland zijn weggetrokken en thans een vijftal kamponge in het district Moeting bewonen. Hun adat, taal en huizenbouw verschilt in sterke mate met die van de oorspronkelijke bevolking. De Mandobo's zijn klein van stuk en iets lichter van huidskleur dan de overige bevolking. Zij zijn niet erg honkvast; er is een trek naar en van hun stamland en Kelapa Lima. Als werkkrachten zijn zij gewild; zij zijn goede landbouwers. Opvallend is dat in de Mandobo-kampong Loedi veel t.b.c. heerst.

Mandobo-stam.	1948	jeugd %	1953	jeugd %
Loedi	172	61	149	46
Silliel	166	50	121	49
Doo	88	50	151	54
Terek	101	53	172	44
Biantap	143	53	189	51
Aiwat	30	50	--	--
Assike	73	53	--	--
Tanah Tinggi	34	44	--	--
Koekoerantap	26	46	--	--
Wataran	72	39	--	--
Kawanggawa	--	--	37	11
Mandobo's in K.Lima	--	--	--	--
Totaal	950	52	884	42,5

Voor eensluidend afschrift.

272
J.P.

Salinan Memorie Serah Terima Jabatan Kepala *onderafdeling*
Merauke, 13 Maret 1953.
Boven Digoel no.50

Undang-undang No. tahun 1956
tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa setelah ditetapkan Undang-undang Pembatalan Persetujuan Konperensi Medja Bundar, maka tidak ada rintangan-rintangan lagi untuk melaksanakan tjita-tjita untuk membentuk Irian Barat menjadi Propinsi Otonom, sesuai dengan isi dan djiwa Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945;

Mengingat:

- a. Undang-undang Pembatalan Persetujuan Konperensi Medja Bundar;
- b. 1. pasal 2, 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia dan Undang-undang tersebut dalam Staatsblad Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950;
- c. Piagam Persetujuan Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950 dan Pernyataan Bersama tanggal 19 dan 20 Djuli 1950;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Propinsi Maluku sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950, dipetjah menjadi dua, jaitu:

- a. Propinsi Maluku,
- b. Propinsi Irian Barat.

Pasal 2.

- (1) Propinsi Irian Barat dimaksud pasal 1 sub b meliputi:
 1. wilayah Irian Barat jang pada saat pembatalan Persetujuan Konperensi Medja Bundar pada tanggal 20 April 1956 masih berada didalam kekuasaan Keradjaan Nederland tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia;

Konsep Rancangan UU tentang pembentukan Daerah Otonom
Provinsi Irian Barat, 1956.

Risalah DPR no. 908

Persidangan I.

RAPAT 9.

Hari Selasa, 19 Desember 1961.

(Djam panggilan: 19.30).

Keterangan Pemerintah mengenai persoalan Irian Barat dalam rangka kelanjutan Komando Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Ketua: H. Zainul Arifin.

Didampingi oleh para Wakil Ketua Arudji Kartawinata, I. G. G. Subania, Let. Kol. (P) D. M. Moersalin dan M. H. Lukman.

Sekertaris: Mr Sumarsono Pringgodiredjo, Islan.

Jang hadir 226 anggota:

Muhamad Ahmad, Asmadi Tirtoetomo, S. Hadikusumo, I. S. Handokowidlo, Mh. Isnani, Rh. Koesnan, Lie Po Yoe, E. Moch. Mansiur, I. B. P. Manuaba, S. Martosowito, Munadir, Moersid Idris, Notouskardio, Osa Maliki, R. Posner, B. J. Rambitan, R. Darsono, Saleh Umar, Sarino Mangunpranoto, S. D. Bili, dr R. Soetmadji, Mr Soebagio Reksodipero, Soedarsono, Sudrasman, Nj. Soemari, R. M. Soesilo Prawirosoesanto, Soetoto Mertodimoello, Soetoko Djoesoebroto, I. G. G. Subania, O. Suriapranata, Ni. Sutijah Surva Hadi, Sutjipto, S. Danesoestito, Wasis, R. Wirioseputro, Rd. Wachju Mh. Enoch, K. H. Masikur, H. Zainul Arifin, K. H. Musta'in, H. Achmad Saichu, Abdul Aziz Djar, H. A. Chamid Widiaia, H. A. A. Achsien, R. Abdollah Afandi, Diadia Wiriasumita, Nj. Mahmudah Mawardi, Mahfud Samsulhadi, Aiip Muchamad Dzukhri, Ridwan Siachrani, K. H. Munir Absudjak, Hussein Saleh Asscaff, Nj. Hadinilah Hadi, Josotaruno Ichsan Noer, K. H. A. Mursidi, Soelaeman Widjojoesbroto, H. Zain Alhabii, Manudin Brodiotruno, Moh. Noer Abdugani, K. H. Moch. Sinifuddin Makassar, H. S. Moeslich, Mohamad Hasan, Njaju H. Mariam Kantasumpna, Ni. S. Marjamah Dismadje, H. Anwar Musaddad, Ni. Asmah Siachrunie, H. Mahhub Djunaidi, H. Anwar Tiokroaminoto, Arudji Kartawinata, H. Harsono Tiokroaminoto, Z. Imban, A. Nunung Kusnadi, H. Siradjuddin Abbas, Nj. Diwan, Drs J. Piry, Nunajik A. R., R. P. R. Situmenne, Sudjo, M. H. Lukman, Hutomo Supardane, Sinegih Tirtoediro, Suhaimi Rachman, Ir Thaher Thaleb, Ni. Ch. Salawati, Tjoo Tik Tjoen, Kasim, Sukatno, M. A. Chanafiah, Anwar Kadir, Dadi Wirosubroto, Siswojo, Tioceito, Ni. Moedikdio, Peris Pardede, Soepeno Hadiswojo, Diokosudiono, M. Siragar, H. Senduk, J. R. Koot, V. B. Saka, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Drs Frans Seda, Kol. Wilulio Puspo Judo, Kol. Roesham Roesli, Kol. Hasan Kasim, Maj. Tallu Rachim, Let. Kol. Muamil

Effendi, Kol. Hein Victor Worang, Let. Kol. L. Pellupessy, Kapt. Soemadi, Kapt. H. A. Gani, Let. Kol. (Dch) R. O. Sunardi, Maj. (A) Moch. Sofjan Anrazad, Kol. (K. K. O.) R. Indro Soebagio, Let. Kol. (P) M. Napitupulu, Let. Kol. (P) D. M. Moersalin, Maj. (T) R. O. Darja Atmaka, Maj. (A) Hardiman Sumardanus, Kom. Ud. Soetoyo Adipoetro, Kol. Ud. Achmad Soemadi, Maj. Ud. Soerjo Argawisastra, Maj. Ud. Sudomo Jahudihardjo, Let. Ud. II Manckin, Kom. Bes. Pol. Abdurachman Setjowibowo, Kom. Pol. I Drs Soemartono, Kom. Pol. II Sario, Obay Suhantaatmadia, Supardi, Let. Kol. Subroto Aryo Mataram, K. H. Achmad Ghozaly, K. H. Abdul Djilil, K. H. Achmad Chotib Tubagus, K. H. Rachmatullah, Dr Siech H. Dialaluddin, K. H. Asimawi, Idham, K. H. Achmad Aini Chatib, K. H. Gozali, K. A. H. Sia'roni, O. K. H. Abdul Aziz, K. H. Ibrahim Husni, R. H. Iskandar Sulayman, M. Thaha Ma'roof, K. H. Sahlan Ridwan, K. H. A. Dimari, Siech Marhabun, Marzocki Jaim. Sardiono, K. H. Junus Anis, Prof. Dr P. D. Latuhamallo, Ds P. H. Rommas M. Th., Ds M. Sondakh, Pastor Ch. Widajasanarta, Ida Bagus Wa'an Gede Bagus Pato Mastra, S. M. Thaher, Suwardi, Drs Suranto Djedosoporto, Aminuddin Aziz Pulungan, Ahmad Dahlan Ranuwihardjo, Nj. Yusfa, Ida Garrida, Ni. Laetari Soetrisno, Nj. S. A. Wahid Hasim, Ni. Umi Sardiono, Ni. Sulasari Mudjati Sudarman, Ni. Francisca Fanegidaci, Ni. Titi Memet Tanumidiana, Ni. Masmunah Bahrok, dr N.H.L. Tobine, Mr G-le Harun, Mr R. Sunario, Mr Dr Suprpto, Abdollah Soefat Bandaharo Pandjane, Mohammad Ibnu Sa'uti alias Sa'uti Melik, Sidik Kertapati, Gaius Sia'ean, Diawoto, Amung Amran, Ismangoen Poedjowidag-dho, Asiro Effendi, Soeharno, Achmad Dasuki Siradi, H. Abubakar Jusuf, Diamhari, Hartojo Prawirosoedarmo, Ir Soerachman, Sunario, Jaesoe, Susilo Prawiroatmodjo, Abdullah, A. Moes Hassan, C. Monean, S. Sardiono, Trimo, Ni. Rumamah, Nj. Suharti Alimarkaban, R. Sumantri, Herman Murtashim, Sastrodikoro, Rasjid Sutan Radia Emas, Soekamsi Djioadiprodjo, Rusli Tiandradinata, Smanhadi Sastrowidjoto, Murtadi B'sri, Sudiarwo Haryowisastro, F. Runturambi, Usman Muftowidjaja, Tuk Soebianto, Ni. Setiati Surasto, Ni. Tuti Noer Bandiliah, Ni. Titas Suwandi, K. Werdojo, A. M. Datuk, Bachtiar Salim Haloho, R. B. Sitohang, Techak Moro, Mr Jusuf Wibisono, Aeus Sudono Darmahusodo, Sutarno, Wartomo Dwidjoiwono, Siahariuddin Sutan Pamuntjak, Siawu Giok Tiban, Moechari Hadisardiono, Rd. Hussein Kartasasmita, Gde Poeger, H. L. Rumasuw.

Wakil Pemerintah: 1. Menteri Pertama, Ir H. Djuanda;
2. Wakil Menteri Pertama/Menteri Distribusi, dr J. Leimena;
3. Menteri Luar Negeri/Wakil Menteri Pertama II, dr H. Subandrio;

Risalah rapat DPR mengenai keterangan Pemerintah tentang persoalan Irian Barat dalam rangka kelanjutan komando Paduka Yang Mulia Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang, 19 Desember 1961.

Risalah DPR no.657



Wakil Perdana Menteri Pertama/ Menteri Luar Negeri
Dr. Subandrio melantik Gubernur Irian Barat E.J. Bonay
di Kotabaru Irian Barat, 1 Mei 1963.

Deppen no.63-4495

POLITIK

Residentie of afdeling	Volg- nr.	Naam van de geïnterneer- den	Datum en nummer van het 'over- namingsbesluit.	Datum der betreffe- nde in- g.	Naam der ver- gelykende geboorte- plaats.	Kinderen		Totaal aantal	Opmerkingen.
						Naam	leeftijd		
Semarang	1.	Kadarisman	4 Februari 1927 No. 15.	16 Februari 1927	Roehajah	-	-	2	
	2.	Abdoelrach- man A.	idem	idem	Soejati	-	-	2	
	3.	Has Soegiri	idem	idem	-	-	-	1	
	4.	Soekinar	idem	idem	Soekinah	Soekandani Soestijah	5 jaar 4 jaar	4	
	5.	Soleh	idem	idem	Soelardi	-	-	2	
	6.	Soematri	idem	idem	Soelurni	-	-	2	
	7.	Prapto	idem	idem	Djoelnah	Wijotono	4 jaar	5	
	8.	Djastoen	idem	idem	-	-	-	1	
	9.	H.N. Soerodjojo	idem	idem	Sri Anisah	-	-	2	
	10.	Soendoro	idem	idem	Moertinah	Achjat Asat	5½ jaar 4 jaar	4	
	11.	Mohard Alie	idem	idem	Soewati	Antarirja Soewarimah	6 jaar 1½ jaar	4	
	12.	Koesno s.t.	idem	idem	Soeratni	-	-	2	
	13.	Sastroso- prapto	idem	idem	Sitiarti	Soedjono Wahito Parnoto	6 jaar 3 jaar 2 maanden	5	
	14.	Soekunder	idem	17 Februari 1927	-	-	-	1	
	15.	Dradjat	idem	16 Febru- ari 1927	Tijah	-	-	2	
	16.	Harlan s Mar- koto	idem	idem	In	Arijah Ajoes Achmad Achmah Achjat	9 jaar 5 jaar 4 jaar 3 jaar 2 jaar	7	
	17.	Hartadi	idem	idem	Roedjini	Sardi	45 dagen	3	

Daftar orang-orang yang dikirim ke Boven Digoel dari Semarang yang diangkut dengan kapal H.M Kruisser "Java", 12 Maret 1927.

Boven Digoel no.200

Afschrift.

B E V E L S C H R I F T .

De Gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië gelast,
dat de persoon van

1. Aboe Samah bin Daced, oud 27 jaar, rekeninglooper bij de Waterleiding te Medan, voorzitter van de ondersectie Soengei Kerah (Medan) der P(artij) K(ommunist) I(ndonesia), geboren en laatstelijk woonachtig ter hoofdplaats Medan, gouvernement Oostkust van Sumatra,
2. Soelsiman, oud ongeveer 30 jaar, o.m. gewezen schrijver bij de Burgerlijke Openbare Werken, laatstelijk landbouwer, voorzitter van de ondersectie Petisah Darat (Medan) der P.K.I., geboren ter hoofdplaats Batavia en laatstelijk woonachtig ter hoofdplaats Medan, gouvernement Oostkust van Sumatra,
3. Mohamad Jaceb bin Bandara, oud 30 jaar, barbier, commissaris der Sarekat Pegawai Pelaboean dan Laoet en voorzitter van de ondersectie Belawan en Laboean der P.K.I., geboren te Timbang Deli en laatstelijk woonachtig te Belawan Deli, gouvernement Oostkust van Sumatra,
4. Tjokrosoedarmo, oud ongeveer 30 jaar, hoedenmaker, voorzitter van de ondersectie Koeta Masoem Medan, Bah Lias en Deli Toewa, en propagandist der P.K.I., geboren ter hoofdplaats Soerakarta en laatstelijk woonachtig ter hoofdplaats Medan, gouvernement Oostkust van Sumatra,
5. Said Ali gelar Soetan Said Ali, oud 32 jaar, o.m. gewezen hoofd van eene Inlandsche lagere school en onderwijzer aan particuliere lagere scholen, commissaris van de Vereeniging van Spoor- en Tramweg Personeel te Padang en redacteur van het dagblad "Njala", laatstelijk zonder beroep, commissaris van het hoofdbestuur der P.K.I. voor Sumatra, geboren te Loeboek Basoeng, Sumatra's Westkust en laatstelijk woonachtig ter hoofdplaats Medan, gouvernement Oostkust van Sumatra,

5.

Salinan Surat Perintah Gubernur Jendral H.B. De Graeff tanggal 15 April 1927 tentang orang-orang hukuman yang harus dikirim ke Boven Digoel.

Boven Digoel no. 1

445	1376	11 - 1 - 1935	Abachasim	Kotta Paengkoel Digoel, Karia Temiang / Mandailing
	G. B. 15/10 34			
	N ^o 29			
446	1377	id.	Mama Kapalang al Abae Ramar	Baenga Kolong, Lamahala eiland Adonaa onderaf. D. Flores en Solor (Timor.) 1904
	G. B. 15/10 34			
	N ^o 30			
447	1378	id.	Achmad Fajib al Marsaedi al Adik Hadikusumo	Socemberedjo, Malang 1900
	G. B. 19/9 34			
	N ^o 33			
448	1379	id.	Roesdin al Djala, Ludin	Panjalarjan P. P. 1904
	G. B. 22/10 34			
	N ^o 10			
449	1380	id.	Saerodiroda al Marich Soekinah Soepio Soemati Sawansi	Solo 1887 Ramus, Solo 1904 d. id. 1926 d. id. 1929 d. Digoel 15 April 1927 d. 27 - 1 - 1929
	G. B. 20/10 34			
	N ^o 16			
450	1381	id.	Achmad Chatib al Maradjo	Soungailalang, Karinjau 1906
	G. B. 10/10 34			
	N ^o 17			
451	1382	22 - 2 - 1935	Mohamad Hatta	Fort de Kock
	G. B. 16/10 34			
	N^o 32			
452	1383	id.	Mas Bondan	Arjawinangun, Pleriton
	G. B. 16/10 34			
	N ^o 32			
453	1384	id.	Doctan Sjahrir	Padang Panjang
	G. B. 16/10 34			
	N^o 32			

Daftar orang-orang yang dibebaskan dari kamp Boven Digoel bersama keluarganya (termasuk Bung Hatta, Sutan Syahrir dan Bondan).

Boven Digoel no. 102

RAPPORT, UITGEBRACHT AAN ZIJNE EXCELLENTIE DEN
GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIË,
BETREFFENDE DE INTERNEERINGSKAMPEN
AAN DEN BOVEN-DIGOEL.

Inleiding. Bij G.B. van 14 maart 1930 No. 1x werd mij opgedragen, mij naar den Boven-Digoel te begeven met het doel een onderzoek in te stellen, op elk daarvoor naar mijn gevoelen in aanmerking komend gebied, naar de toestanden, verhoudingen en vooruitzichten der beide interneeringskampen aldaar, met opdracht tevens, van mijne bevindingen verslag uit te brengen aan de Regering.

In voldoening daaraan ben ik den 7den April van Batavia vertrokken, kwam ik den 20sten dier maand te Tanah Merah, de hoofdplaats van de onderafdeeling Boven-Digoel, aan, na te Ambaina anderhalven dag verbleven te hebben tot het houden van besprekingen met diverse autoriteiten, die met de interneeringskampen bemoeienis hebben.

De eerste weken van mijn verblijf daar werden aan algemeene oriëntering en een bezoek aan Tanah Tinggi gewijd, waarna den 28ten Mei een aanvang werd gemaakt met het systematisch ondervragen van ongeveer 20 à 25 geïnterneerden per dag. In totaal werden 610 geïnterneerden aan een verhoor onderworpen; ondertusschen werden algemeene verkenning en speciale onderzoekingen voortgezet.

Den 7den Juni 1930 verliet ik Tanah Merah, na daar dus 49 dagen verbleven te hebben, in de overtuiging aan mijne opdracht te hebben voldaan en voldoende gegevens te hebben verzameld om het verlangde verslag te kunnen uithrengen.

Aan mijn aanvankelijk voornemen, aan dat rapport te doen voorafgaan een kort overzicht van het ontstaan van de vestiging aan den Boven-Digoel en de wording van den toestand, dien ik daar aantroef, moest een gevolg te moeten geven, omdat mij inmiddels bereikte een afschrift van de Memorie van Overgave van den aftredenden Gouverneur der Molukken, den heer Tideman, waarin die geschiedenis zoo uitvoerig wordt behandeld, dat mijn overzicht, dat ik natuurlijk zou moeten ontleenen aan dezelfde bronnen, waaruit de heer Tideman voor zijne Memorie putte, voor de Regering geen waarde meer zou hebben. Ook is in de „Mededeelingen“ omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang reeds het nodige omtrent de wording van het interneeringsoord aan den Boven-Digoel gepubliceerd. Ik ga daarom zonder meer over tot een bespreking van den toestand in de interneeringskampen.

De toestand te Tanah-Merah. Tanah-Merah maakt bij de eerste kennismaking een indruk van welvarendheid.

De huizen in het geïnterneerdenkamp — 602 voor ongeveer 2000 zielen — zien er goed verzorgd uit, ze zijn alle met gegalvaniseerd ijzer gedekt, de erven zijn behoortlijk beplant, de wegen goed onderhouden, er is elektrische verlichting langs de voornaamste kampongwegen, er zijn twee scholen, een hospitaal, er bestaat een klein telefoonnet, er is een eenvoudig bioscoopgebouw.

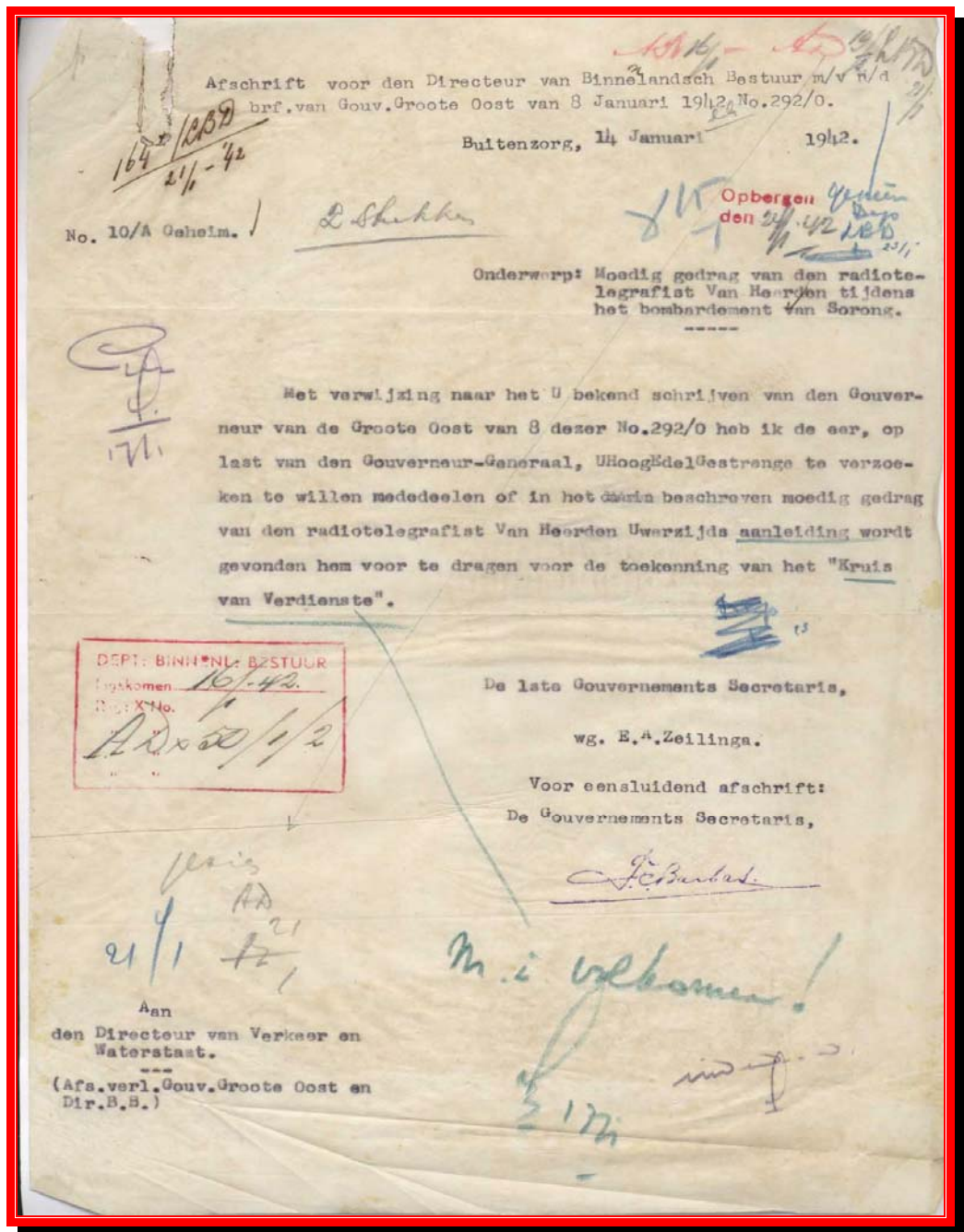
De Inlandsche bevolking, die men ontmoet, gedraagt zich rustig en ordelijk en eerst na eenigen tijd valt het op, dat sommige voorbijgangers den bezoeker passeeren zonder van hem notitie te nemen en naar het schijnt geen aanraking met hem wenschen. Niettemin komt de gedachte, dat men hier zou verkeeren te midden van gevaarlijke opruiers en vijanden van het gezag bij den naieven bezoeker niet op; geen normaal mensch zal eraan denken, zich voor zijne wandelingen door het kamp te wapenen.

Toch is de toestand niet zoo idyllisch als hij schijnt. De personen, die den Europeaan nageeten, blijken in meerdere of mindere mate principiële tegenstanders van het Westersche gezag, niet genegen voor dat gezag te werken, al kunnen zij hun materielen toestand daardoor belangrijk verbeteren.

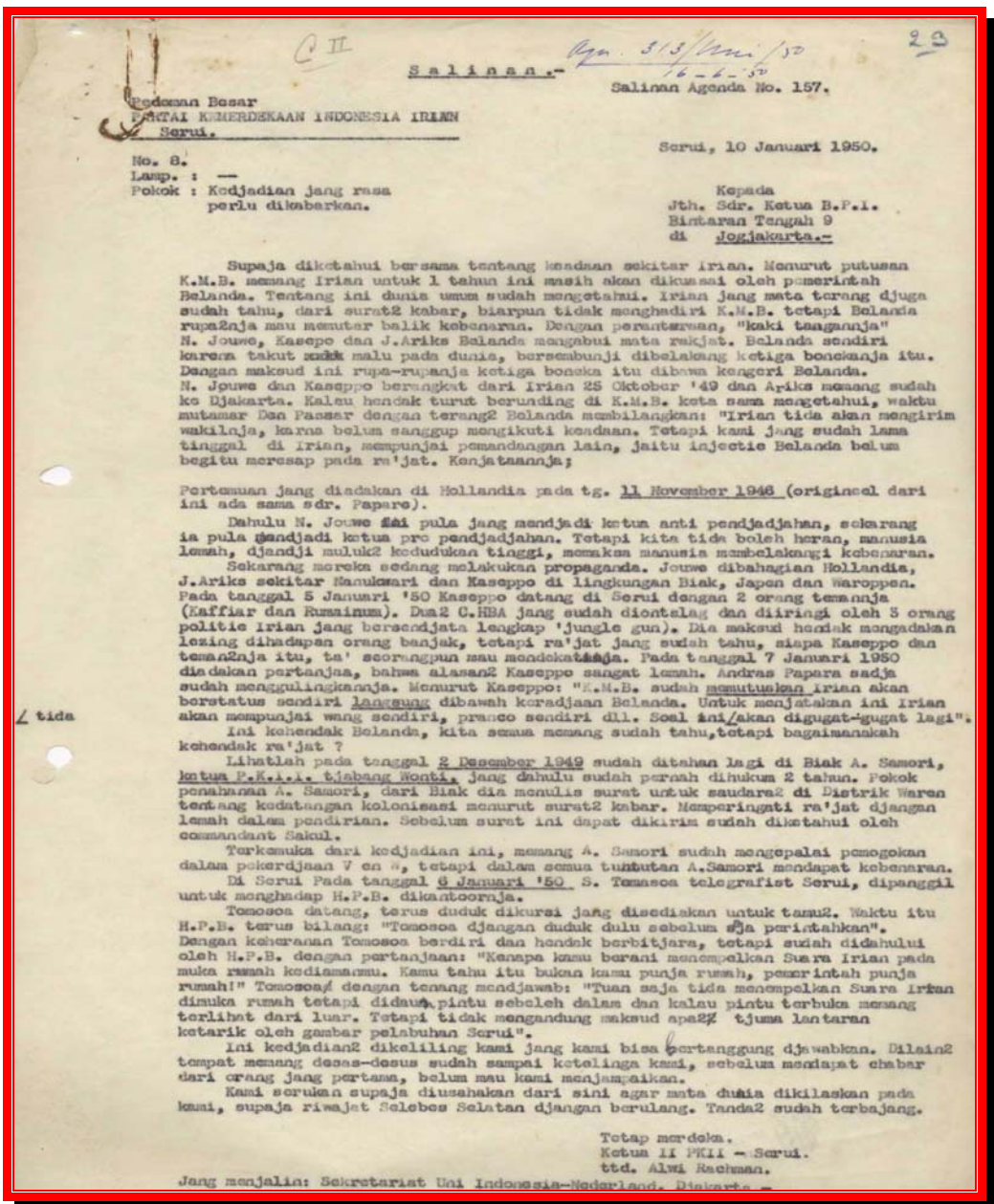
Doch de afwerende houding, die sommigen tegen den Europeaan aannemen, is niet het enige verschijnsel van verdeeldheid in deze kleine maatschappij, waar men meer eendracht zou verwachten omdat alle geïnterneerden deel hebben uitgemaakt van eenzelfde vereeniging, voor hetzelfde feit ver-

Laporan dari W.P. Hillen, anggota *Raad van Indie* tentang kondisi kamp tawanan Boven Digoel, 1930.

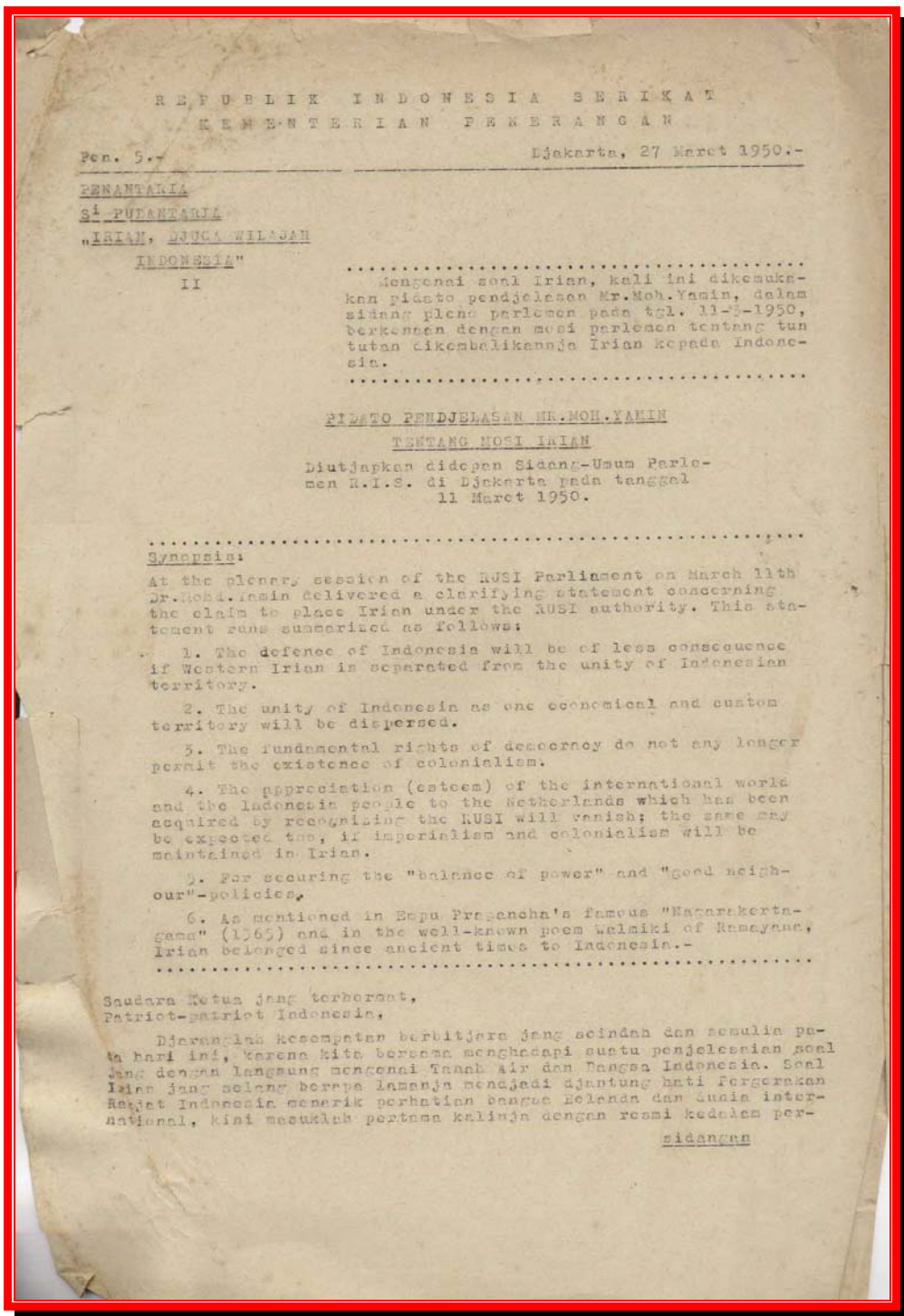
Binnenlandsbestuur no. 1308



Usul untuk memberikan tanda penghargaan kepada van Heerden, seorang telegrafis radio yang terus bekerja selama pemboman di Sorong berlangsung, Januari 1942.
Binnenlandsbestuur no. 4195



Laporan *Partai Kemerdekaan Indonesia Irian* (PKII) kepada pimpinan BPI Jogjakarta tentang keadaan Irian setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), 10 Januari-6 Februari 1950.
Delegasi Indonesia no.1494



Transkrip pidato penjelasan Mr. M. Yamin tentang mosi Irian pada Sidang Umum Parlemen RIS tanggal 11 Maret 1950.
Kabinet Presiden RIS no. 151

S A L I N A N

Sk. MERDEKA, Djakarta, 27 April 1955.

ASIA-AFRIKA TUNTUT IRIAN BARAT

Oleh:

MR. MUHD. YAMIN.

Dengan suara bulat konperensi Asia-Afrika, sedjak dari Pantai Kentjana sampai ke-Merauke, sedjak dari Peking sampai Kupang, telah memadjukan tekanan kepada dunia supaja sengketa Irian-Barat diselesaikan selekas-lekasnja.

Keputusan jang diambil oleh 29 negara jang mewakili 1600 djuta Umat Manisua Sedunia berbunji:

"The Asian-African Conference, in the context of its expressed attitude on the abolition of colonialism, supports the position of Indonesia in the case of West Irian based on the relevant agreements between Indonesia and the Netherlands.

The Asian-African Conference urges the Netherlands Government to reopen negotiations, as soon as possible, to implement their obligations under the above-mentioned agreements and expresses the earnest hope that the United Nations will assist the parties concerned in finding a peaceful solution to dispute".

Salinannja dalam bahasa Indonesia:

"Konperensi Asia-Afrika berhubungan dengan sikap jang dilahirkan tentang menghapuskan pendjadjahan, membantu kedudukan Indonesia dalam hal Irian Barat berdasarkan persetujuan2 bersangkutan antara Indonesia dan Nederland.

Konperensi Asia-Afrika mendesak Pemerintah Nederland supaja membuka kembali perundingan selekas mungkin untuk melaksanakan kewajiban2 kedua belah pihak menurut persetujuan seperti tersebut diatas, serta melahirkan pengharapan jang sungguh2, supaja Persekutuan Bangsa2 memberi bantuan kepada kedua belah pihak jang bersangkutan dalam hal mendapat pemertjahan setjara damai bagi pertikaian itu".

Dalam menerima keputusan diatas perlulah disebutkan, bahwa dalam kebulatan jang diambil, masuk pula Pemerintah Turki (jang dahulu tidak menyetujui usul India-Argentina, dan di Bandung menjokong atas nama Pemerintah Turki) dan Delegasi Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dibawah pimpinan Chou En Lai (jang masih diluar P.B.B., dan mewakili 650 djuta jiwa rakjat Tiongkok). Kebulatan Bandung jang
ditjapai

Tulisan M. Yamin dalam harian Merdeka,
"Asia Afrika Tuntut Irian Barat", 27 April 1955.

M. Yamin no.646

15 AGUSTUS 1962

PERSETUJUAN NEW YORK : PENYERAHAN IRIAN BARAT OLEH BELANDA KEPADA INDONESIA

Perjuangan pembebasan Irian Barat mencapai puncaknya dalam tahun 1962. Bersamaan dengan usaha-usaha di bidang diplomasi, dilakukan pula serangkaian operasi-operasi militer yang dilancarkan oleh Komando Mandala.

Akhirnya perjuangan ini berhasil memaksa Belanda untuk melepaskan Irian Barat, kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Di *New York*, pada tanggal 15 Agustus 1962, bertempat di Markas Besar PBB dilakukan penandatanganan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda mengenai masalah Irian Barat.

Persetujuan tersebut pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (*United Nations Temporary Executive Authority-UNTEA*) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Sejak hari itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
2. Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan, bersama-sama dengan alat-alat keamanan putra-putra Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.
3. Pasukan-pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat, tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah kekuasaan Pemerintah Sementara PBB.
4. Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan. Yang belum pulang, ditempatkan di bawah pengawasan PBB, dan tidak boleh dipakai untuk operasi-operasi militer.
5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.
6. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB.
7. Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 Pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dari Pemerintah Sementara PBB.

Hasil kesepakatan di New York bulan Agustus 1962 antara pemerintah Indonesia dan Belanda yang disaksikan PBB memberikan pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari RI

Sekretariat Negara Republik Indonesia,
30 Tahun Indonesia Merdeka



BETUL DIKOREKSI

nst.3385/63.-

PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO PADA RAPAT RAKSASA
DILAPANGAN MERDEKA UNTUK MENJAMBUI MASUKNYA IRIAN
BARAT KEDALAM WILAYAH KEKUASAAN REPUBLIK INDONESIA,
AMBON, 1 MEI 1963.

Saudara-Saudara sekalian,

Saja amat terharu bahwa pada ini hari, 1 Mei 1963, saja dianugerahi oleh rakjat Maluku gelar Pattimura Agung. Terima kasih Saudara-Saudara.

Saudara-Saudara, didalam hidup saja sebagai Presiden Republik Indonesia saja sering sekali dilimpahi dengan gelar-gelar atau sebutan-sebutan jang agung dan muluk. Sebagai Presiden saja selalu Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia. Kemudian saja sesuai dengan Undang-Undang Dasar dinamakan Panglima Tertinggi daripada Angkatan Perang atau Angkatan Bersendjata Republik Indonesia. Kemudian oleh MPRS saja diangkat mendjadi Pemimpin Besar Revolusi. Saja diangkat pula mendjadi pemimpin Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Sekarang saja disebut Pattimura Agung.

Saudara-Saudara mengerti dan ikut merasakan dengan saja betapa besar terima kasih saja kepada rakjat Indonesia jang memberi gelar-gelar dan sebutan-sebutan jang demikian itu kepada diri saja. Tetapi pun tidak asing bagi Saudara-Saudara, bagaimana sambutan saja terhadap kepada sebutan-sebutan itu. Berulang-ulang telah saja katakan bahwa djikalau nanti saja meninggal dunia, dikuburkan didalam bumi haribaan Ibu Pwatiwi, djanganlah tulis diatas batu nisan kuburan saja, "Disini dikuburkan Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia Sukarno", atau djanganlah ditulis diatas batu nisan saja itu "Disini dikuburkan Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia Tuan Besar Sukarno", tetapi dengan singkat tulislah diatas batu nisan saja itu, "Disini dikuburkan Bung Karno, Penjambung Lidah Rakjat Indonesia". Memang aku adalah sekader penjambung lidah daripada rakjat Indonesia.

Kemarin di Universitas Pattimura di Ambon telah saja katakan, bahwa pemimpin didalam sesuatu gerakan, pemimpin didalam sesuatu revolusi, bukanlah orang jang mengangkat dirinya sendiri mendjadi pemimpin, tetapi ia adalah tak lebih tak kurang daripada revolusi itu, perasan daripada rakjatnja jang bergerak, perasan daripada himmah, daripada kemauan, daripada adrengnja rakjat untuk memerdekakan diri sendiri daripada tjenggeraman imperialisme dan kapitalisme.

Sajapun Saudara-Saudara tidak pernah mengangkat diriku sendiri mendjadi Presiden, saja tidak pernah mengangkat diriku sendiri mendjadi seorang Paduka Jang Mulia, saja tidak pernah mengangkat diri saja sendiri sebagai Pemimpin Besar. Tidak! Saja sekader adalah penjambung lidah daripada rakjat. Saja sekader adalah perasan daripada rakjat. Tanpa rakjat saja tidak bisa berbuat apa-apa Saudara-Saudara.

Sekarang Saudara-Saudara telah angkat saja mendjadi Pattimura Agung, dan saja

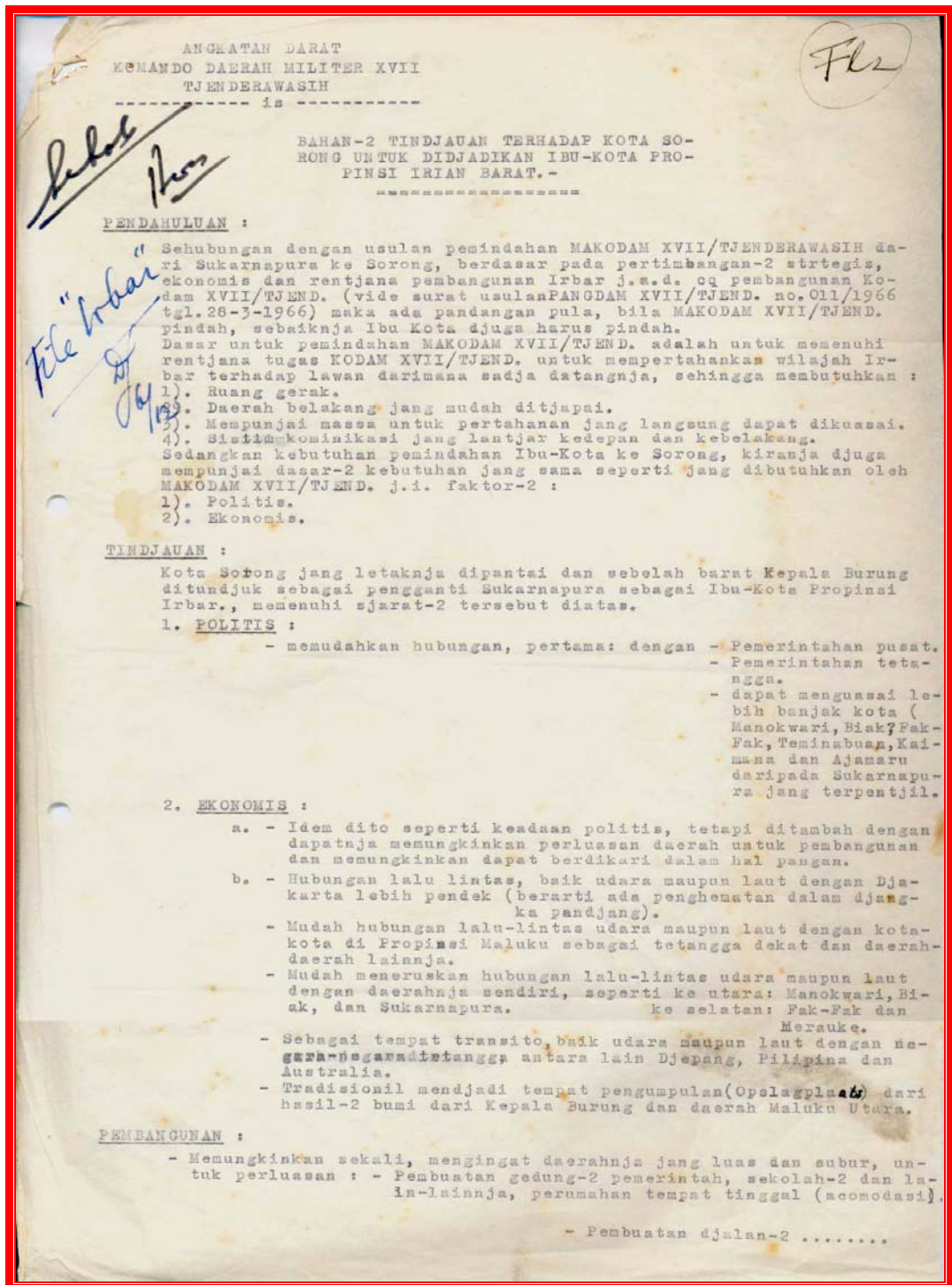
Pidato Presiden Soekarno pada Rapat Raksasa di Lapangan Merdeka, Ambon untuk menyambut masuknya Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan RI, 1 Mei 1963.

Pidato Presiden no. 487



Rakyat Kotabaru menyambut kunjungan Presiden Soekarno sebagai bentuk penerimaan rakyat terhadap realisasi pemerintahan RI di Irian Barat, 4 Mei 1963.

KEMPEN no.63-509



Pertimbangan dari KODAM VII / Tjendrawasih
bulan November 1966 tentang potensi kota Sorong untuk
dijadikan ibukota Provinsi Irian Barat.

Sekretariat Kabinet No. 113 C

14705

LAPORAN : PENINDELAH ANGGOTA MPRS, A. B. KARUBUY DI KABUPATEN SORONG DAN KABUPATEN MANOKWARI DARI TANGGAL 27 APRIL S/D 27 MEI 1968 .

SORONG: 3 MEI 1968.

Anggota MPRS, A. B. Karubuy mohon kepada Bupati Sorong major laut R. S. Soewarno, supaya diberi idzin untuk menemui tahanan gelombang O. P. M. (Organisasi Papua Merdeka) yang ditahanan Asrama Angkatan laut, Bupati idzin kepada anggota MPRS, dengan djandi besok tanggal 4 Mei 1968 pada djam 9 pagi tunggu kami di Pasangrahan.

SORONG: 4 MEI 1968.

Pada djam 9 pagi Bupati dan major laut Soebardjo serta seorang perwira Letnan, datang mengambil anggota MPRS, di Pasangrahan bersama ke Asrama Angkatan laut di Lamu, Bupati Perintahkan kepada anggota Angkatan laut yang mendjaga tahanan supaya dikeluarkan untuk menemui anggota MPRS, A. B. Karubuy.

---- Bupati membuka pertemuan dengan katakan kami sebagai Pemerintah idzinkan kepada anggota MPRS, A. B. Karubuy untuk menemui Saudara-Saudara tahanan, sebenarnja 12 (dua belas) orang tahanan ini dari E KODIM dipindahkan ke Asrama Angkatan laut, karena Asrama KODIM sudah penuh dengan tahanan.

---- Demikian keterangan dari Bupati Sorong major laut R. S. Soewarno kepada anggota MPRS, A. B. Karubuy.

PANDANGAN: Tentang Pemberontakan-Pemberontakan yang menampi dirinja DITI, RMS, PERMESTA, dan PRI. Oleh anggota MPRS, A. B. Karubuy kepada 12 (dua belas) orang tahanan O. P. M. Organisasi-Organisasi tersebut anggota-anggotanya adalah didalam tubuh T. N. I. sendiri ahli dalam bidang ketentaraan (Militer) melawan Pemerintah yang Sjah Republik Indonesia, achirnja gagar semuanja karena tidak memiliki kebenaran perdjjoangan yang tidak sesuai dengan kehendak TUHAN JANG MAHA ESA.

TAHUN 1962 TRIKORA: Merebut daerah irian barat dengan kekerasan Sendjata oleh seluruh bangsa Indonesia, maka AHLI MILITER luar negeri tidak pertjaja bahwa tentara Pajung Republik Indonesia tidak dapat turun di dataran daerah irian barat, karena hutan rimba yang lebat, hanja satu-satunja djalan pendaratan dengan Angkatan laut. AHLI militer luar negeri dalam perhitungannja gagar/meleset dan ACHIRNJA mengaku bahwa bangsa Indonesia mempunjai **KEBERANIAN** yang luar biasa .

KENJATAAN: Ini kami anggota MPRS, mohon kepada Saudara-Saudara membuat suatu surat **PERNJATAAN** yang ditanda tangani semua 12 (dua belas) orang tahanan mengakui berbuat kesalahan melawan Pemerintah yang Sjah Republik Indonesia dan mohon diampuni.

---- Anggota MPRS, pertjaja bahwa Pemerintah Pusat Republik Indonesia mempunjai perhatian yang berdasarkan dasar Negara **PANTJA SILA** ialah Sila ke 2 (dua).

---- Surat **PERNJATAAN** mana disampaikan kepada Bupati, dan diteruskan kepada Pemerintah daerah Propinsi irian barat, dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Djakarta.

---- Demikian Pandangan dan Pengertian/Nasihat kepada 12 (dua belas) orang tahanan O. P. M. di Asrama Angkatan laut di Lamu Sorong darat.

SORONG: 6 MEI 1968.

Anggota MPRS, A. B. Karubuy mohon kepada major Achmad Salim supaya diberi idzin untuk menemui tahanan gelombang O. P. M. (Organisasi Papua Merdeka) di Asrama KODIM, ditolak oleh major Achmad Salim dengan alasan lain hari sadja, karena semua tahanan **HUKUMAN** berat, termasuk beberapa anggota Bataljon Tjenderawasih 11.

---- Lalu anggota MPRS, mohon kepada major Achmad Salim dapatkah berikan kepada kami djumlah dari tahanan ? Djawab major Achmad Salim seluruh Kabupaten Sorong berdjumlah: 92 (sembilan puluh dua) orang tahanan O. P. M. (Organisasi Papua Merdeka).

---- Demikian keterangan dan ~~tidak~~ tindakan dari major Achmad Salim kepada anggota MPRS, A. B. Karubuy.

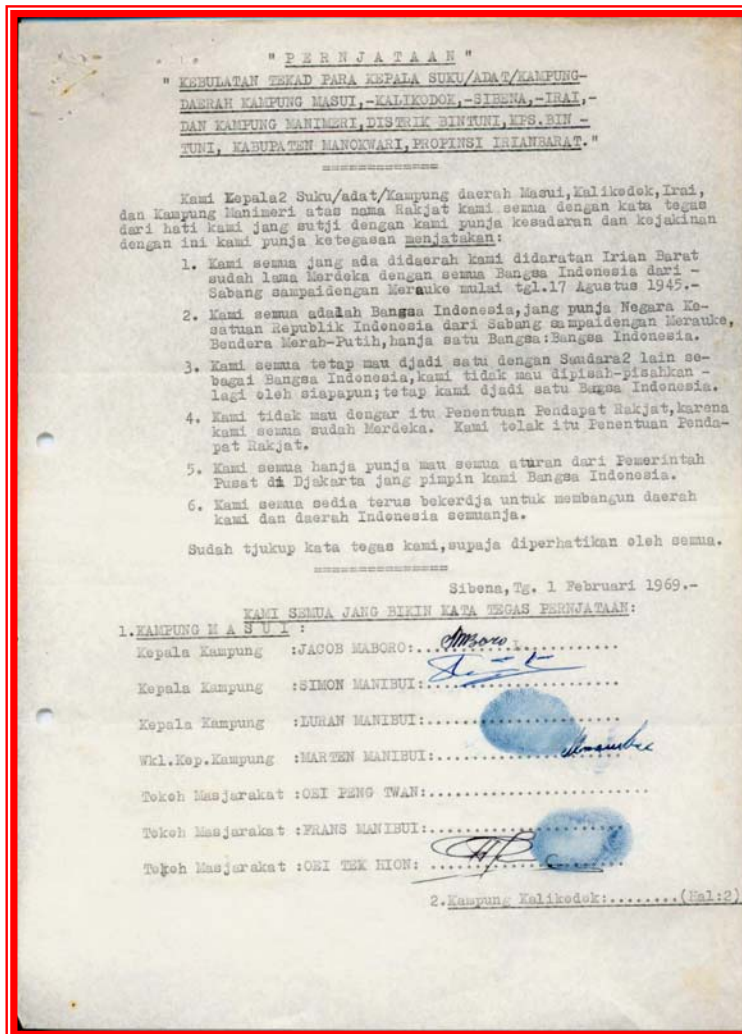
MANOKWARI: 13 MEI 1968.

Laporan perjalanan anggota MPRS A. B. Kahubuy ke Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong pada tanggal 27 April-27 Mei 1968.

Sekretariat Kabinet No. 113 B



Peta Situasi "Gerombolan Mandatjan" dan kedudukan Pasukan Operasi Sadar pada awal bulan Desember 1968.
Sekretariat Kabinet No. 113 C



Pernyataan kebulatan tekad para kepala suku/adat/kampung daerah kampung Masui, Kalikodok, Sibera, Irai dan kampung Manimeri, Distrik Bintani, KPS. Bintani, Kabupaten Manokwari, Provinsi Irian Barat, untuk tetap bersatu sebagai Bangsa Indonesia, 1 Pebruari 1969

SEKKAB no.113 C

PERNJATAAN RAKJAT SUKU ARFAK

----- Setelah mempelajari, menelaah penjelasan-2 dari Pemerintah, serta setelah melihat kenyataan-2 bahwa, daerah Irian Barat adalah wilayah mutlak dari Negara kita Republik Indonesia, yang berwilayah dari Merauke sampai Sabang, yang dulu disebut HINDIA BELANDA dan selama 350 tahun lebih diduduki oleh Belanda, maka kami orang-2 Rakjat Suku Arfak, dengan penuh kesadaran, pengertian, bersama ini menyatakan bahwa : -----

1. Kami mengaku mendukung dan memberikan kepertjajaan sepenuhnya kepada Pemerintah kita, dalam melaksanakan Penentuan Pendapat Rakjat yang akan datang. -----
2. Kami orang suku Arfak mengaku, adalah Bangsa Indonesia yang berjiwa Pantjasila dan berbendera Merah Putih. -----
3. Kami orang-2 Rakjat suku Arfak, tidak ingin dipisah-2kan dengan Saudara kami lainnya dan ingin tetap bersatu dalam Negara kita Republik Indonesia, yang mempunyai wilayah dari Merauke sampai ke Sabang, sesuai dengan pengumuman kemerdekaan Negara kita Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. -----
4. Kami orang-2 Suku Arfak mengaku, mendukung dan memperkuat terhadap Pernyataan-2 dari Saudara-2 lain dari Irian Barat, yang menyatakan tetap bersatu dalam Negara kita Republik Indonesia. -----
5. Kami orang-2 suku Arfak mengaku, tidak setuju dengan golongan-2 tertentu, yang berusaha memecah belah Negara kita dari Merauke sampai Sabang. -----

Demikianlah pernyataan ini, kami orang buat dengan sebenarnya dalam hati yang jujur, suti tidak ada paksaan. -----

Manokwari, 12 Februari 1969

Atas nama Rakjat Suku Arfak di daerah Pasir Putih, yang berjumlah 400 (empat ratus) orang.

ANGGATA D.P.R.D.KAB.MANOKWARI,
KEPALA KAMPUNG

(DORTIS MAIDODGA)

Adjun Brigadir Polisi.

KEPALA KAMPUNG

(JACOBUS MAIDODGA)

DIKIRIMKAN KEPADA JANG TERHORMAT :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia di Djakarta.
2. Bapak Menteri Luar Negeri R.I. di Djakarta.
3. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Djakarta.
4. Bapak Pembantu Khusus Menteri Luar Negeri SUDJARWO TJONDRONEGARA di Djakarta.
5. Bapak Gubernur Propinsi Irian Barat di Sukarnapura.
6. D.P.R.D. Propinsi Irian Barat di Sukarnapura.
7. Bapak-2 Anggata MUSPIDA Kabupaten Manokwari di Manokwari.
8. Bapak Bupati Kabupaten Manokwari di Manokwari
9. D.P.R.D. Kabupaten Manokwari.
10. Dinas Penerangan Kabupaten Manokwari dan R.R.I. Manokwari.

TEMBUSAN : Dikirimkan kepada Jang Terhormat.

Wakil Sek.Djen.P.B.B. ORTIZ SANDZ di Sukarnapura.

Pernyataan warga Suku Arfak tanggal 12 Februari 1969 yang mendukung penyatuan Irian Barat ke dalam wilayah RI.

Sekretariat Kabinet No. 113 C

Kebulatan Tekad

Mendjunjung tinggi maksud baik dari Pemerintah kami yang sah yaitu Pemerintah Republik Indonesia mengenai masa depan daerah kami Irian Barat, dan tentang penyelesaian perselisihan New York, maka kami seluruh rakyat K. P. S. Ransiki dengan ini menjabarkan kebulatan tekad kami sebagai berikut:

1. Kami hanya mengetahui satu Pemerintah kami yang sah, yaitu Pemerintah Republik Indonesia, dan kami tetap pertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka mulai tanggal 17 Agustus 1945.
2. Kami serahkan pelaksanaan penyelesaian perselisihan New York, kebidan tangan Pemerintah kami yang sah, dan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten, dengan kelentuhan tetap memperhatikan keutuhan wilayah Republik Indonesia.
3. Kami seluruh rakyat wilayah K.P.S. Ransiki siap sedia melaksanakan Rencana Pembangunan yang telah direncanakan pemerintah, untuk kemakmuran negara dan bangsa kami Indonesia.

Ransiki: 8 Maret 1969

Kami kepala-kampung, kepala suku, dan tokoh masyarakat.

14	Lawanera Soba	Kep. Kampung.
15	Nataniel Kaidan	Kep. Kampung.
16	Besbey Mansiba	Kep. Kampung.

Tanda tangan

B. P. Ransiki

Kansiki

Kebulatan tekad para kepala kampung, kepala suku, dan tokoh masyarakat Ransiki pada tanggal 8 Maret 1969. Mereka menyatakan bahwa pemerintahan yang sah atas Irian Barat adalah pemerintah RI.

Sekretariat Kabinet No. 113 A

13 17 MRE 1969

5741

40 (Jilid 3)

Surat Pernyataan.

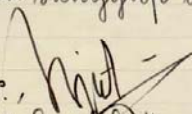
Jang bertanda tangan dibawah ini kami:
Kepala² Suku/Adat, Kepala Lampung jang mewakili atas nama:
penduduk jang meliputi kampung² Saikolof, Kotlol, Menjinsah,
dan Djulbatan wilayah H. P. S. Radja Ampat, menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa:

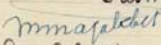
1. Kami tetap ikut mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Bendera Merah Putih adalah bendera kami.
2. Kami menolak penentuan pendapat rakjat tahun 1969. Karena hal tersebut akan memetjah belah antara kami, dan juga akan menghambat pembangunan terutama daerah Irian Barat.
3. Kami mendukung sepenuhnya akan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Khususnya daerah Irian Barat.
4. Sedjalan dengan Repelita tersebut, kami akan berusaha membangun kampung kami menurut petunjuk² dari Pemerintah.

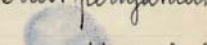
Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan kami tersebut ternyata kami ingkari, kami sanggup diambil tindakan oleh jang berwenang.


Saikolof 12 Maret 1969.

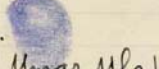
Kami jang membuat pernyataan.


1. 
P. Rajalibit
Kep. Suku/Adat.

2. 
R. Rajalibit
Kep. Kamp. Saikolof
Kep. Suku/Adat.


3. 
Alaman Ampales
Kep. Adat.

4. 
Safaruddin Ketjil
Kep. Adat.

5. 
Umar Ula
Kep. Adat
Sukin Saikolof.

6. 
Galake Ula
Kep. Adat.

F sedjumlah. 604 jiwa

7. 
Fataha Gamor
Kep. Adat.

Pernyataan kepala suku/adat dan kepala kampung dari Saikolof, Kotlol, Menjinsah, dan Djulbatan tanggal 12 Maret 1969 yang menyatakan bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari RI.

Sekretariat Kabinet No. 113 C

PERNYATAAN/KEBULATAN TEKAD
DARI ANGGOTA ANGGATAN '45
DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
IRIAN-BARAT

Kami dari Angkatan '45 telah meneropong
memperhatikan dan mengetahui gejala-gejala di Irian
Barat yang dapat mempengaruhi sosial politik
yang timbul dari dalam masyarakat serta se-
sudi dengan pernyataan berbagai lain dengan
suara bulat yang diambil dalam pertemuan
para anggota '45 pada tanggal 15 Maret 1969
dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad
kami sebagai berikut:

- I. Bahwasanya Pemerintah Republik Indo-
nesia adalah berdaulat penuh di daerah
Irian Barat ini, sehingga kami berpenda-
pat bahwa utusan atau wakil dari Se-
kretaris Jenderal P.R.B. beserta Stafnya
yang berada di Irian Barat adalah se-
bagai tamu. Biasa yang hanya melaku-
kan tugasnya sebagaimana ditentukan
dalam persetujuan New York tentang
Irian Barat.
- II. Bahwa kami tidak menyetujui/membe-
rarkan adanya surat-kaleng yang dise-
barakan atau disampaikan dan dise-
dikan oleh oknum-oknum yang tidak bertang-
gung jawab kepada Sekretaris Jenderal
P.R.B. melalui misi Politik Bank yang se-
mentara berada di Irian Barat atau
ditempat mana pun juga.
- III. Kami anggota Angkatan '45 daerah Ka-
bupaten Manokwari mendukung sepenuh-
peruhnya atas segala permintaan dari
Angkatan '45, Kepala Suku, Tokoh, masja-
kat, Orpol, Ormas dan Partol dise-
luruh Irian Barat mengenai pernyataan
yang tidak menyetujui atas pendudukan
pendapat rakyat Irian Barat.
- IV. Pelaksanaan pendapat rakyat Irian-
Barat bila akan dilaksanakan juga
oleh Pemerintah Republik Indonesia
maka kami mohon dan segera da-
pat terlaksana dan dapat pula di-
selesaikan/untuk segera berimplikasi
tutup disini takap di daerah Irian Barat
dan kepelita ditingkatkan/disukseskan
dan dilantarkan dengan segera di segala
bidang.

Surat pernyataan kebulatan tekad dari anggota Angkatan '45 daerah Kabupaten Manokwari tanggal 15 Maret 1969. Anggota Angkatan '45 menganggap bahwa Irian Barat adalah bagian dari Republik Indonesia.

Sekretariat Kabinet No. 113 A

GERAKAN ISLAM MUHAMMADIYAH
TJABANG PEGUNUNGAN DJAJAWIDJAJA.

22 Apr. 1969

P E R N J A T A A N 7632

No.:002/Pernj-Muhd/1969.-

Dengan ini kami seluruh warga Gerakan Muhammadiyah Tjabang Pegunungan Djajawidjaja:

- Mengingat : 1. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945.
2. Mukaddimah U.U.D. tahun 1945.
3. Naskah perdjandjian Konfrensi Medja Bundar di Den Haag tahun 1949.
- Mengingat pula : 1. Pernjataan DPRD Kabupaten Pegunungan Djajawidjaja tgl. 8 Dju-
li 1968, No.: 10/DPRD/1968.
2. Pernjataan bersama Perpol/Ormas Islam Pegunungan Djajawidja-
ja tanggal 29 Nopember 1968.
3. Pernjataan Tjabang Partai Nasional Indonesia Pegunungan Dja-
jawidjaja tgl. 26 Nopember 1968 No.: 01/Pol/DPT-PDW/1968.
4. Pernjataan Legium ~~Rakyat~~ Veteran Republik Indonesia Pe-
gunungan Djajawidjaja tgl. 30 Nopember 1968.
5. Pernjataan DPRD Kabupaten Pegunungan Djajawidjaja tgl. 8 No-
pember 1968 No.: 2/Pernjat/DPRD-PDW/1968.
- Menimbang : Pernjataan dari Perpol/Ormas, Kepala2 Suku/adat dan masjarakat
diseluruh daerah Irian Barat, tentang penolakan Act of Free Cho-
/Penentuan Pendapat Rakjat Irian Barat.

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa, kami seluruh warga Gerakan Islam Muhammadiyah
Pegunungan Djajawidjaja:

MEN JATAKAN DENGAN TEGAS

- I. Monolak diadakanja Penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat
karena proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah montja-
kup seluruh wilajah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
- II. Siapa-siapa jang menginginkan memisahkan Irian Barat dari
wilajah Republik Indonesia, adalah mengchiunati proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pedjuang2 pahlawan Indone-
sia jang telah mengorbankan djiwa raganja untuk kesatuan dan
persatuan Bangsa dan Negara Indonesia.
- III. Menjerukan kepada

Pada tanggal 17 Maret 1969 Gerakan Islam Muhammadiyah Cabang Pegunungan Jayawijaya mengeluarkan pernyataan yang isinya mendukung penyatuan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia.

Sekretariat Kabinet No. 113 C

MARKAS DAERAH LEGIUN VETERAN PROPINSI IRIAN BARAT
 MARKAS TWABANG LEGIUN VETERAN 02 KABUPATEN
 PEGUNUNGAN DJAJAWIDJAJA.

D. P. DAGRI
 1964
 14-5-69
 DATA ENCIHA

DINAS
 POLITIK & KEAMANAN
 Agenda No. : 113
 Tanggal : 3-6-69

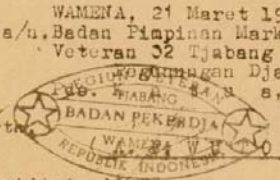
PERNJATAAN.
 No. : 05/MLVT/02/1969.

1. Kami warga Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia Tjabang Kabupaten Pegunungan Djajawidjaja, mendukung penuh Deklarasi Rakjat Irian Barat pada tanggal 9 Mei 1964, dan mengakui sepenuhnya bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 telah menjangkup keseluruhan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke.
2. Kami warga Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia Tjabang Kabupaten Pegunungan Djajawidjaja, ingin menjetakan bahwa kami tetap bertekad mempertahankan kesatuan serta persatuan Bangsa Indonesia yang berwilajah dari Sabang sampai Merauke jeng kemerdekaannya telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
3. Kami warga Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia Tjabang Kabupaten Pegunungan Djajawidjaja, mendukung sepenuhnya Pernyataan Kesulitan tekad Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten Pegunungan Djajawidjaja dalam sidangnja jg pertama pada tanggal: 8 Juli 1968 no.: 10/DFRD/1968, dan perujataan ke. II Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten Pegunungan Djajawidjaja dalam sidangnja pada tanggal: 8 Nopember 1968, no.: 02/Pernjat./DFRD-PDW/1968, jang antara lain menjetakan bahwa daerah Irian Barat adalah Bagian mutlak dari pada Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia

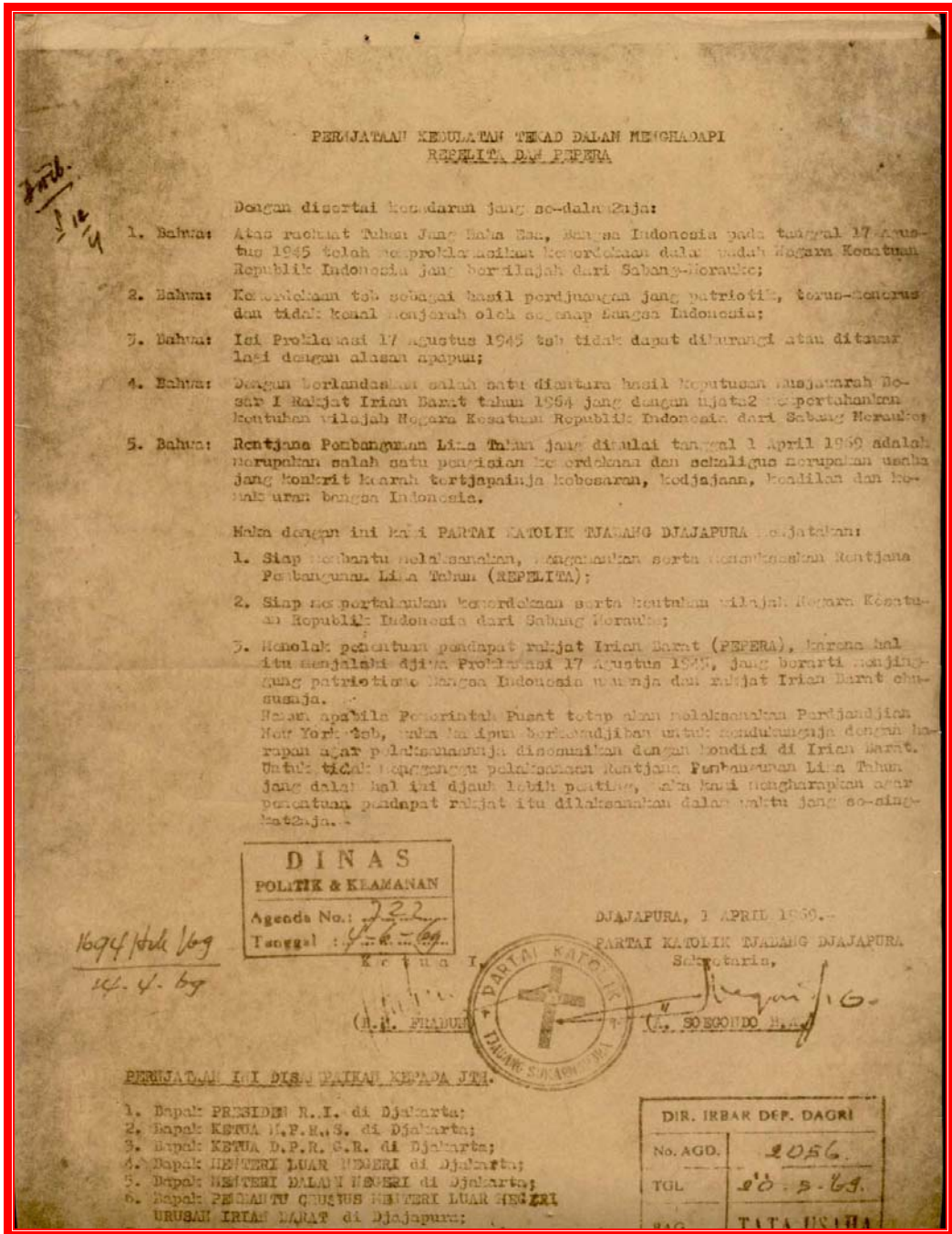
DENGAN BERKAT TUHAN JANG MAHA KUASA,
MENJATAKAN:

1. Menolak Penentuan Pendapat Rakjat (PEPERA) jang akan diadakan pada bulan Djuli 1969 jg akan datang, sebab pada hakikatnja bertentangan dengan aspirasi Bangsa Indonesia jang telah merdeka sedjak 17 Agustus 1945.
2. Bahwa kepada setiap oknum jg ingin memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ialah penghianat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Tembusan disampaikan kepada:
 1. J.th: Bapak Soedjarwo Tjondronegoro a/u. Badan Pimpinan Markas Legiun Veteran 02 Tjabang Kabupaten Pegunungan Djajawidjaja, di Djakarta.
 2. J.th: Bapak Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
 3. J.th: Bpk. Direktur Urusan Irian Barat, Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
 4. J.th: Tuan Ortis Sanz di Djajapura.
 5. J.th: Muspida Prop. Irbar di Djajapura.
 6. J.th: Muspida Kabupaten Pegunungan Djajawidjaja di Wamena.
 7. J.th: Bapak Ketua DFRD Kabupaten Pegunungan Djajawidjaja di Wamena.
 8. J.th: Bpk. Ketua Markas Daerah Legiun Veteran Prop. Ibar. di Djajapura.
 9. J.th: Bpk. Ketua Umum Mark. Tj. Logvri 02 PDW/Des Dim 1702 di Wamena.
 10. A r s i p . -



Menghadapi rencana pelaksanaan PEPERA di Irian Barat pada tanggal 21 Maret 1969 Markas Daerah Legiun Veteran Provinsi Irian Barat menyatakan bahwa PEPERA tidak perlu dilaksanakan, sebab Irian Barat sebenarnya adalah bagian yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 C



Pernyataan kebulatan tekad Partai Katolik Cabang Jayapura tanggal 1 April 1969, yang menyatakan bahwa Irian Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI dan siap mendukung REPELITA.

Sekretariat Kabinet No. 113 C

P E R N J A T A A N .

Kebulatan tekad kaum Wanita se KPS.Ransiki jang tercabung dalam Perwib-Bajangkari dan P.W.K.KPS.Ransiki,Kabupaten Manokwari Propinsi Irian Barat.

Mengingat : Bahwa kami orang atas nama seluruh wanita KPS.Ransiki Kabupaten Manokwari Irian Barat,kami orang telah hidup Merdeka dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sedjak hari Proklamasi 17 Agustus 1945, semua dari Sabang sampai dengan Merauke dibawah Merah Putih bendera kami bangsa Indonesia,kemerdekaan kami semua orang jang tadinja disebut Nederlands-Indie.

Menimbang : Bahwa kami semua orang jang berbangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke jang bertempat tinggal di daerah KPS.Ransiki Kabupaten Manokwari Propinsi Irian Barat,tetap kami orang punja mau tentukan pendapat kami jang telah merdeka,jaitu kami tetap sebagai Bangsa Indonesia jang bendera kami Merah Putih,tetap pada Republik Indonesia jang Merdeka mulai 17 Agustus 1945.

M e n j a t a k a n :

- Memutuskan :
1. Kami orang hanja mau hidup dengan Republik Indonesia,Bendera Merah Putih,dalam negara kami Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Kami orang tetap ingin utuh djadi satu sebagai bangsa Indonesia tidak mau dipisah2kan lagi,terus tetap bersatu sebagai Bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke kami punja Negara.
 3. Kami orang tidak mau itu Pilihan Penentuan Pendapat Rakjat dilaksanakan kami orang serahkan semua soal pilihan Penentuan Pendapat Rakjat kepada Pemerintah kami di Pusat di Djakarta sebagai pimpinan kami orang Rakjat Bangsa Indonesia.
 4. Kami orang punja djandji untuk bantu Pemerintah kami melaksanakan kami punja Rentjana Pembangunan Lima Tahun.
 5. Kami orang menolak keras kepada kami punja Pemerintah untuk dia orang seperti Nocolas Jowe, Markus Kaisepo, Herman Womsiwor, dan lain-lain jang masih berbauan kolonialis untuk datang kepada kami punja daerah dan Negara.
 6. Kami orang punja isi hati sutji,hanja sekian supaja diperhatikan.-

Pada tanggal 21 April 1969 organisasi wanita di Ransiki, Kabupaten Manokwari menyatakan kebulatan tekadnya untuk bergabung dengan pemerintah RI. Organisasi-organisasi wanita yang menyatakan kebulatan tekad tersebut adalah: PERWIB Bhayangkari dan PWK KPS Ransiki.

Sekretariat Kabinet No. 113 A

P E R N J A T A A N

Kebulatan Tekad dari Persatuan Geredja Kristen K.P.S. Ransiki - Kabupaten Manokwari - Propinsi Irian Barat.

Meningat :

1. Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah berwilajah kekuasaan dari Merauke sampai Sabang yang pada zaman pendjadjahan disebut Nederaland - Indie.
2. Korban2 para pedjuang Indonesia, termasuk putra2 dari daerah Irian Barat untuk mempertahankan kemerdekaan bersama dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang :

Bahwa kami sebagai bagian bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di K.P.S. Ransiki - Kabupaten Manokwari - Propinsi Irian Barat telah menentukan kehendak bebas kami jaitu sebagai bangsa yang sudah merdeka yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan bendera Merah Putih.



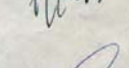

Memutuskan :

M E N J A T A K A N

1. Tidak ada pilihan lain bagi kami, selain tetap didalam lingkungan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa kami menolak pelaksanaan PEPERA di Irian Barat, dan kalau pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan djuga, maka pelaksanaan itu hanya sebagai formalitas sadja, dan kami pun bertekad bulat untuk memenangkannya. Disamping itu kami mengharapkan agar PEERA tersebut djangan mengganggu dari pelaksanaan REPELITA.
3. Bahwa kami bertekad bulat membantu pemerintah dalam mensukseskan REPELITA, untuk menjapai masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.
4. Demikianlah pernjataan kami, untuk dapat dimaklumi, semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu bersama kita.

Ransiki, 26 April 1969

Atas nama seluruh pemeluk Kristen se K.P.S. Ransiki.

No.Urut	N a m a	P e k e r d j a a n	T . T a r i k a n
1.	B. Sabarofek	Diriktur Geredja	
2.	J. Dinara	Ketua Kelas	
3.	H. Sombuk	Pejabat Protestas	
4.	E. Aplosis	Ketua Djurnal/Protestas	

Kebulatan tekad Persatuan Geredja Kristen KPS – Ransiki, Kabupaten Manokwari untuk mendukung masuknya Irian Barat ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia, tanggal 26 April 1969.

Sekretariat Kabinet No. 113 A

14 2 MFI 1969
9790

Follow up 3

P E R N J A T A A N

PELADJAR-PELADJAR SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS NEGERI
M A N O K W A R I

No. 04/Pernjt./EA/M*kwri/1969.

DALAM RAPAT BADAN PENGURUS DEWAN MURID S.M.E.A.NEGERI MANOKWARI
T E N T A N G
TINDAKAN-TINDAKAN BEBERAPA PELADJAR S.M.E.A.NEGERI MANOKWARI
JANG TIDAK MENGINGINI DENGAN RENTJANA PEMERINTAH R.I.

- MENIMBANG** : a. Bahwa tindakan-tindakan tsb.tidak sesuai dengan keinginan para peladjar jang lainnja dan tidak sesuai pula dengan tudjuan Pemerintah serta menghambat pembangunan daerah Irian Barat dalam rangka REPELITA.
b. Untuk mendjaga nama baik sekolah dan mendjaga pula agar para Peladjar tidak terpengaruh dengan suara2 jang datang dari luar.-
- MENDENGAR** : a. Uraian dan pendjelasan Team Follow Up Keamanan di Manokwari.
b. Saran2 dari Guru2 S.M.E.A.Negeri Manokwari
c. Uraian dan pendjelasan Petugas Operasi Khusus Pemerintah Pusat tentang pokok2 kebidjaksanaan Pemerintah mengenai pelaksanaan PEPERA dan REPELITA.
- MEMPERHATIKAN** : Ketaatan Peladjar-Peladjar S.M.E.A. Negeri Manokwari terhadap Pemerintah R.I. sebagai Pemerintahnja sendiri.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Sumpah Pemuda tgl.28 Oktober 1928.
3. Persetudjuan New York thn.1962 tentang pelaksanaan PEPERA di Wilayah R.I. Irian Barat.
- MENINGAT PULA** : Hasil Rapat Pengurus Dewan Murid S.M.E.A. serta wakil2 kelas tgl.26 April 1969 dan Rapat Umum(Seluruh peladjar) pada tgl. 28 April 1969.

Dengan ini seluruh Peladjar-Peladjar S.M.E.A.Negeri Manokwari setjara aklamasi,

M E N J A T A K A N :

1. Mengutuk se-keras2nja perbuatan oknum2 jang tidak bertanggung djawab dan usaha2 separatisme sebagai sisa2 politik "DEVIDE ET IMPERA" dari politik Kolonial Belanda perlu dimusnahkan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan Kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke.-
2. Tidak tahu menahu bahkan mentjela tindakan2 oknum2 dari Peladjar S.M.E.A.Negeri Manokwari jang hanja menodai nama baik S.M.E.A. Negeri Manokwari.-
3. Bersedia untuk membantu Pemerintah dalam pelaksanaan PEPERA dan REPELITA. Penjelenggaraan PEPERA tidak boleh mengganggu Pelaksanaan REPELITA jang lebih dipentingkan oleh Rakjat Irian Barat.

Pernyataan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri Manokwari tanggal 28 April 1969, mengutuk tindakan oknum-oknum yang mendukung kebijakan "devide et impera" yang dijalankan kolonialis Belanda.

Sekretariat Kabinet No. 113 B

PERNJATAAN KEBULATAN TEKAD.

124.3
11 Mei 1969

MENGINGAT :

1. Bahwa sedjak diproklamirkanja Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 - Agustus - 1945 , IRBAR sudah termasuk bahagian jang tidak terpisah daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa Sumpah Pemuda jang ditjetuskan pada tanggal 28 - Okt - 1928 , IRBAR termasuk bahagian jang tidak terpisah daripada Tanah Air Indonesia.
3. Bahwa didalam perdjjuangan melepaskan diri dari pendjdjahan tidak sedikit telah mengorbankan putra Indonesia termasuk putra asli IRBAR sebagai Pahlawan Bangsa.
4. Bahwa pentingnja pelaksanaan REPELITA (Rentjana Pembangunan Lima Tahun), untuk segera tertjiptanja masjarakat adil dan makmur diseluruh wilajah Negara Kesatuan Indonesia termasuk IRIAN@BARAT.

MENIMBANG :

Bahwa setelah menjadari se-dalam2nja ,apa jang tersebut didalam bab MENGINGAT , maka dengan ini MENJATAKAN KEBULATAN TEKAD, seperti tersebut dibawah .

M E N J A T A K A N :

Ka mi jang tersebut dibawah :

1. Para Karjawan Pendidik dar S.M.P. Negeri Wasior.
2. Para Karjawan Pendidik dari S.G.B.JPK.MIEI.Wasior.
3. Para Wali murid S.M.P.Negeri Wasior
4. Para Wali murid S.G.B.JPK MieI Wasior.
5. Para Karjawan Pendidik S.D. daerah K.P.S Wandamen.
6. Para Wali murid S.D. daerah K.P.S Wandamen.
7. Para siswa S.M.P Negeri Wasior.
8. Para siswa S.G.B.JPK.Miei Wasior.

Dengan ini kami menjatakan Kebulatan Tekad sebagai berikut :

- a). Bahwa IRBAR sedjak 17 -Agustus -1945 adalah termasuk bahagian jang tidak terpisah dari Negara Kesatuan Republik-Indonesia.
- b). Bahwa kami tidak mengakui adanja pemerintahan jang sah di-IRBAR ketjuali Pemerintah Republik Indonesia.
- c). Bahwa pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakjat hanja akan menghambat pelaksanaan REPELITA di IRBAR , karena itu tidak - perlu diadakan .
- d). Apabila PEPERA terpaksa harus diadakan , agar pelksanaannja hanja sebagai formalitas sadja .
Dan dilaksanakan se-tjepat2nja .

Kebulatan tekad murid, guru, dan orang tua murid sekolah menengah di Wasior, yang menyatakan bahwa mereka, rakyat Irian Barat, adalah bagian dari Republik Indonesia, tanggal 2 Mei 1969.

Sekretariat Kabinet No. 113 A

KOMISI
PARTAI N.U. DAN ORMAS-ORMASNYA
WILAJAH IRIAN BARAT

Filing 3

Konperensi Wilayah I Partai N.U. dan Ormas-Ormasnya se Irian Barat yang berlangsung dari tanggal 15 s/d 22 Mei 1969 di Djajapura dan dihadiri oleh Tabang-tjabang :

1. Tjabang Merauke .
2. Tjabang Kaimana .
3. Tjabang Kokas .
4. Tjabang Fak-fak .
5. Tjabang Sorong .
6. Tjabang Manukwari .
7. Tjabang Biak .
8. Tjabang Djajawidjaja .
9. Tjabang Sarmi .
10. Tjabang Djajapura .

30 JUN 1969

11515

Setelah mendengar dan mempelajari :

1. Prasaran Bapak Gubernur/KDH. Propinsi Irian Barat ;
2. Prasaran Ketua DPRD-GR Propinsi Irian Barat ;
3. Prasaran Pangdam XVII Tjendrawasi/Ketua Muspida ;
4. Penjelasan PB. N.U.

maka dengan musjawarah peserta Konperensi Wilayah ini, telah mengambil beberapa keputusan yang antaranja dilampirkan pada nota ini .

Berlandaskan Thema Konperensi " MELLENANGKAN PEPERA DAN MENSUKSESKAN PELITA " sekaligus berarti bahwa seluruh keputusan Konperensi ini di djiwai oleh thema tersebut.

Seluruh warga ahli Sunnah Waldjamaah yang merupakan djanah N.U. didaerah Irian Barat ini sungguh-sungguh sangat menjadari akan dua tugas nasional tadi yang karenanja tidak ada pilihan lain dari pada ikut aktif berpartisipasi dengan semua kekuatan Orde Baru di daerah ini.

Seluruh Djamaah N.U. didaerah ini menjadari bahwa sebagai anggota setia dari partai N.U. dan segenap ormas-2 nja yang hidup resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hanja menerima keanggotaannya dari earga Negara Indonesia maka tidak ada pilihan lain dari pada tetap mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan R.I. dari Babang sampai ke Merauke .

Karena kemenangan atas hasil PEPERA merupakan tugas utama dan mulia dan pendorbanan untuk itu tidaklah sia-sia sebagai yang telah ditunjukkan selama ini. Kamipun menjadari bahwa untuk menjapai semua itu pemeliharaan keamanan bukan semata-mata tugas ABRI tetapi mendjadi kewajiban kita semua dan karenanja peningkatan kerdja sama dengan ABRI merupakan sjarat mutlak serta peningkatan pengertian rakjat harus terus menerus dibina.

Berbitjara mensukseskan PELITA haruslah dengan tekat memenangkan PEPERA. Memenangkan PEPERA haruslah dibarengi dengan tindakan2 njata yang menghilangkan semua hambatan yang mungkin ada.

Atas dasar kebulatan tekad dan sikap tersebut diatas sambil bertawakkal ke Hadirat Allah Swt., maka Konperensi Wilayah I Partai Nahdlatul Ulama dan Ormas-ormasnya se Irian Barat menjampaikan nota ini untuk mendapatkan perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinja .

WABILLAHIT TAUFIQ WAL HIDAJAH. Amin .-

Djajapura, 22 Mei 1969 .-

Konperensi Wilayah I Partai N. U .
beserta ormas-ormasnya
se Irian Barat ,
Sekretaris Sidang;

Ketua Sidang ;

(H.N. Mashur - D. Rachmat)



(Noor Sulistyono B.A.) .-

Konperensi Wilayah I Partai N.U. dan ormas-ormasnya di Jayapura, 15-22 Mei 1969 memutuskan bahwa PEPERA dan Pembangunan di Irian Barat harus disukseskan.

Sekretariat Kabinet No. 113 B

P E R N J A T A A N

KEBULATAN TEKAD DARI GERAKAN MERAH PUTIH ANAK TJABANG
DAERAH KPS SARMI IRIAN BARAT

11320

Kami Gerakan Merah Putih Anak Tjabang Daerah KPS Sarmi: MENOLAK PELAKSANAAN PENENTUAN PENDAPAT RAKJAT DI IRIAN BARAT karena:

1. Bahwa sesungguhnya Irian Barat adalah bagian yang mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya telah diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan kemerdekaannya meliputi seluruh Indonesia dari SABANG hingga MERAUKE.
2. Kami Gerakan Merah Putih Anak Tjabang Daerah KPS Sarmi menghendaki - sumpah pemuda Indonesia yang di-ikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang intinya menghendaki adanya Kesatuan Indonesia dari SABANG - hingga MERAUKE.

Kami Gerakan Merah Putih Anak Tjabang Daerah KPS Sarmi mohon: Diika Pemerintah memandang perlu mengadakan PENENTUAN PENDAPAT RAKJAT guna memenuhi "NEW YORK AGREEMENT", maka kami usul agar:

1. Supaja tidak mengganggu pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun yang sudah dimulai pada bulan April 1969, termasuk pembangunan di Daerah Irian - Barat.
2. Kami Gerakan Merah Putih Anak Tjabang Daerah KPS Sarmi mohon agar Penentuan Pendapat Rakjat dilaksanakan sebelum tanggal 17 Agustus 1969 - sehingga peringatan hari Proklamasi yang ke XXIV dilakukan dalam suasana pembangunan yang dapat mentjerminkan adanya kesatuan dan persatuan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari SABANG hingga MERAUKE.
3. Kami Gerakan Merah Putih Anak Rjabang Daerah KPS Sarmi senantiasa siap sedia dibelakang Pemerintah untuk mensukseskan semua usaha Pemerintah, terutama dibidang keamanan dan Pembangunan.

Demikianlah pernyataan dari kami GERAKAN MERAH PUTIH ANAK TJABANG DAERAH KPS SARMI di SARMI IRIAN BARAT.

Sarmi, 7 April 1969

A.N. GERAKAN MERAH PUTIH ANAK TJABANG
DAERAH KPS SARMI.-

Ketua, I



Jozef Lodowik Saumen

Penulis.



Menase Simen Wamea

Pernyataan Gerakan Merah Putih anak cabang daerah KPS Sarmi, Irian Barat, 7 April 1969, yang menyatakan bahwa PEPERA tidak diperlukan, sebab pada kenyataannya Irian Barat adalah bagian dari RI. Seluruh anggota gerakan ini juga menyatakan bahwa mereka ada di belakang pemerintah RI dalam membangun Irian Barat.

Sekretariat Kabinet No. 113 A



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

16 DJL 1969
Kepada 15174

Jth. Bapak Presiden
Republik Indonesia

di

D J A K A R T A . -

No. I.E. 1/2/48.- Tanggal: 15 Djuli 1969.- Lampiran: --

Perihal: Laporan-laporan Saudara Menteri Dalam
Negeri dari Merauke.-

Disampaikan dengan hormat kepada Bapak, laporan-laporan
Saudara Menteri Dalam Negeri sebagai berikut:

- I. NR : NOTA KILAT/69 ttk
- A. TGL 0714 PEPERA TELAH DILAKSANAKAN DG SUKSES SETJARA AKLIWASI
DI MERAUKE TTK
 - B. PD DJAM 12.37 SIDANG TELAH MENGAMBIL KEPUTUSAN BULAT SBB: ATAS
NAMA RAKJAT KABUPATEN MERAUKE MENJATAKAN DG SUARA BULAT DAN
SEMANGAT PERSATUAN BAHWA:
 - 1. IRIAN BARAT MERUPAKAN BAGIAN MUTLAK WILAJAH REPUBLIK
INDONESIA TTK
 - 2. TIDAK MAU DIPISAHKAN DARI NEGARA KESATUAN INDONESIA
DARI SABANG SAMPAI MERAUKE TTK
 - C. SEMANGAT ANGGOTAS DMP DAN MASSA RAKJAT MELUAP-LUAP
 - D. MOHON DOA RESTU AGAR DIDERAH LAIN DJUGA DITJARAI KEMENANGAN
JG SAMA TTK
UMP MENDAGRI KIRIM TTK (X)
- II. NR : T-005/IE/DIRIB/69 TGL 071469 MENURUT BERITA DARI WAAS-1 KASDAM
17 DARI MERAUKE TELAH SIDANG DMP DI MERAUKE TELAH SELESAI TGL
14-7-69 DENGAN HASIL2 SSB:
- AA. DJUMLAH PEMBITJARA 20 ORANG SEMUA MENGHENDAKI PEMERINTAH R.I.TTK
 - BB. DENGAN SUARA BULAT SELURUH ANGGOTA DMP KAB. MERAUKE MENGHENDAKI
DAN MEMILIKI PEMERINTAH R.I. TTK MARWANTO STAF MENDAGRI KIRIM
TTK HABIS

Laporan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 1969 tentang pelaksanaan PEPERA tanggal 14 Juli di Merauke. Hasil PEPERA menyatakan bahwa rakyat Merauke menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia.

Sekretariat Kabinet No. 113 B

INDONESIAN YOUTH COORDINATION
OF THE JOINT SECRETARIAT OF THE FUNCTIONAL GROUPS
PRESIDIUM KORDINASI PEMUDA
SEKRETARIAT BERSAMA GOLONGAN KARYA PUSAT

ANGGOTA/ MEMBERS:

1. Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia (I.P.P.I.) Pantjasila.
2. Gerakan Siswa (GENSI) KOSGORO.
3. Pelopor Pemuda Progresif Indonesia (P.P.I.).
4. Gerakan Pemuda Sosialis (G.P.S.).
5. Musjawarah Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia (M.K.M.I.)
6. Himpunan Mahasiswa Islam (H.M.I.)
7. Pemuda Peladjar '45 (P.P.45)
8. Mahasiswa Demokrat Indonesia (M.D.I.)
9. Pemuda Demokrat Indonesia (P.D.I.)
10. Peladjar Demokrat Indonesia (PELDDI)
11. Peladjar Islam Indonesia (P.I.I.)
12. Persatuan Pemuda Ummat Islam (P.P.U.I.)
13. Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia (PELMASSI).
14. Gerakan Mahasiswa Sosialis (GENSOS).
15. Anelatan Muda Hindu Indonesia (A.M.H.I.)
16. Gerakan Mahasiswa (GEMA) KOSGORO.
17. Pelopor Peladjar Sosialis Indonesia (PELPAESI).
18. Musjawarah Peladjar Indonesia (M.P.I.).
19. Pemuda KOSGORO
20. PEMUDA M.K.G.R.
21. G.P. AMPERA.
22. PARRI
23. Gerakan Mahasiswa (GEMA) '45.
24. CORPS Pecer Tendean

Sekretariat Pusat : Djalan Taman Pedjambon 3D/20 Telp. 49735, 44201 Djakarta
Sekretariat Departemen: Djalan Menteng Raja 31 Pav. Djakarta

Nomor:

**STATEMEN PRESIDIUM KOORDINASI PEMUDA
SEKBER GOLKAR PUSAT MENGENAI PEPERA
DI IRIAN BARAT**

Presidium Koordinasi Pemuda Sekber Golkar menjambit gembira hasil2 keputusan Dewan Musjawarah PEPERA, Merauke jang dengan penuh rasa tanggung djawab telah memilih Republik Indonesia sebagai daerah jang tak terpisahkan dari Negara kesatuan tanpa menghilangkan hak-2 demokrasinja.

Terutama sekali kepada rekan2 Pemuda2 Irian Barat baik jang tergabung dalam Koordinasi Pemuda Sekber Golkar maupun tidak, jang masih tetap memegang teguh djiwa semangat "Sumpah Pemuda" 28 Oktober 1928 jang ber-Negara satu, ber-Bangsa satu dan ber-Bahasa satu jaitu Indonesia.

Presidium Koordinasi Pemuda Sekber Golkar atas nama rekan-2 Pemuda2 jang tergabung dalam Koordinasi Pemuda Sekber Golkar di - Daerah-2 lain wilajah Irian Barat Republik Indonesia mengutjapkan selamat.

Achirnja tak lupa kami memandjatkan doa agar kabupaten2 lainnja djuga mengambil keputusan jang serupa.

Djakarta, 17 Djuli 1969

PRESIDIUM KOORDINASI PEMUDA
SEKRETARIAT BERSAMA GOLONGAN KARYA PUSAT
Wk. Sekretaris Umum,
GOLONGAN KARYA
PUSAT
MANGARAS NAYBORHU

Ketua Periodik,
HOEKINO

(Chandra.M.)
Ketua Presidium.

Pada tanggal 17 Juli 1969 Presidium Kordinasi Pemuda-Sekretariat Bersama Golongan Karya Pusat mengeluarkan pernyataan bahwa mereka memberikan dukungan kepada Dewan PEPERA Merauke yang telah memilih Irian Barat sebagai daerah yang tidak terpisahkan dari NKRI.

Sekretariat Kabinet No. 113 B



"spj"

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

File 3

Kepada
Bapak PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
di
D J A K A R T A.

Nomor : IB 1/3/46.- Tanggal : 24 Djuli 1969.- Lampiran :
Perihal: Hasil PEPERA di Fak-fak.-

Sebagai penegasan hasil PEPERA seperti jang telah kami tilpunkan kepada Saudara Sekretaris Kabinet pada hari Rabu tanggal 23 Djuli 1969 pk 12.20 W.I.B. untuk disampaikan kepada Bapak bahwa pelaksanaan PEPERA pada hari itu di Fak-fak merupakan sukses, bersama ini disampaikan dengan hormat kedua kawat jang diterima pada hari Rabu siang dan Rabu malam, jang isinja sebagai berikut :

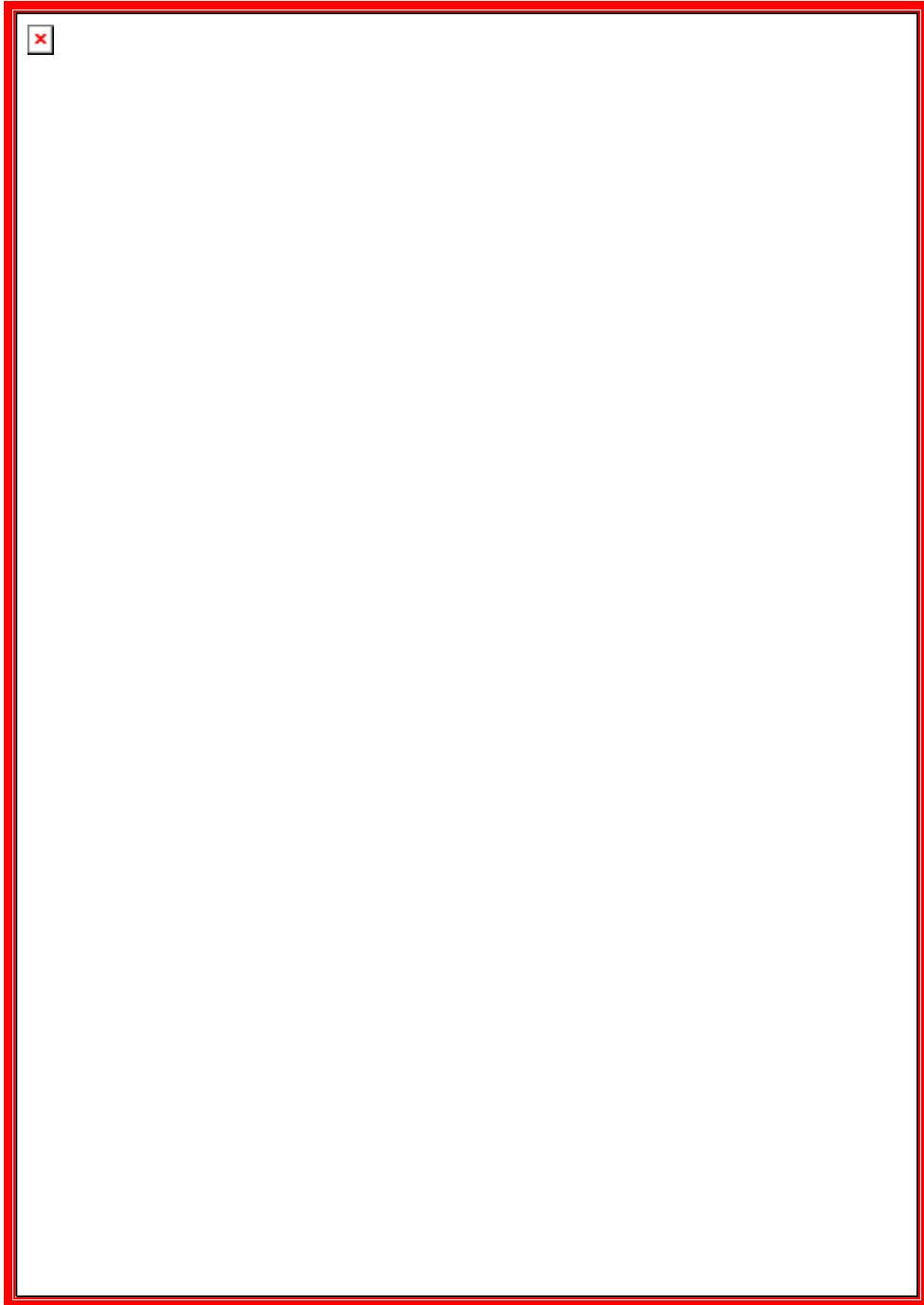
I. no. nil ttk

- aa: tgl 0723 djam 1235 sidang musjawarah pepera kab fakfak dgn suara bulat dan semangat persatuan jang jeng bernjala2 tll memutuskan ebb:
atas nama seluruh rakjat kab fakfak dgn suara bulat dan semangat persatuan menjatakan bhw:
1. irian barat merupakan bagian mutlak wilajah republik indonesia.
2. tidak mau dipisahkan dari negara kesatuan republik indonesia, jg berwilajah dari sabang sampai merauke.
3. bertekad untuk menghantjurkan siapapun kalau masih ada jang mau memisahkan irian barat dari indonesia.
- bb: sidang berdjalan dengan tertib kma lantjar dan semangat bernjala2.
- cc: mohon doa restu untuk kemenangan selandjutnja.
mendagri krm (x)

- II. 1. TEPAT PD TGL 23/7 DJM 0900 SIDANG DMP DI FAKFAK DIBUKA DGN POKOK ATJARA JG SAMA DGN KABUPATEN2 LAIN.
2. DJUMLAH PEMBITJARA 17 ORANG DGN SEMUA MENGATAKAN TETAP PADA R.I. BEBERAPA PEMBITJARA DAN TERUTAMA JG TERACHIR TELAH BERHASIL MENGADJAK SIDANG DALAM SUASANA JG PENUH DGN SEMANGAT KEBULATAN TEKAD TETAP DALAM KESATUAN NEGARA R.I.
3. DIANTARANJA MEMANG ADA PEMBITJARA JANG TIDAK DJELAS PENDIRIANNJA TETAPI KESIMPULAN JG DIRATJAKAN OLEH KETUA ACHIRNJA DI SETUDJUI SETJARA BULAT.

Laporan Departemen Dalam Negeri tanggal 24 Juli 1969 tentang pelaksanaan PEPERA di Kabupaten Fak-Fak. Rakyat Fak-Fak memutuskan, melalui PEPERA tersebut, untuk bergabung dengan Indonesia.

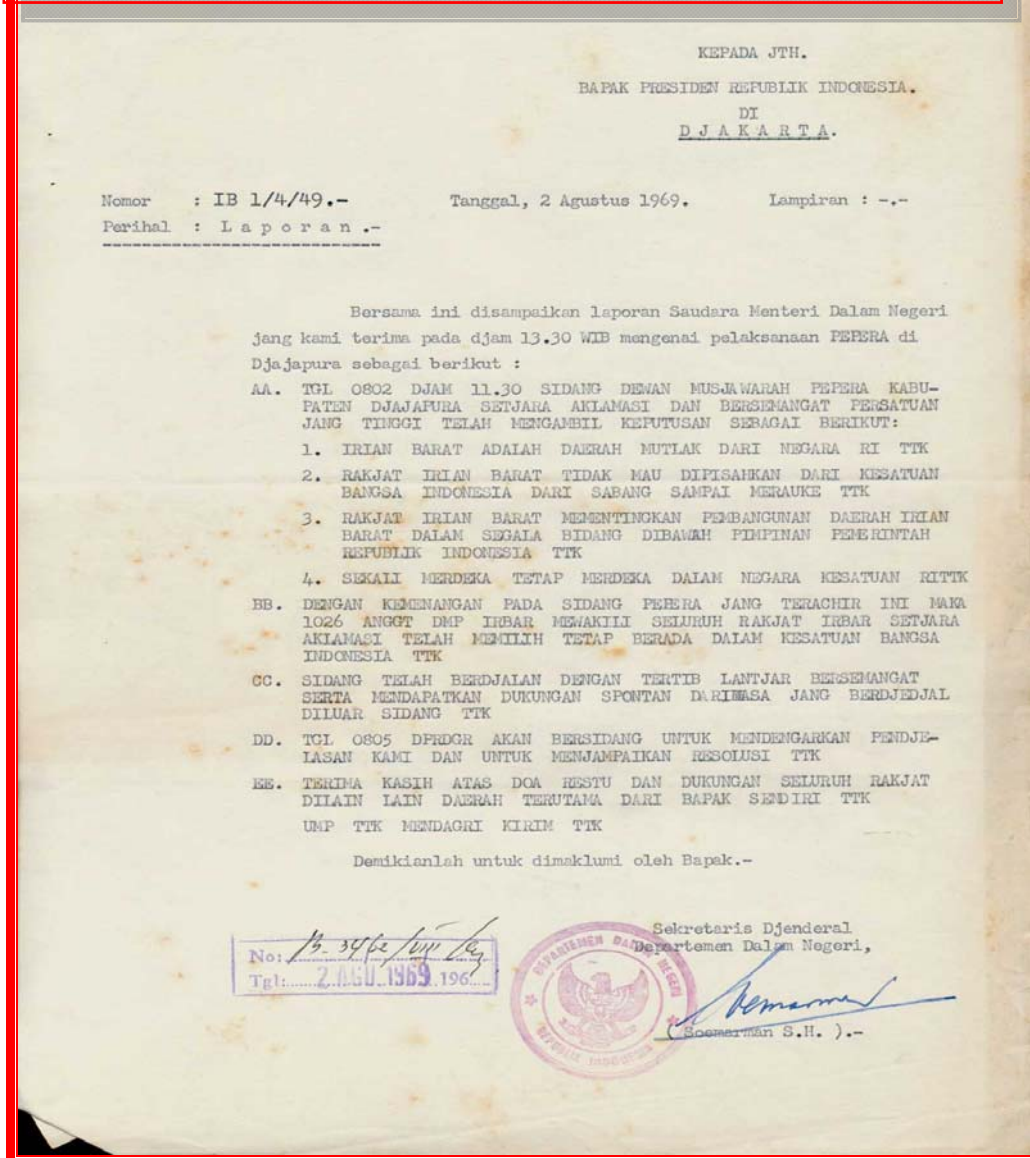
Sekretariat Kabinet No. 113 B



Laporan Departemen Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1969 tentang pelaksanaan PEPERA di Sorong. Hasil sidang musyawarah PEPERA Sorong memutuskan bahwa rakyat Sorong adalah bagian dari Republik Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 B

Laporan pelaksanaan PEPERA di Manokwari tanggal 29 Juli 1969. Melalui PEPERA tersebut rakyat Manokwari memutuskan untuk tetap berada dalam Negara RI.

Sekretariat Kabinet No. 113 B



Laporan Menteri Dalam Negeri RI mengenai pelaksanaan PEPERA di Kabupaten Jayapura pada tanggal 2 Agustus 1969. Sebagian rakyat Jayapura memilih untuk tetap bergabung dengan RI.

Sekretariat Kabinet No. 113 A

ARSI P.
Simpang

KEHADAPAN YTH.
BAPAK PRESIDEN DAN BAPAK WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
di - J A K A R T A.

Perihal: BIAYA TAMBAHAN UNTUK URUSAN PEMAKAMAN JENAZAH ALMARHUM: SDR. SILAS PAPARE TOKOH PERINTIS PERJUANGAN PENGEMBALIAN IRIAN JAYA KEPANGKUAN IBUPERTIWI

Jakarta, 7 Maret 1979

Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Yang kami hormati,

Perkenankanlah kami: KAWAN-KAWAN-SETIA-SEPERJUANGAN almarhum Sdr. SILAS PAPARE, a.n. seluruh Rakyat Irian Jaya serta a.n. Keluarga Almarhum Sdr. Silas Papare dan a.n. P R I B A D I almarhum Sdr. Silas Papare, datang kehadapan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kami sangat hormati dan hargaai arnya dengan rendah hati mempersembahkan masalah BIAYA TAMBAHAN untuk pengantaran jenazah almarhum: Sdr. SILAS PAPARE, Tokoh Perintis Perjuangan Pembebasan dan Pengembalian Irian Jaya kepangkuan Ibupertivi, dengan memohon kurnanya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden berkenan mempertimbangkan BIAYA TAMBAHAN sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah) untuk memungkinkn kami yang bertanda tangan dibawah ini guna turut mengantar Jenazah Almarhum Sdr. Silas Papare ketempat pemakamannya yang terakhir di-Irian Jaya untuk menunjukkan penghormatan dan penghargaan kesolidaritan kami terhadap almarhum Sdr. Silas Papare pada saat terakhir dalam hidupnya.

Biaya tambahan sebesar tersebut dimaksudkan untuk membiaya ongkos-perjalanan mengantar Jenazah Almarhum Sdr. Silas Papare dari kami yang bertanda-tangan dibawah ini sebagai Kawan-Setia-Seperjuangan Pembebasan dan Pengembalian Irian Jaya Kepangkuan Ibupertivi untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kami kepada Almarhum Sdr. Silas Papare, mengingat jasa-jasanya yang mulia dan agung baik terhadap kami pribadi selama masa perjuangan maupun terhadap Nusa dan Bangsa dalam merintis dan mengkoordinir Perjuangan Rakyat Irian Jaya untuk membebaskan Irian Jaya dari tangan dan rantai penjajahan Sikelonial, Belanda dan mengembalikannya kealas-kekerdekaan didalam Pngkuan Ibupartivi, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Untuk Pesawat Terbang: GARUDA P.F. orang: 10 X Rp 350.000,-	Rp 3.500.000,-
2. Biaya lain-lainnya	Rp 500.000,-
Jumlah seluruhnya	Rp 4.000.000,-

Sedangkan biaya-biaya lainnya akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Biaya pengurusan Jenazah Almarhum Sdr. Silas Papare selama disemayamkan di-Jakarta;
2. Biaya pengiriman dan pengantaran Jenazah Almarhum Sdr. Silas Papare dengan Pesawat terbang: Garuda dari Jakarta-Biak-Serui, Irian Jaya;
3. Biaya Tiket Pesawat untuk 6 (enam) orang Keluarga-Terdekat Sdr. Almarhum Silas Papare.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami dengan hati yang tulus-ichlas menyampaikan perasaan hati-sarubari kami sebagai Setia-Kawan-Seperjuangan kepada Pemerintah, Negara dan Bangsa melalui Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden bahwa nilai biaya-2 baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pemerintah Pusat untuk pengurusan pemakaman Jenazah Almarhum Sdr. Silas Papare TIDAK-MEMPUNYAI-ARTI-APA-2 dibandingkan dengan JASA-MULIA DAN JASA-AGUNG KEPADA NUSA DAN BANGSA dari Almarhum Sdr. Silas Papare sebagai TOKOH PEJUANG DAN PERINTIS PERJUANGAN RAKYAT IRIAN JAYA UNTUK MEMBEBASKAN IRIAN JAYA DAN MENGEMBALIKANNYA KEPANGKUAN IBUPERTIWI.

Kami: KAWAN-SETIA-SEPERJUANGAN sebagaimana telah dengan setia mendampingi dan berdiri dibelakang Almarhum Sdr. Silas Papare mulai dari PERMULAAN hingga DETIK TERAKHIR Perjuangan Pembebasan Irian Jaya dan Rakyatnya melalui THUKORA, pada kesempatan-perjalanannya Almarhum Sdr. Silas Papare YANG TERAKHIR menuju keakhirat, dengan setia ingin mengantarnya keliang kibur agar Almarhum Sdr. Silas-pun dari alam beka dapat melihatnya sendiri bahwa Sandara-2 Seperjuangannya sampai detik terakhir dalam hidupnyaupun masih tetap menghormati dan menghargainya dan menunjukkan kesolidaritan terhadapnya sebagai BAPA PERINTIS PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN JAYA DARI TANGAN

861 *878/WP/Wi/79*

Surat Kapten M.R. Waggai, tentang biaya pemakaman jenazah Silas Parere, tokoh perintis perjuangan pengembalian Irian Barat, 7 Maret 1979.
SETWAPRES Adam Malik no. 912

KEPENDUDUKAN

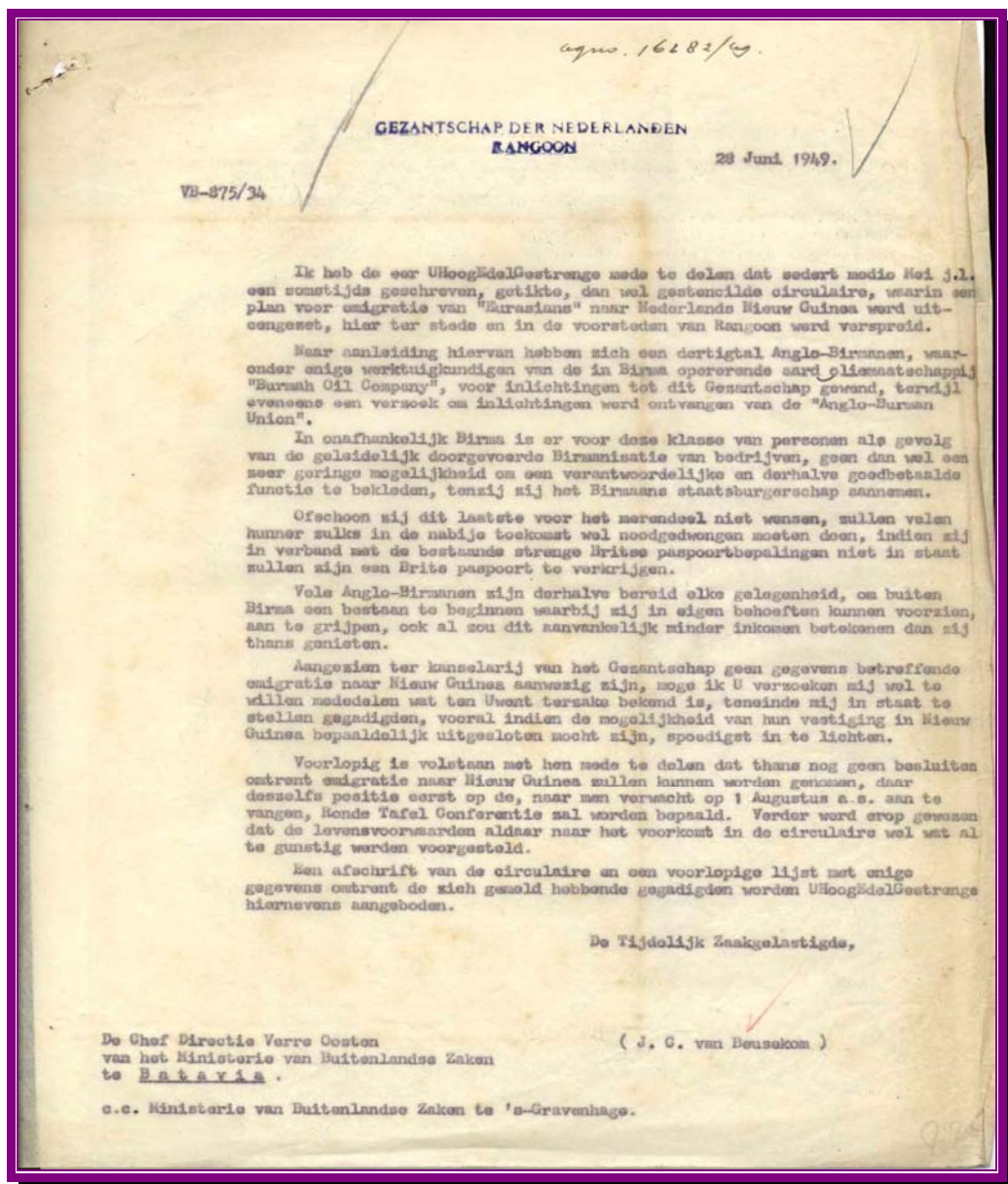
Bijlage St. 4.

Berigten omtrent de bevolking in de boeg
van Kaimani, op Nieuw-Guinea's Zuidwest Kust.

Opsoeken de hier ondervolgende medede-
lingen, bepaaldelyk in de boeg van Ka-
mani zijn ingewonnen, kan het daarbij
vermilt worden de zeden en gebruiken der
bewoners van die streken, worden be-
schouwd, als menendeels van koopzending
zijn, ook op de bevolkingen der Kamrae
baai van Raap Vanden Bosch tot Lan-
djong Amora medegaders op die der offul
mans baai hoe wil voor hen die zich
naby de stranden ophouden, als zij die
het gebirge bewonen, vermilt het niet de
ingewonnen berigten is gebleven, dat de
zeden en gewoonten der zogenaamde
Alfjoren of bergbewoners in deze streken,
weinig of niets verschillen van hen die
niet naby de stranden verblijven.

De Papoea's van Kaimani zijn
middelenmatig van gestalte doch over het
algemeen goed gespierd en krachtvol. De
kleur van hunne huid is donkerbruin,
het hoofthaar zwart, wettig en sterk ge-
kroesd. De meeste mannen hebben een
gelijksvoortigen baard als het hoofthaar
niet vrij kwars knivels en snijden deze,
even

Laporan tentang penduduk di Kaimani, pantai barat daya
Nieuw Guinea, 1858.
Ambon no. 1537



Surat dari Kementrian Luar Negeri-Direksi Urusan Timur Jauh
(*Ministerie van Buitenlandse Zaken – Directie Verre Oosten*)
kepada Sekretaris Negara (*Algemeene Secretarie*) tentang
rencana emigrasi orang-orang Eurasia ke Nederlands Nieuw
Guinea, 15 Juli 1949.

Algemeene Secretarie no. 1053

Salinan

Ten aanzien van uit Nieuw-Guinea vertrokken ambtenaren, werd in de gemengde Nieuw-Guinea-commissie, ingesteld ter Unieconferentie op 29 Maart 1950, de volgende overeenstemming bereikt:

1. In beginsel gaan, met inachtneming van het ondervolgende, alle uit Irian afkomstige overheidsdienaren naar Irian terug.
2. De landsdienaren worden geacht nog steeds in dienst van het Gouvernement Nieuw-Guinea te zijn en zullen alsnog in het genot van salaris plus toeslagen (Indonesisch courant op basis rayon Nieuw-Guinea) worden gesteld;
3. Uit de alsnog uit te keren inkomsten zullen de kosten van vee-ding, huisvesting enz. in Makassar en Amboen moeten worden bestreden, met dien verstande dat de zgn. 60 en 70 procent-regeling kan worden toegepast;
4. Men zal thans spoedigst dienen te worden afgevraagd of zij hun dienst in Nieuw-Guinea wenssen te hervatten.
 - a) In het bevestigend geval zullen zij in het algemeen indien en zodra huisvesting beschikbaar is, worden teruggevoerd en in afwachting daar van vol salaris blijven genieten. Desnodig zal hen voor heraan-schaf huisraad voorschot op bij overplaatsing gebruikelijke wijze worden verstrekt. Indien in incidentele gevallen terugkeer door het Gouvernement Nieuw-Guinea niet wordt gewenst om redenen van dienstbelang buiten schuld of toedoen van betrokkenen, zal afvloeiing gechieden op basis van bij de R.T.C. over-eenkomst behorende bijzondere afvloeiingsregeling.
 - b) In het ontkennend geval zullen zij geacht worden m.i.v. 30 April a.s. eervol op verzoek uit 's Lands dienst te zijn ontslagen.
5. De landschapsambtenaren moeten worden geacht uit de land-schapsdienst te zijn ontslagen. Behalve het reeds uitbetaalde salaris tot en met de maand Januari zal hun een onderstand worden toegekend tot en met ultimo April ad 40% van het laatst-genoten inkomen, waaruit eveneens kosten van opvoeding en huisvesting dienen te worden bestreden.
6. Aan landschapsdienaren ware eveneens spoedigst te vragen of zij bereid zijn in dienst van het Gouvernement Nieuw-Guinea te treden.
 - a) In bevestigend geval zullen zij in het algemeen indien en zodra huisvesting aanwezig is, zoveel mogelijk in tevoren door hen beklede of gelijkstandige functies worden geplaatst c.q. in afwachting daarvan m.i.v. 1 Mei in het genot van het laatstgenoten salaris worden gesteld. Ook aan hen zal zonedig op gebruikelijke voet voorschot voor huisraad enz. worden verstrekt. Wanneer het Gouverne-ment van Nieuw-Guinea in incidentele gevallen terugkeer niet wenst om redenen van dienstbelang buiten schuld of toedoen van betrokkenen, moeten deze beschouwd worden als om bij de dienst gelegen redenen ontslagen te zijn uit de landschapsdienst. Hoewel voor deze categorie geen afvloeiingsvoorwaarden bestaan, kan geval voor geval worden overwogen of uit een oogpunt van redelijkheid, b.v. in geval van reeds lang-durige dienst nog een zekere onderstand dient te worden verleend.
 - b) In het ontkennend geval zal na 30 April geen onderstand meer worden uitgekeerd.

7. Aan

Kesepakatan dari Komisi Gabungan Nieuw-Guinea mengenai pengembalian para pegawai pemerintah yang berasal dari Irian, 29 Maret 1950.

Delegasi Indonesia no. 1507

Open brief aan de Voorlopige
Federale Regering van
Ir. F.E. Eyken nopens
transmigratie naar Nieuw-
Guinea.

→ Artillerie

4471
Bij zijn met een bijlage hiernevensgaand, tot
de Voorlopige Federale Regering gericht begeleidend
schrijven van 30 Maart j.l., heeft de reserve-kapitein
der Infanterie, Ir. F.E. Eyken, aangeboden:

- a. een open brief (in 20-voud), gedagtekend 28 Januari
1948, gericht aan de voormalige Voorlopige Federale
Raad;
- b. een open brief (in enkelvoud), gedagtekend 28 Maart
1948, gericht aan de Voorlopige Federale Regering.

De brief sub a. heeft - te cut a long story
short - voornamelijk het oog op de transmigratie van
Indische Nederlanders naar Nieuw-Guinea en de vestiging
van volksplantingen van die bevolkingsgroep aldaar. Het
kernpunt van betrokkene's betoog is gelegen in punt 20
juncto punt 43 van zijn brief, waarin hij de Voorlopige
Federale Raad suggereert adhaesie te betuigen aan de
verklaring van de Minister van Overzeese Gebiedsdelen,
afgelegd op 10 December 1946 in de Tweede Kamer, dat
aan Nieuw-Guinea een bijzondere status behoort te worden
toegekend ten behoeve van het stichten van Nederlandse
volksplantingen op dat eiland.

In punt 44 van zijn hierboven sub b. vermelde
brief draagt Ir. Eyken deze suggestie over aan de
Voorlopige Federale Regering. Daaromheen spint hij een
langdradig en weinig zakelijk betoog, bevattende critie
op het hier te lande tot dusverre gevoerde Regeringsbe-
leid, hetwelk adressant als ondemocratisch en intmide-
rend qualificeert, terwijl hij dit beleid tevens gebrek
aan verbeeldingskracht toeschrijft. Voorts maakt hij
- om een enkele greep te doen - propaganda voor een in-
tensieve toepassing hier te lande van de wetenschap voor
doelmatige arbeidsorganisatie, zomede instelling van
een organisatie-adviesdienst, een meer in detail treden-
de overheidspubliciteitsdienst en een goederenverkeer-
advies-dienst.

De slotparagrafen van Ir. Eyken's beschouwingen
bevatten een aanval op de rede van Pangeran Kartanegara,
gehouden bij de installatie van de Voorlopige Federale
Regering, in welke rede rekestrant twijfel meent te be-
speuren ten aanzien van de goede wil van de Nederlanders
hier te lande om de beslissingen van de Overheid te aan-
vaarden. Deze "uitdaging" wenst betrokkene als goed zoon
van het Nederlandse volk met een gerust hart te accepte-
ren.

Aan een en ander knoopt hij tenslotte nog vast
een advies om ook de voormannen der Verenigde Politieke
Partijen in te schakelen bij het overleg omtrent de
ontwikkeling van de Federatie.

Hoewel

Surat dari Ir. F.E Eyken kepada Pemerintah Federal Sementara
tentang transmigrasi ke Nieuw Guinea, 28 April 1974.

Algemeene Secretarie no. 1052

PENDIDIKAN



Perempuan Nieuw Guinea pada acara peresmian sekolah
di Wambi, 1923.

KIT no. 995/34

N^o 26
 delp
 p/

Tanah Tinggi 16 Oktober 1929.

Onderwerp: School Tanah Tinggi.

Ik heb de en tehoogedelgestreepte
 het ondervolgende bevelts mede te delen.
 Het was j.l. Vrijdag [4/10-1929]
 dat ik - na het interneringskamp te zijner
 rond gegaan - een wijle bezoek heb gebracht 1/2
 school te Tanah Tinggi. Ik trof alle onderwij-
 zers aan: Sardjona sll n. 8 en Kasmanji sll
 N. 46. En helft dus omstreeft plaats gehad
 1/2 onderwijzend personeel van Tanah Tinggi.
 De kinderen waren juist bezig
 een Hollandsch schoolles te zingen. Dat het
 Hollandsch 1/2 school als voortaal gebruikt
 wordt, bewijst, dat Sardjona tegen de kinderen
 Hollandsch spreekt.

Sardjona reide tegen me, dat
 de kinderen nog te jong zijn om te lezen. De
 meer gevorderde kinderen werden door Kasmanji
 1/2 aangrenzende kamer onderwezen. In die
 Klasse, waar Sardjona onderwijs gaf, waren 9
 kinderen, en in die, waar Kasmanji onderwezen
 was, 8 kinderen.

Dinsdag 15 dezer werd mijn
 aandacht getrokken door een grote praesent
 met een hoede vlak er voor en vol beladen met
 kinderen. Een andere praesent, eveneens vol
 beladen, vergezelden de gezegde praesent. Ik hoorde
 een onduidelijk gezang. De praesent voerden de
 kant item binnen. Na eenigen tijd kwamen
 de praesent weer uit de kant item 1/2 richting
 1/2 interneringskamp terug. Toen kongan de
 kinderen al harder en harder een Malakische
 deusety, waarvan ik slechts de woorden n. m.
 "Kobongji orang berangan, sangsara dengan
 pendjara" heb kunnen oprangen. Het zal

21

Van
 Het Hoofd van Staatelijk Bestuur
 te Tanah Merah

Surat Kepala Distrik Tanah Tinggi kepada Asisten Residen Tanah
 Merah tentang sekolah-sekolah di Tanah Merah,
 16 Oktober 1929.
 Boven Digoel no.311

Opzame
van leerlingen en Onderwijzers ign naturalisten
op Atjehi 2^e Kwartaal 1939.

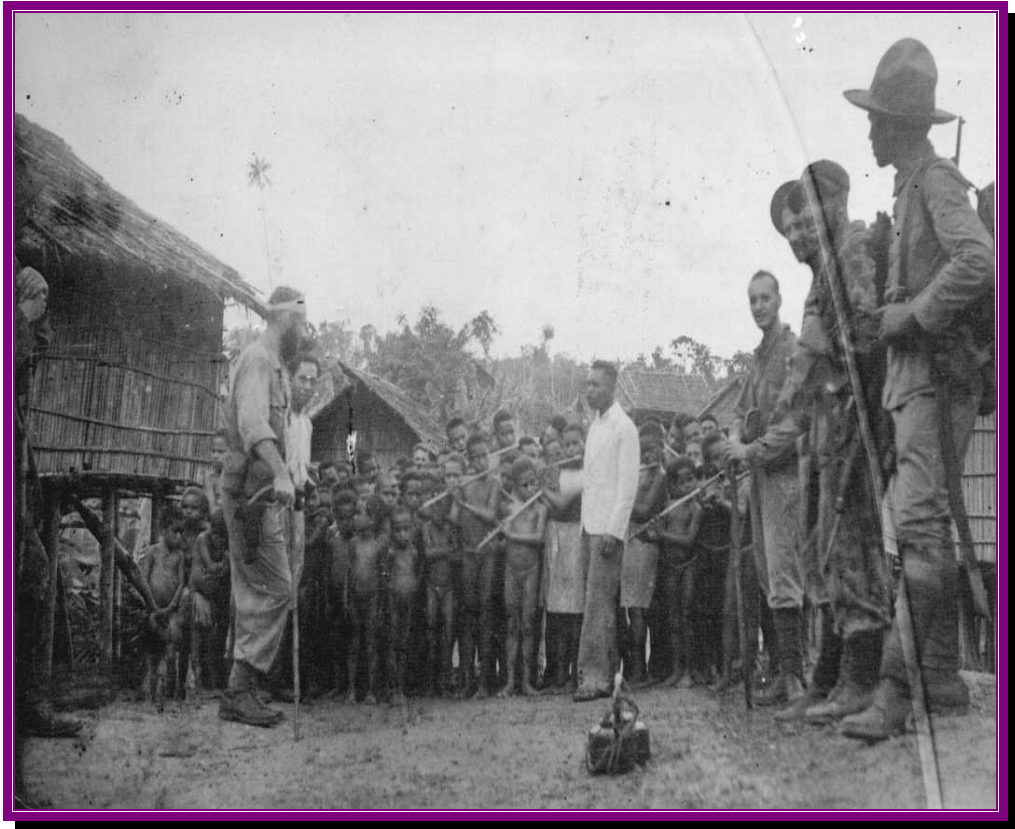
20

Volg. No.	Naam en st. van de Onderwijzer	By wie wordt het onderwijs gegeven	Naam geslacht en leeftijd van de leerlingen	Naam der ouders van de leerlingen	st. b.
Onder organisatie van P.P.					
1.	Djogedolhadia	Pouwarimata	Kasjuni v. Sedji "v. Kaelmad. "	Sjmoetarseno. Samingoni Kasoen Kasjid.	
2.	Koeljami	Chati Talana	Sapriah v. Kiljagich v.	Kasoen Kasjid. Pouwarimata.	
3.	Oeip. asman	Aekoromelso	Kaelogan v. Djoel Sjia v.	Sjmoetarseno. Djoelkasimo.	
4.	Zainvelabida	Zainvel Abidin	Kimari v. Kasimari v. Sih. natural v.	Samingoni Sjmoetarseno.	
Niet verbonden aan P.P.					
5.	Adamin	Hongoskarno.	Kerlingah v. Sudjati "v. Kedjati "v. Soeloevan "v. Soedarmo "v. Soewati "v. Kotuwis "v. Soetjo "v.	Hongoskarno. asngari. Kabatani.	
6.	Kawongkong	Koh. Amin.	Kamsjah v. Djoelji "v. Soetji "v. Soetjani "v. Soetjo "v. Soetji "v. Soetji "v.	Koh. Amin. Prawirodikusono	
7.	Pasiran	Pasiran	Soewari "v. Soeah "v.	Soehmad.	
8.	Chamin	Chamin	Kariman v. Kamsjah v.	H. Oemar.	
9.	Karjono	Karjono	Kajat "v.	Kasjoen.	
10.	Soetjosalikan	Soetjosalikan	Kelany "v. Kebany "v.	Soetjosalikan. Ka Soeganda.	
Standard school.					
aantal leerlingen					
1 ^o klasse	3 jongens	- meisjes = 2.			
2 ^o " "	2 " "	3 " "			
3 ^o " "	4 " "	4 " "			
4 ^o " "	6 " "	3 " "			
5 ^o " "	2 " "	3 " "			
1 ^o " "	8 " "	1 " "			
overklas	5 " "	5 " "			
	30 jongens	19 meisjes			

Daftar murid dan pengajar di Tanah Merah, 1939.
Boven Digoel no.317



Kegiatan belajar di sekolah, Enarotali, tt.
KIT no. 1001/73



Guru dan anak-anak sekolah di Tanah Merah,tt.
NIGIS no. 14-8/A6760

KESEHATAN



Juru kesehatan tradisional dari Nieuw Guinea Selatan, 1951.
KIT no. 998/38



Kapal Rumah Sakit "Temboeni" di Nieuw Guinea. 1953.
KIT no. 1032/73



FREEPORT INDONESIA, INCORPORATED • NUSANTARA BUILDING, JL. THAMRIN 59, JAKARTA
A SUBSIDIARY OF FREEPORT MINERALS COMPANY

MAILING ADDRESS
P.O. BOX 3148
JAKARTA — INDONESIA
TELEX : 44415
CABLE : FREEIND

TELEPHONES :
354621, 356111, 356211
356311, 356411, 356511
EXTENSIONS : 4380 - 4385

No.108/19C/79

Jakarta, 1 Februari 1979

Kepada Yang Terhormat
Bapak A. Alatas SH
Sekretaris Wakil Presiden RI
Jakarta

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan salinan surat kami kepada Bapak Wakil Presiden RI tertanggal 29 Januari 1979 No. 91/19C/79 dengan permohonan akan perhatian Bapak atas isi surat tersebut.

Kami sadar akan banyaknya persoalan yang dihadapi Bapak Wakil Presiden.

Namun demikian, kami harap sudilah kiranya Bapak mohon perhatian Bapak Wakil Presiden atas surat kami tersebut supaya beliau dapat mengetahui fakta yang benar mengenai perlakuan Freeport Indonesia (FI) terhadap penduduk asli sekitar Daerah Kerja FI.

Atas perhatian serta bantuan Bapak, kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,
Freeport Indonesia, Incorporated

Ali Budiardjo
Ali Budiardjo
President dan Director

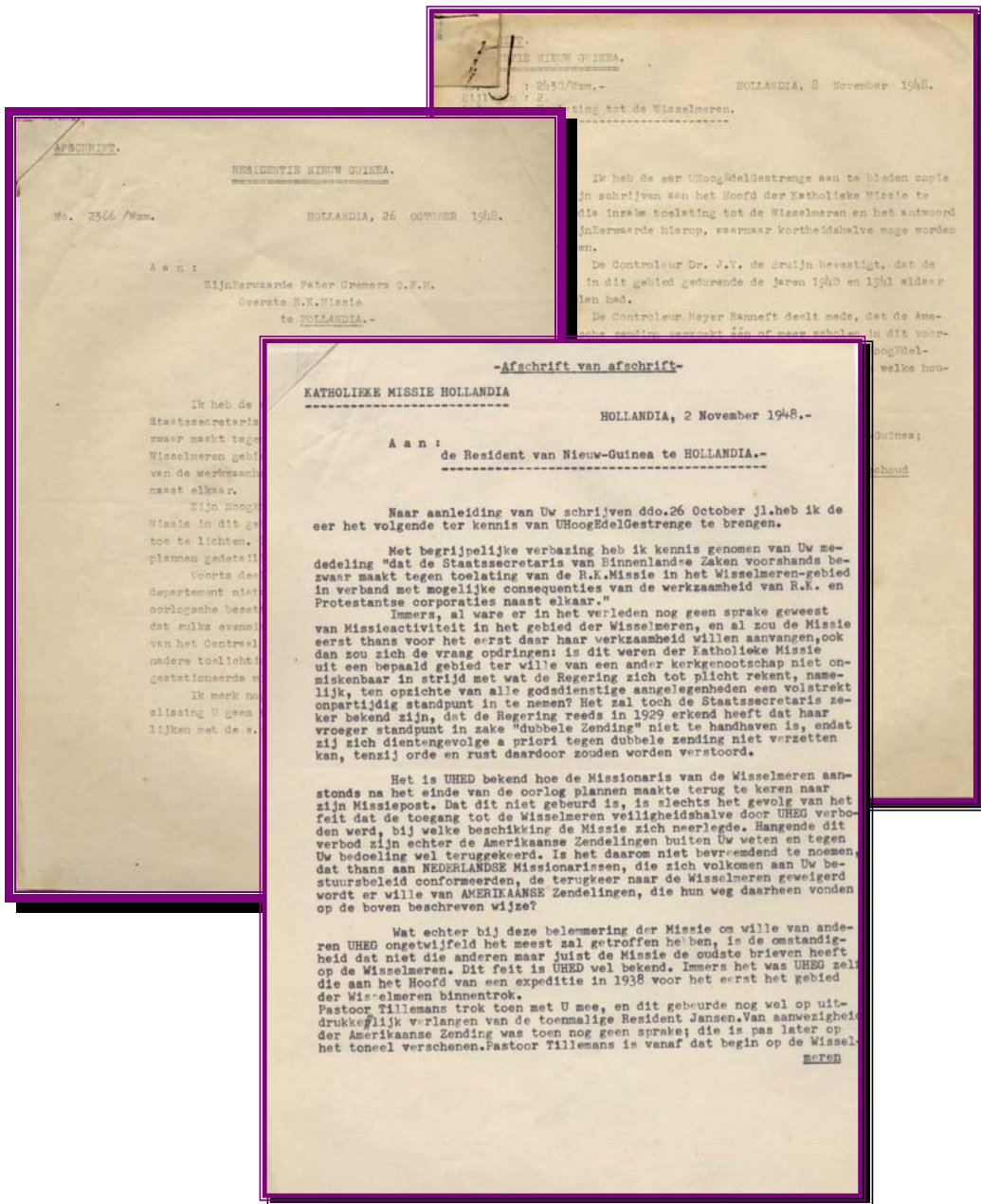
ABid

220/wfpm/79.

Surat Ali Budiardjo (Presiden Direktur PT. Freeport) tentang pelayanan kesehatan kepada penduduk asli sekitar daerah kerja Freeport Indonesia, 1 Februari-5 Maret 1979.

SETWAPRES Adam Malik no.797

KEAGAMAAN



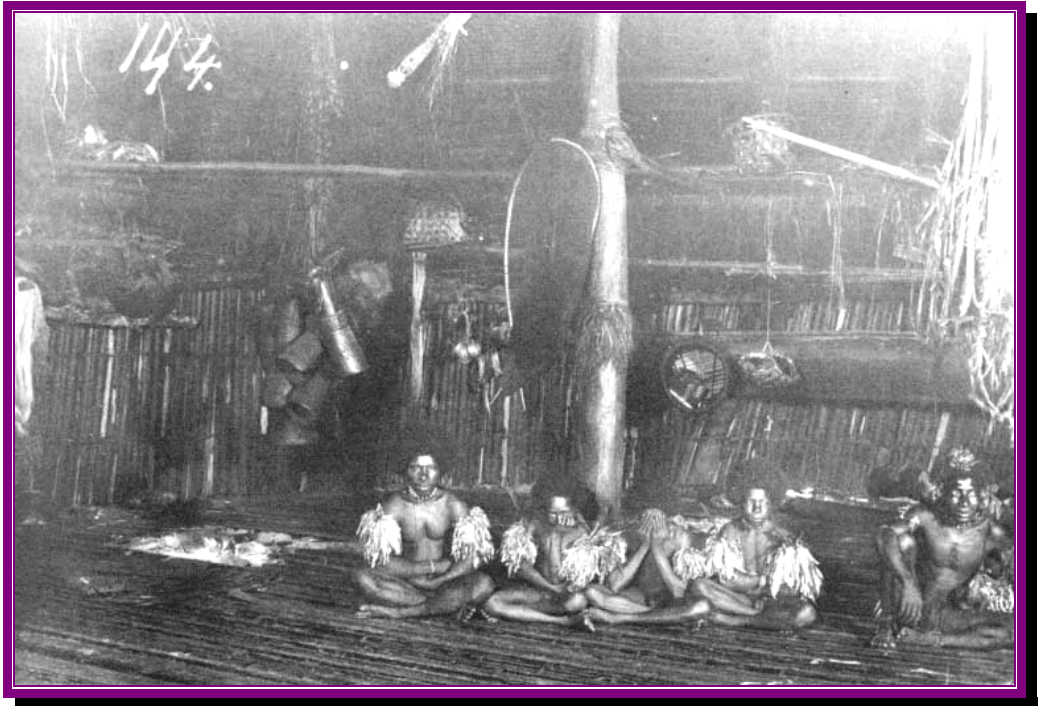
Surat dari Missie Katolik Hollandia kepada Residen Nieuw-Guinea mengenai larangan ijin bagi missi Katolik ke wilayah Wisselweren, 2 November 1948.

Algemeene Secretarie no. 748



Rumah dinas untuk pastur di Merauke, tt.
KIT no. 995/30

BANGUNAN



Rumah Papua dan pemuda Papua, 1903.
KIT no. 70/14



Rumah Panggung Papua, 1903.
KIT no. 70/22



Gedung Dewan Papua di Kotabaru yang belum selesai dibangun, 17 Oktober 1962.

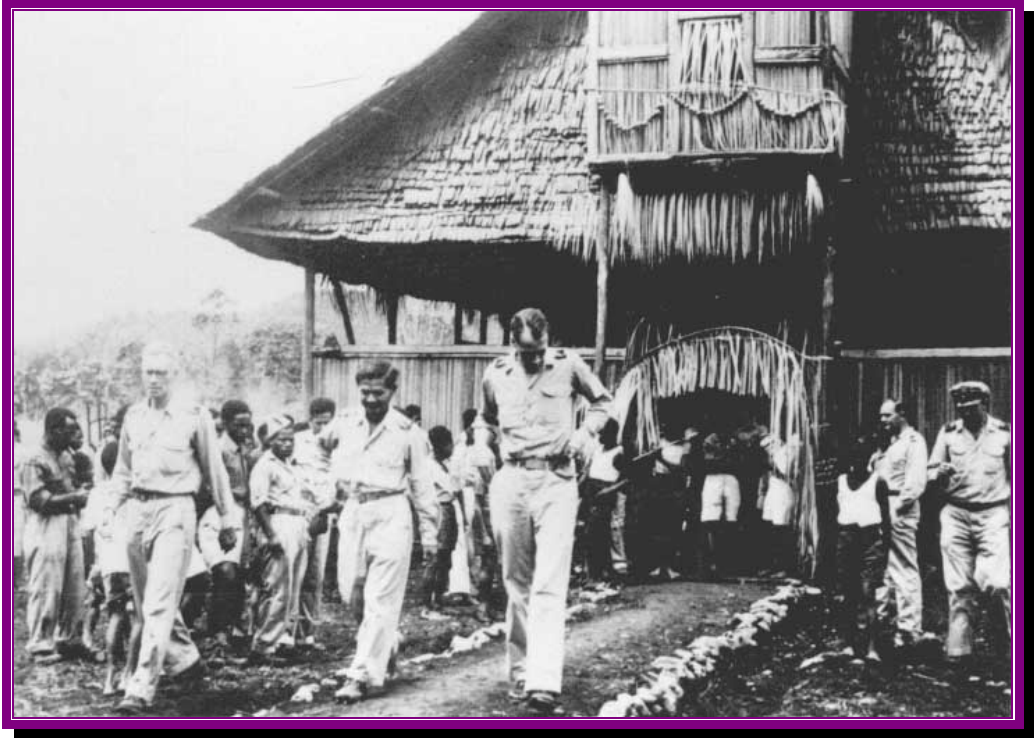
KEMPEN 62-9165



Stasiun radio di pengasingan Boven Digoel, tt.
KIT no.322/2



Jalan masuk kamp militer di Tanah Merah,tt.
KIT no.322/6



Pembukaan Gereja Portugis di Kota Nica,tt.
KIT no.335/20



Kantor pos di Merauke, tt.
KIT no. 1060/54



Rumah pejabat di Tanah Merah, Boven Digoel, tt.
KIT no. 1060/58



Rumah-rumah di pulau Saba dan Biak dibangun di atas air.
NIGIS no.14-16-20/A10711



Stasiun radio di Merauke.
NIGIS no. 14-5-269/L10-6-8

KEBUDAYAAN



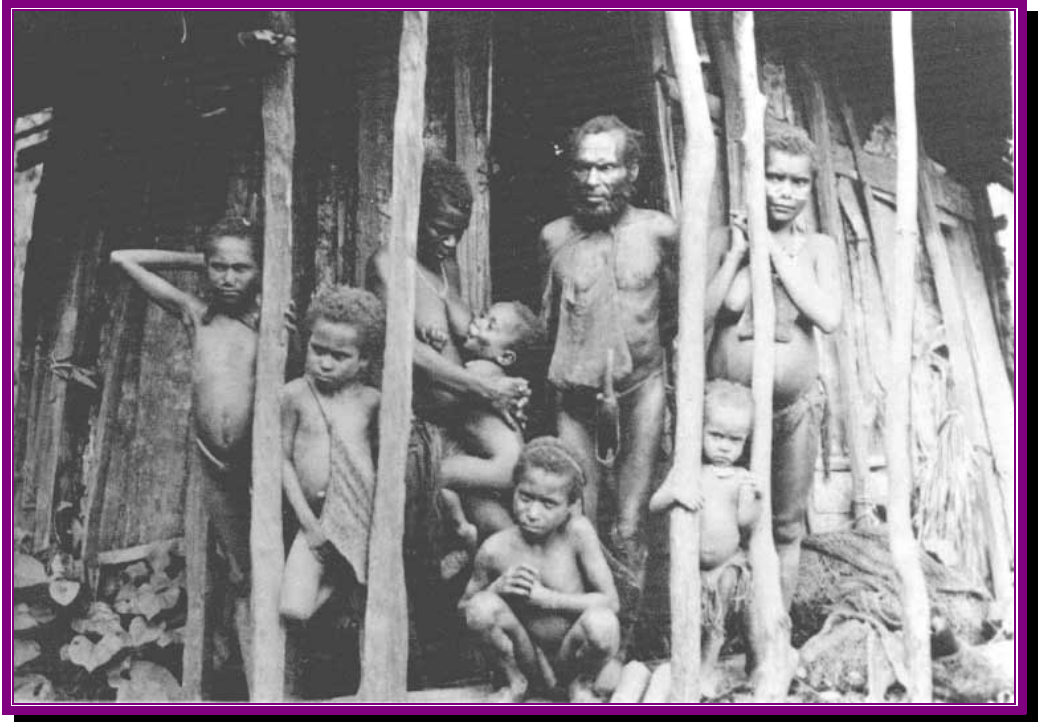
Pemuda Papua yang akan membakar kayu dengan menggunakan batu sebagai pematik. 1903.

KIT no.70/2



Pemuda Papua dengan alat panah tradisional, 1903.

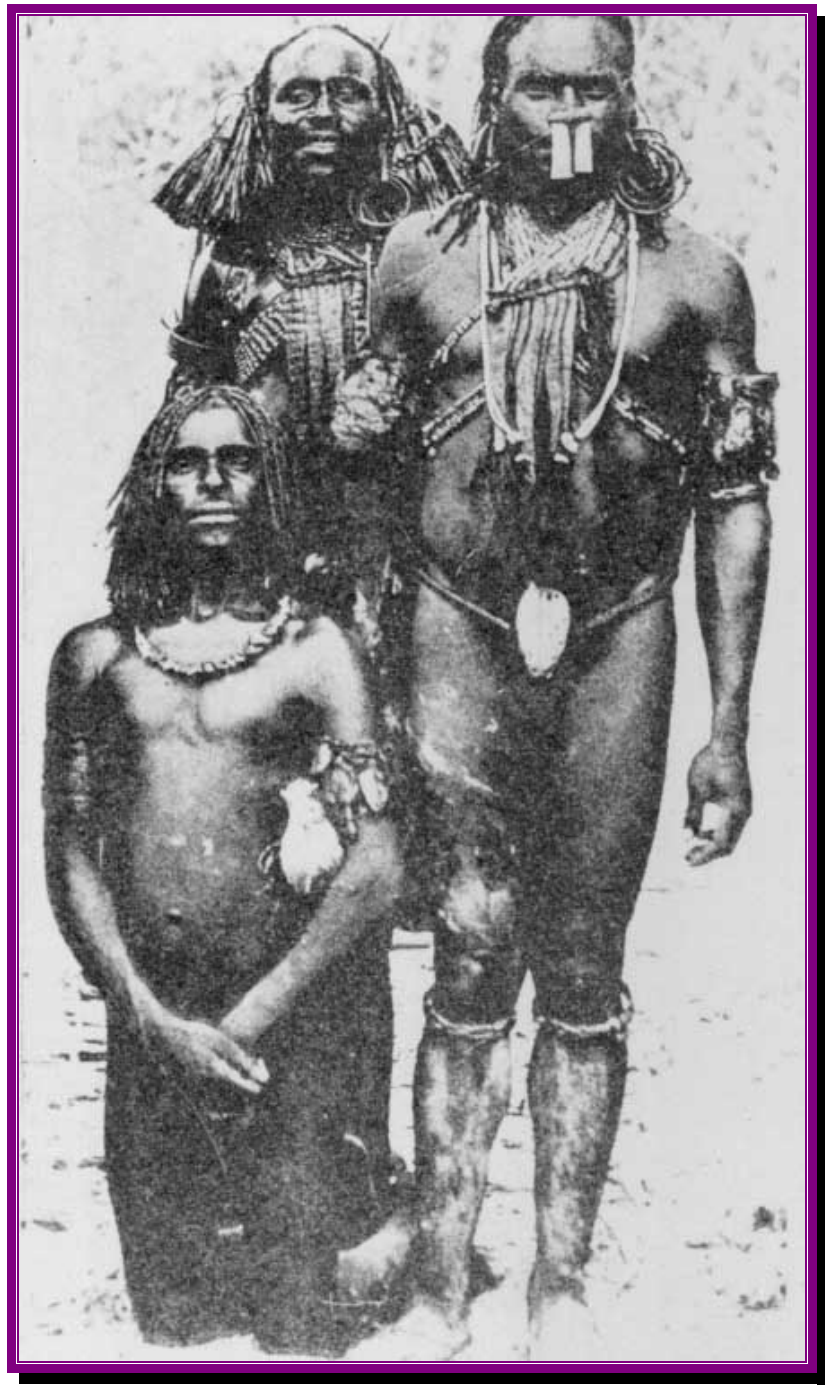
KIT no.77/50



Potret sebuah keluarga Papua di tahun 1905
KIT no. 71/28



Pakaian wanita Papua, 1907.
KIT no.70/4



Orang Papua dari bagian Selatan, 1926.

KIT no. 48/34



Tarian rakyat Waropen yang ditarikan di Hollandia,
Nieuw Guenia, 1955.
KIT no. 1010/73



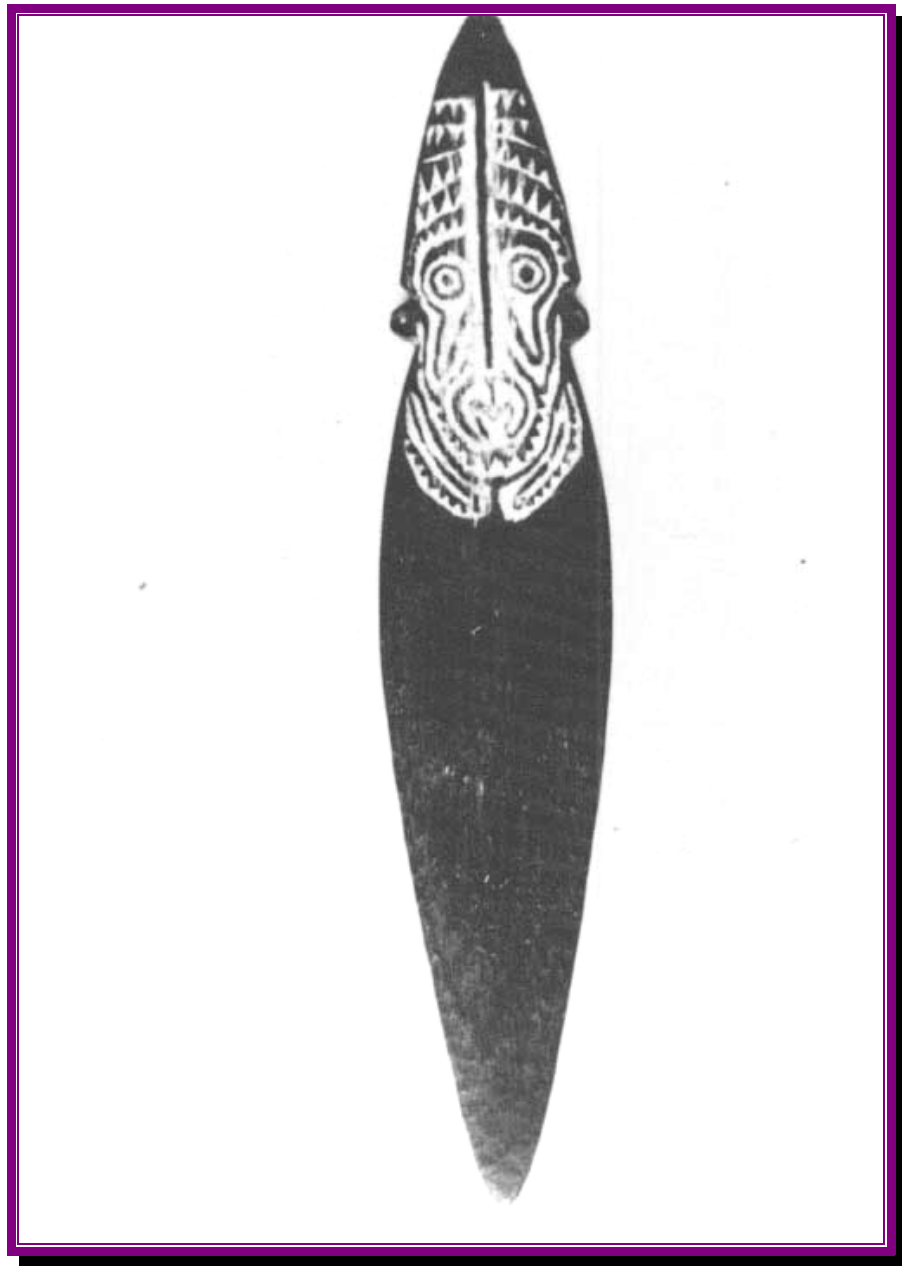
Ikan sepanjang 2 (dua) meter di Danau Sentani,
Desa Jaka Sentani, 1962.
KIT no. 1044/62



Pipa rokok dari pegunungan, tt.
KIT no.592/22



Pelaksanaan upacara pernikahan, tt.
KIT no. 996/18



Perisai orang Papua, tt .
KIT no. 996/22



Korps musik pada sebuah Sekolah Guru,tt.
KIT no. 996/78

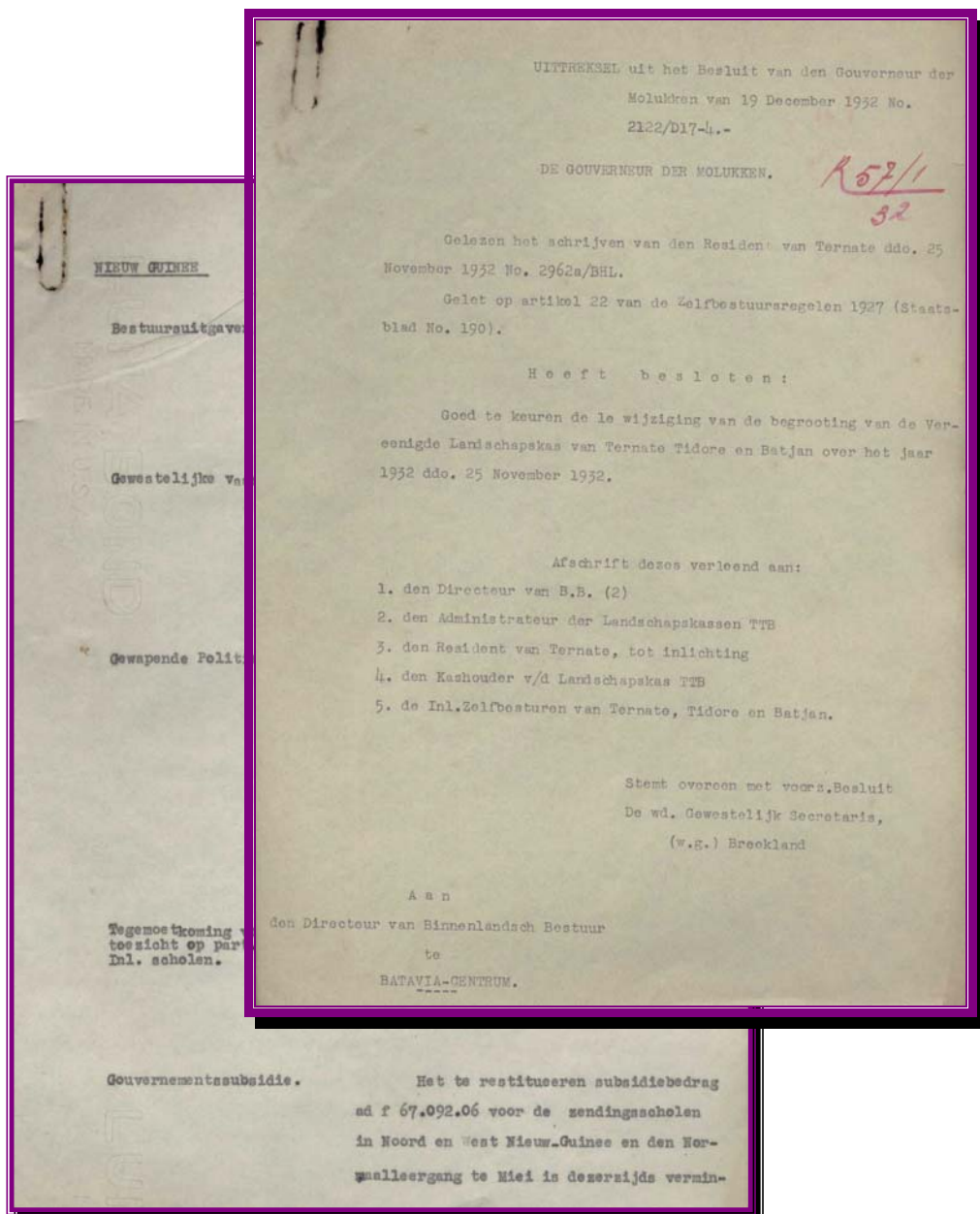


Wanita Papua dengan baju pengantin, tt.
KIT no. 1007/16



Lelaki Papua dengan tulang burung di antara hidungnya,tt.
KIT no. 1012/54

PEREKONOMIAN



Keputusan Gubernur Maluku mengenai perubahan anggaran dari wilayah kesatuan Ternate, Tidore, dan Batjan, dalam mana termasuk Nieuw-Guinea, 19 Desember 1932.

Binnenlandsbestuur no.1311



Gudang penyimpanan barang di Sorong, 1953.
KIT no. 1002/34

H. H. ARNOLD, JR.
485 LEXINGTON AVENUE
NEW YORK 17, N. Y.

October 11, 1961

H.E. Prof. Dr. Mohammed Yamin
Room 420
Plaza Hotel
Fifth Avenue and 59th Street
New York, New York

Dear Dr. Yamin:

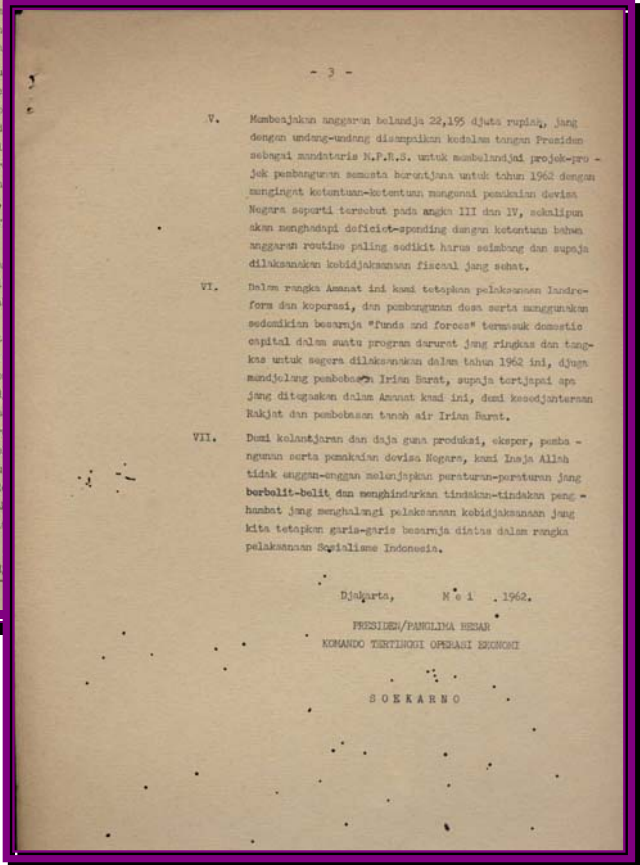
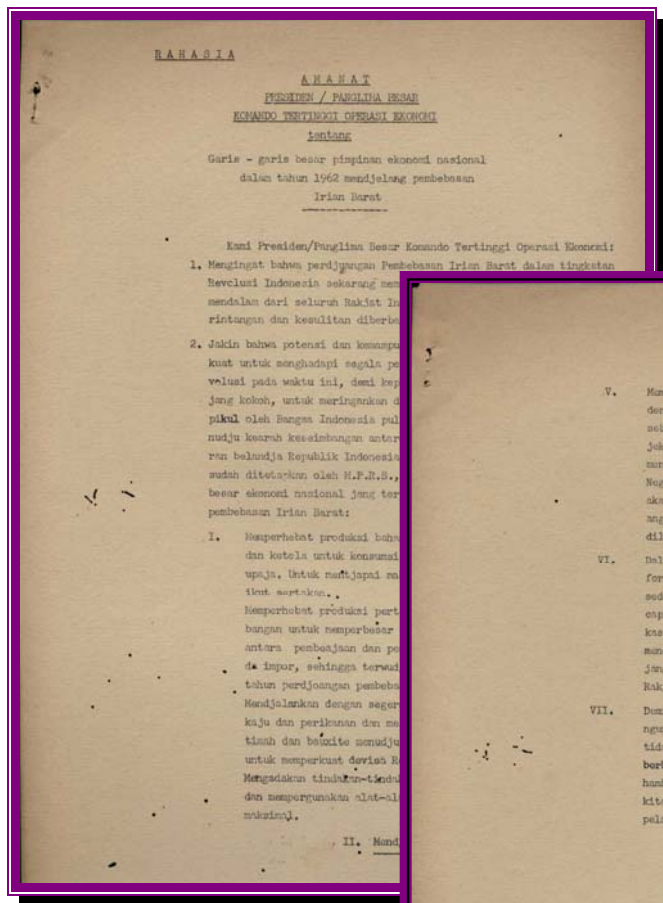
Enclosed herewith are the documents I mentioned to you this afternoon. They consist of (in chronological order):

- 1) Summary of Caltex Pacific's memorandum to the Indonesian Government, delivered to Minister Chaerul Saleh on 5 December 1960, and to Dr. Djuanda and Dr. Leimena on 9 December 1960.
- 2) Letter to Dr. Leimena from myself, dated 2 May 1960.
- 3) Caltex Pacific's draft Contract of Work and Implementing Agreement submitted to Minister Chaerul Saleh and Dr. Ibnu Sutowo on 19 July 1961.
- 4) Indonesian Government's Draft Regulation in Lieu of Law and Draft Contract of Work handed to Caltex Pacific on 22 August 1961.
- 5) Chart showing comparison of Caltex Pacific's 19 July 1961 drafts, Government's 22 August 1961 drafts, and Government's ultimatum of 27 August 1961 which suspended the discussions.

Surat dari H.H. Arnold, Jr. kepada M. Yamin tentang penyampaian kontrak kerja dan hasil pembicaraan dengan pemerintah Indonesia mengenai usaha pertambangan minyak Caltex,

11 Oktober 1961.

M. Yamin no.345.



Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tentang garis-garis besar pimpinan ekonomi nasional tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat, Mei 1962.
M. Yamin no.823.

FREEPORT

7 AUG 1974

23537 *8/74*

FREEPORT INDONESIA, INCORPORATED • NUSANTARA BUILDING, JL. THAMRIN 59, JAKARTA
A SUBSIDIARY OF FREEPORT MINERALS COMPANY

MAILING ADDRESS:
P.O. BOX 3148
JAKARTA - INDONESIA
TELEX: 4418
CABLE: FREEIND

TELEPHONES:
84821, 86111, 86211
58311, 58411, 58511
EXTENTIONS: 3200, 3201

No.884/10/74

Jakarta , 6 Agustus 1974

Kepada Yang Terhormat
Bapak Menteri/Sekretaris Negara
Jl. Veteran 17
Jakarta

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan salinan surat kami kepada
Bapak Menteri Pertambangan tertanggal hari ini No. 882/10/74.

Besar harapan kami Bapak sudilah kiranya memberi
perhatian Bapak atas apa yang kami utarakan dalam surat
kami tersebut mengenai pembangunan masyarakat sekitar
daerah pertambangan Freeport Indonesia (FI).

Atas segera perhatian dan bantuan Bapak, kami
ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Freeport Indonesia, Incorporated

Ali Budiardjo
Ali Budiardjo
President dan Director

ABid

Surat dari pimpinan PT Freeport tentang pembangunan
masyarakat sekitar daerah penambangan, 6 Agustus 1974.

Asisten SEKNEG Urusan Khusus (ASSUS) no.130.

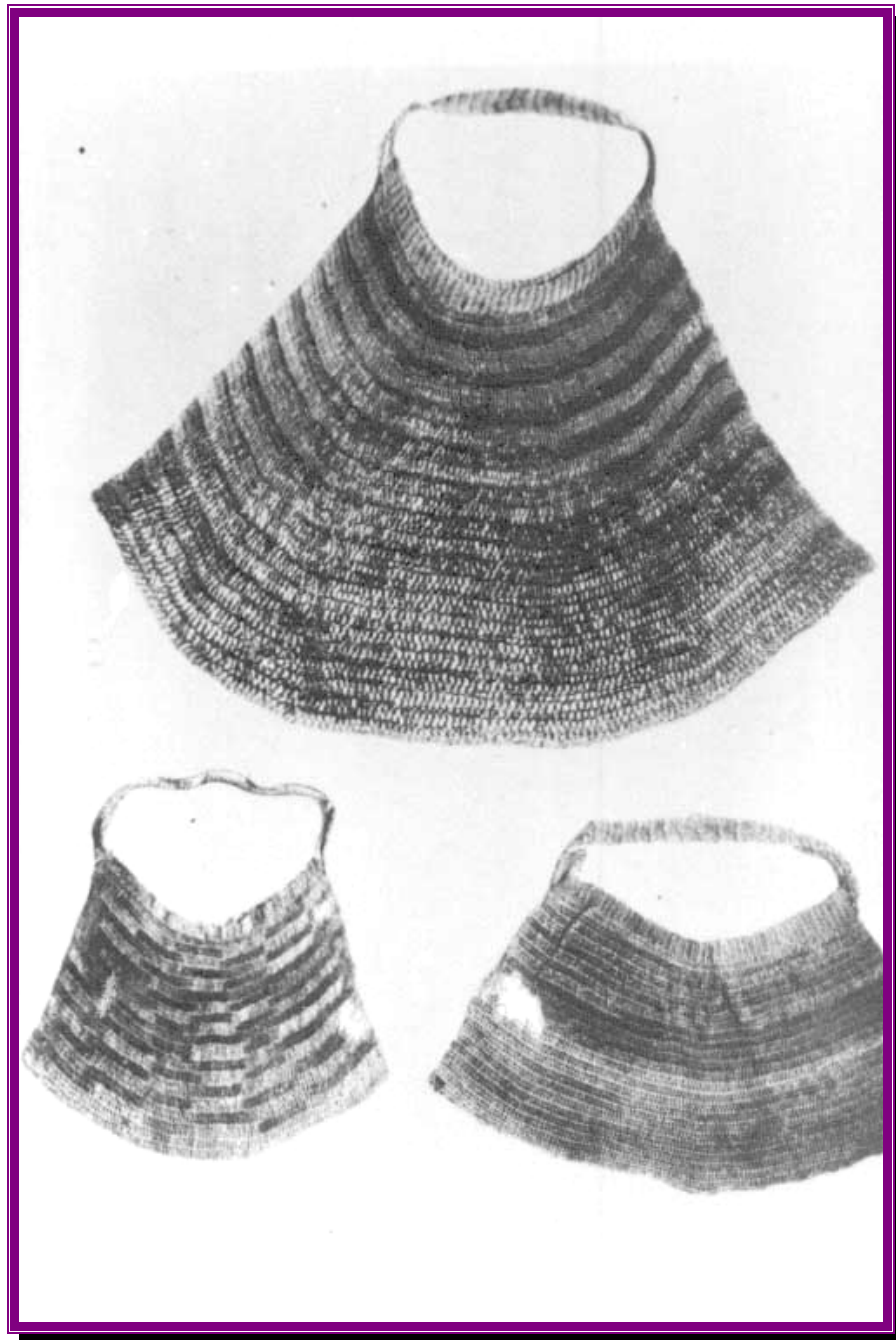


Pusat minyak *Noord Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij*
di Sorong, tt.
KIT no. 1060/48



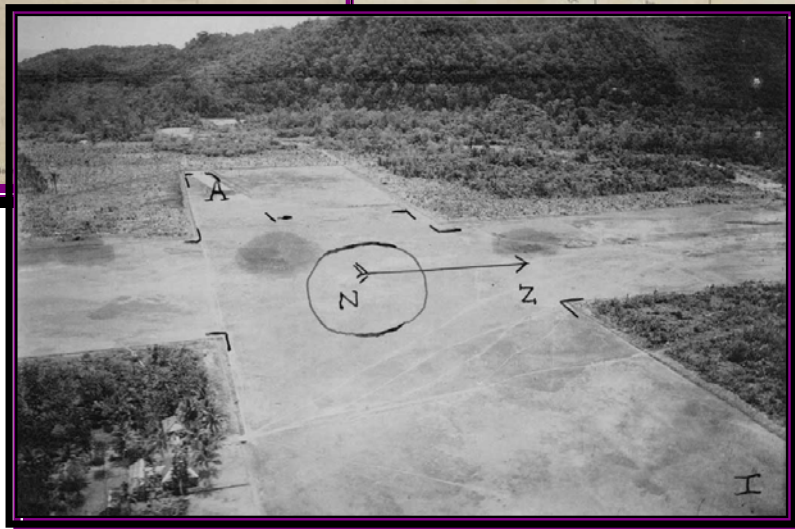
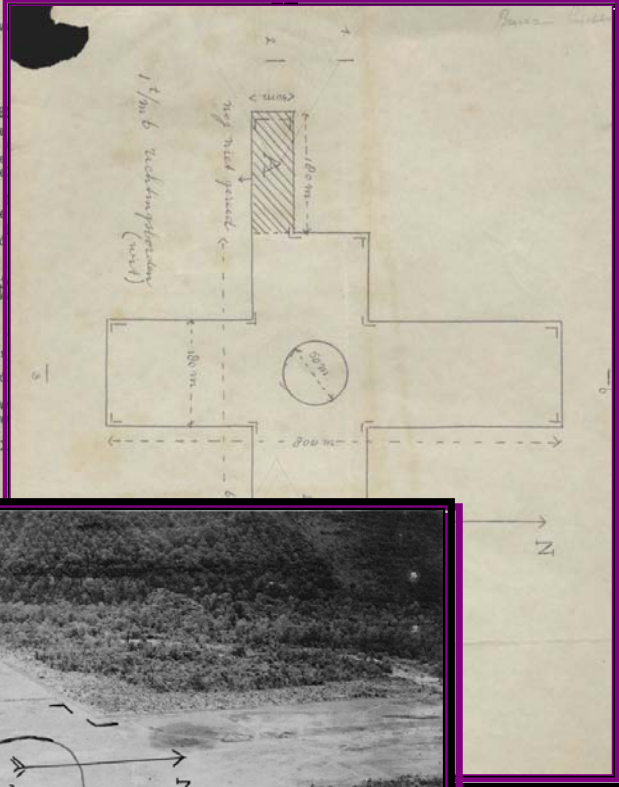
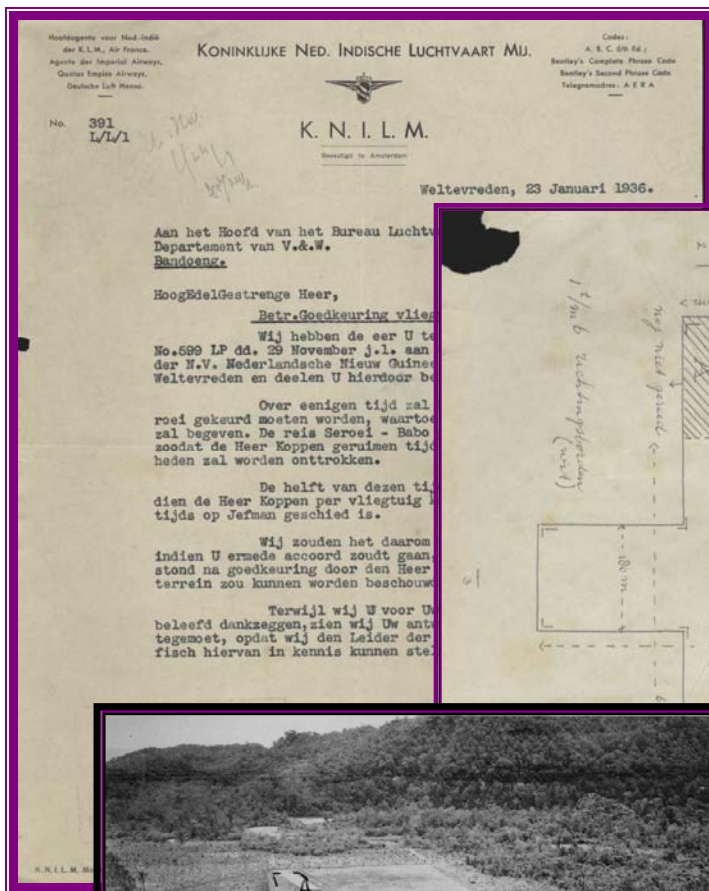
Lelaki Papua menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tradisional,tt.

KIT no. 1043/18



Tas tradisional wanita Papua, tt.
KIT no.1058/32

TRANSPORTASI



Persetujuan pembangunan landasan pesawat terbang di Serui beserta skets dan foto, 28 Januari 1936.
BOW no. 72.



Penduduk gotong-royong membangun jalan baru
di Nimboran, 1951.

KIT no. 1031/18



Kedatangan Dakota di lapangan terbang Kaimana, 1957.
KIT no. 1036/68



Dua gerobak pendek yang ditarik oleh sapi dua ekor di pasar
Merauke,tt.

NIGIS no. 14-5-104/L8-30-120

DAFTAR ARSIP YANG DISERAHKAN

GEOGRAFI PAPUA

1. Peta Nieuw Guinea tahun 1912.
M. Yamin no.1031
2. 3 lembar
2. Salinan Surat Salinan Surat Perintah Gubernur Jendral H.B. De Graeff tanggal 15 April 1927 tentang orang-orang hukuman yang harus dikirim ke Boven Digoel.
Boven Digoel no.84
3 lembar
3. Peta Boven Digoel, 1929.
Boven Digoel no.88
2 lembar
4. Salinan dari buku harian asisten pemerintah di Moeting selama bulan September 1935.
Boven Digoel no.86
5 lembar
5. Peta kamp tahanan Tanah Merah.
Boven Digoel no.89
5 lembar
6. Detail peta dari *Dutch New Guinea*, 1944-1945.
NIGIS/RVD B2170
1 lembar

PEMERINTAHAN

7. Salinan Memorie Serah Terima Jabatan Kepala *onderafdeling* Merauke, 13 Maret 1953.
Boven Digoel no.50
1 lembar
8. Konsep Rancangan UU tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat
Risalah DPR no.908
5 lembar
9. Risalah rapat DPR mengenai keterangan Pemerintah tentang persoalan Irian Barat dalam rangka kelanjutan komando Paduka Yang Mulia Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang, 19 Desember 1961.
Risalah DPR no.657
44 lembar

10. Wakil Perdana Menteri Pertama/ Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio melantik Gubernur Irian Barat E.J. Bonay di Kotabaru Irian Barat, 1 Mei 1963.

Deppen no.63-4495
1 lembar

POLITIK

11. Daftar orang-orang yang dikirim ke Boven Digoel dari Semarang yang diangkut dengan kapal H.M Kruisser "Java", 12 Maret 1927.

Boven Digoel no.200
4 lembar

12. Salinan Surat Perintah Gubernur Jendral H.B. De Graeff tanggal 15 April 1927 tentang orang-orang hukuman yang harus dikirim ke Boven Digoel.

Boven Digoel no.1
3 lembar

13. Daftar orang-orang yang dibebaskan dari kamp Boven Digoel bersama keluarganya (termasuk Bung Hatta, Sutan Syahrir, dan Bondan).

Boven Digoel no.102
2 lembar

14. Laporan dari W.P. Hillen, anggota *Raad van Indie* tentang kondisi kamp tawanan Boven Digoel, 1930.

Binnenlandsbestuur no.1308
37 lembar

15. Tugas-tugas yang harus dikerjakan para penghuni kamp tawanan di Boven Digoel, dicatat dalam buku harian pengawas, tanggal 23 Agustus 1934.

Boven Digoel no.210
106 lembar

16. Usul untuk memberikan tanda penghargaan kepada van Heerden, seorang telegrafis radio yang terus bekerja selama pemboman di Sorong berlangsung, Januari 1942.

Binnenlandsbestuur no.4195
2 lembar

17. Laporan *Partai Kemerdekaan Indonesia Irian* (PKII) kepada pimpinan BPI Jogjakarta tentang keadaan Irian setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), 10 Januari-6 Februari 1950.

Delegasi Indonesia no.1494
19 lembar

18. Transkrip pidato penjelasan Mr.M. Yamin tentang mosi Irian pada Sidang Umum Parlemen RIS tanggal 11 Maret 1950.
Kabinet Presiden RIS no.151
7 lembar
19. Tulisan M. Yamin dalam harian Merdeka, "Asia Afrika Tuntut Irian Barat", 27 April 1955.
M. Yamin no.646
4 lembar
20. Hasil kesepakatan di New York bulan Agustus 1962 antara pemerintah Indonesia dan Belanda yang disaksikan PBB memberikan pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari RI
Sekretariat Negara Republik Indonesia,
30 Tahun Indonesia Merdeka
1 lembar
21. Pidato Presiden Soekarno pada Rapat Raksasa di Lapangan Merdeka untuk menyambut masuknya Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan RI, 1 Mei 1963.
Pidato Presiden no. 487
5 lembar
22. Rakyat Kotabaru, Irian Barat, menyambut kunjungan Presiden Soekarno sebagai bentuk penerimaan rakyat terhadap realisasi pemerintahan RI di Irian Barat, 4 Mei 1963.
KEMPEN no.63-509
1 lembar
23. Pertimbangan dari KODAM VII / Tjendrawasih bulan November 1966 tentang potensi kota Sorong untuk dijadikan ibukota Provinsi Irian Barat.
Sekretariat Kabinet No. 113 C
14 lembar
24. Laporan perjalanan anggota MPRS A.B. Kahubuy ke Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong pada tanggal 27 April-27 Mei 1968.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar
25. Peta Situasi "Gerombolan Mandatjan" dan kedudukan Pasukan Operasi Sadar pada awal bulan Desember 1968.
Sekretariat Kabinet No. 113 C
14 lembar

26. Pernyataan kebulatan tekad para kepala suku/adat/kampung daerah Kampung Masui, Kalikodok, Sibera, Irai dan Kampung Manimeri, Distrik Bintani, KPS. Bintani, Kabupaten Manokwari, Provinsi Irian Barat, untuk tetap bersatu sebagai Bangsa Indonesia, 1 Pebruari 1969.
SEKKAB no. 113 C
5 lembar
27. Pernyataan warga Suku Arfak tanggal 12 Februari 1969 yang mendukung penyatuan Irian Barat ke dalam wilayah RI.
Sekretariat Kabinet No. 113 C
14 lembar
28. Kebulatan tekad para kepala kampong, kepala suku, dan tokoh masyarakat Ransiki pada tanggal 8 Maret 1969. Mereka menyatakan bahwa pemerintahan yang sah atas Irian Barat adalah pemerintah RI.
Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar
29. Pernyataan kepala suku/adat dan kepala kampung dari Saikolof, Kotlol, Menjinsah, dan Djulbatan tanggal 12 Maret 1969 yang menyatakan bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari RI.
Sekretariat Kabinet No. 113 C
14 lembar
30. Surat pernyataan kebulatan tekad dari anggota Angkatan '45 daerah Kabupaten Manokwari tanggal 15 Maret 1969. Anggota Angkatan '45 menganggap bahwa Irian Barat adalah bagian dari Republik Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar
31. Pada tanggal 17 Maret 1969 Gerakan Islam Muhammadiyah Cabang Pegunungan Jayawijaya mengeluarkan pernyataan yang isinya mendukung penyatuan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 C
14 lembar

32. Menghadapi rencana pelaksanaan PEPERA di Irian Barat pada tanggal 21 Maret 1969 Markas Daerah Legiun Veteran Provinsi Irian Barat menyatakan bahwa PEPERA tidak perlu dilaksanakan, sebab Irian Barat sebenarnya adalah bagian yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekretariat Kabinet No. 113 C
14 lembar

33. Pernyataan kebulatan tekad Partai Katolik Cabang Jayapura tanggal 1 April 1969, yang menyatakan bahwa Irian Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI dan siap mendukung REPELITA.

Sekretariat Kabinet No. 113 C
14 lembar

34. Pada tanggal 21 April 1969 organisasi wanita di Ransiki, Kabupaten Manokwari menyatakan kebulatan tekadnya untuk bergabung dengan pemerintah RI. Organisasi-organisasi wanita yang menyatakan kebulatan tekad tersebut adalah: PERWIB Bhayangkari dan PWK KPS Ransiki.

Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar

35. Kebulatan tekad Persatuan Geredja Kristen KPS – Ransiki, Kabupaten Manokwari untuk mendukung masuknya Irian Barat ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia, tanggal 26 April 1969.

Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar

36. Pernyataan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri Manokwari tanggal 28 April 1969, mengutuk tindakan oknum-oknum yang mendukung kebijakan “*devide et impera*” yang dijalankan kolonialis Belanda.

Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar

37. Kebulatan tekad murid, guru, dan orang tua murid sekolah menengah di Wasior, yang menyatakan bahwa mereka, rakyat Irian Barat, adalah bagian dari Republik Indonesia, tanggal 2 Mei 1969.

Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar

38. Konperensi Wilayah I Partai N.U. dan ormas-ormasnya di Jayapura, 15-22 Mei 1969, memutuskan bahwa PEPERA dan Pembangunan di Irian Barat harus disukseskan.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar
39. Pernyataan Gerakan Merah Putih anak cabang daerah KPS Sarmi, Irian Barat, 7 April 1969, yang menyatakan bahwa PEPERA tidak diperlukan, sebab pada kenyataannya Irian Barat adalah bagian dari RI. Seluruh anggota gerakan ini juga menyatakan bahwa mereka ada di belakang pemerintah RI dalam membangun Irian Barat.
Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar
40. Laporan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 1969 tentang pelaksanaan PEPERA tanggal 14 Juli di Merauke. Hasil PEPERA menyatakan bahwa rakyat Merauke menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar
41. Pada tanggal 17 Juli 1969 Presidium Kordinasi Pemuda-Sekretariat Bersama Golongan Karya Pusat mengeluarkan pernyataan bahwa mereka memberikan dukungan kepada Dewan Musyawarah PEPERA Merauke yang telah memilih Irian Barat sebagai daerah yang tidak terpisahkan dari NKRI.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar
42. Laporan Departemen Dalam Negeri tanggal 24 Juli 1969 tentang pelaksanaan PEPERA di Kabupaten Fak-Fak. Rakyat Fak-Fak memutuskan, melalui PEPERA tersebut, untuk bergabung dengan Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar
43. Laporan Departemen Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1969 tentang pelaksanaan PEPERA di Sorong. Hasil siding musyawarah PEPERA Sorong memutuskan bahwa rakyat Sorong adalah bagian dari Republik Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar

44. Laporan pelaksanaan PEPERA di Manokwari tanggal 29 Juli 1969. Melalui PEPERA tersebut rakyat Manokwari memutuskan untuk tetap berada dalam Negara RI.

Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar

45. Laporan Menteri Dalam Negeri RI mengenai pelaksanaan PEPERA di Kabupaten Jayapura pada tanggal 2 Agustus 1969. Sebagian rakyat Jayapura memilih untuk tetap bergabung dengan RI.

Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar

46. Surat Kapten M.R. Wanggai, tentang biaya pemakaman jenazah Silas Parere, tokoh perintis perjuangan pengembalian Irian Barat, 7 Maret 1979.

SETWAPRES Adam Malik no.912
2 lembar

KEPENDUDUKAN

47. Laporan tentang penduduk di Kaimani, pantai barat daya Nieuw Guinea, 1858.

Ambon no.1537
29 lembar

48. Daftar dari mereka yang kembali ke kamp tawanan di Tanah Merah beserta anggota keluarganya pada tanggal 19 Februari 1933.

Boven Digoel no. 295
9 lembar

49. Surat dari Kementrian Luar Negeri-Direksi Urusan Timur Jauh (*Ministerie van Buitenlandse Zaken – Directie Verre Oosten*) kepada Sekretaris Negara (*Algemeene Secretarie*) tentang rencana emigrasi orang-orang Eurasia ke *Nederlands Nieuw Guinea*, 15 juli 1949.

Algemeene Secretarie no.1053
9 lembar

50. Kesepakatan dari Komisi Gabungan Nieuw-Guinea mengenai pengembalian para pegawai pemerintah yang berasal dari Irian, 29 Maret 1950.

Delegasi Indonesia no.1507
5 lembar

51. Surat dari Ir. F.E Eyken kepada Pemerintah Federal Sementara tentang transmigrasi ke *Nieuw Guinea*, 28 April 1974.

Algemeene Secretarie no.1052
4 lembar

PENDIDIKAN

52. Perempuan Nieuw Guinea pada acara peresmian sekolah di Wambi, 1923.

KIT no.995/34
1 lembar

53. Surat Kepala Distrik Tanah Tinggi kepada Asisten Residen Tanah Merah tentang sekolah-sekolah di Tanah Merah, 16 Oktober 1929.

Boven Digoel no.311
1 lembar

54. Daftar murid dan pengajar di Tanah Merah, 1939.

Boven Digoel no.317
10 lembar

55. Kegiatan belajar di sekolah, Enarotali, tt.

KIT no.1001/73
1 lembar

56. Guru dan anak-anak sekolah di Tanah Merah, tt.

NIGIS no.14-8/A6760
1 lembar

KESEHATAN

57. Juru kesehatan tradisional dari *Nieuw Guinea* Selatan , 1951.

KIT no.998/38
1 lembar

58. Kapal Rumah Sakit "Temboeni" di *Nieuw Guinea*. 1953.

KIT no.1032/73
1 lembar

59. Surat Ali Budiarjo (Presiden Direktur PT. Freeport) tentang pelayanan kesehatan kepada penduduk asli sekitar daerah kerja Freeport Indonesia, 1 Februari-5 Maret 1979.

SETWAPRES Adam Malik no.797
7 lembar

KEAGAMAAN

60. Surat dari Missie Katolik Hollandia kepada Residen *Nieuw Guinea* mengenai larangan ijin bagi missi Katolik ke wilayah Wisselweren, 2 November 1948.

Algemeene Secretarie no.748
4 lembar

61. Rumah dinas untuk pastur di Merauke, tt.

KIT no.995/30
1 lembar

BANGUNAN

62. Rumah Papua dan pemuda Papua,1903.

KIT no.70/14
1 lembar

63. Rumah Panggung Papua,1903.

KIT no.70/22
1 lembar

64. Gedung Dewan Papua di Kotabaru yang belum selesai dibangun. 17 Oktober 1962.

KEMPEN 62-1962
1 lembar

65. Stasiun radio di pengasingan Boven Digoel,t.t.

KIT no.322/2
1 lembar

66. Jalan masuk kamp militer di Tanah Merah,tt.

KIT no.322/6
1 lembar

67. Pembukaan Gereja Portugis di Kota Nica,tt.

KIT no.335/20
1 lembar

68. Kantor pos di Merauke,tt.

KIT no.1060/54
1 lembar

69. Rumah pejabat di Tanah Merah, Boven Digoel,tt.

KIT no.1060/58
1 lembar

70. Rumah-rumah di pulau Saba dan Biak dibangun di atas air.
NIGIS no.14-16-20/A10711
1 lembar
71. Stasiun radio di Merauke.
NIGIS no.14-5-269/L10-6-8
1 lembar

KEBUDAYAAN

72. Pemuda Papua yang akan membakar kayu dengan menggunakan batu sebagai pematik. 1903.
KIT no.70/2
1 lembar
73. Pemuda Papua dengan alat panah tradisional, 1903.
KIT no.77/50
1 lembar
74. Potret sebuah keluarga Papua di tahun 1905
KIT no.71/28
1 lembar
75. Pakaian wanita Papua, 1907.
KIT no.70/4
1 lembar
76. Orang Papua dari bagian Selatan,1926.
KIT no.48/34
1 lembar
77. Tarian rakyat Waropen yang ditarikan di Hollandia, Nieuw Guinea,1955.
KIT no.1010/73
1 lembar
78. Ikan sepanjang 2 (dua) meter di Danau Sentani, desa Jaka Sentani, 1962.
KIT no. 1044/62
1 lembar
79. Pipa rokok dari pegunungan ,tt.
KIT no.592/22
1 lembar
80. Pelaksanaan upacara pernikahan,tt.
KIT no.996/18
1 lembar

81. Perisai orang Papua,tt .
KIT no.996/22
1 lembar
82. Korps musik pada sebuah sekolah Guru,tt.
KIT no.996/78
1 lembar
83. Wanita Papua dengan baju pengantin,tt.
KIT no.1007/16
1 lembar
84. Lelaki Papua dengan tulang burung di antara hidungnya,tt.
KIT no.1012/54
1 lembar

PEREKONOMIAN

85. Keputusan Gubernur Maluku mengenai perubahan anggaran dari wilayah kesatuan Ternate, Tidore, dan Batjan, dalam mana termasuk Nieuw-Guinea, 19 Desember 1932.
Binnenlandsbestuur no.1311
5 lembar
86. Gudang penyimpanan barang di Sorong, 1953.
KIT no.1002/34
1 lembar
87. Surat dari H.H. Arnold, Jr. kepada M. Yamin tentang penyampaian kontrak kerja dan hasil pembicaraan dengan pemerintah Indonesia mengenai usaha pertambangan minyak Caltex, 11 Oktober 1961.
M. Yamin no.345.
5 lembar
88. Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi: amanat tentang garis-garis besar pimpinan ekonomi nasional tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat, Mei 1962.
M.Yamin no.823.
3 lembar
89. Surat dari pimpinan PT Freeport tentang pembangunan masyarakat sekitar daerah penambangan, 6 Agustus 1974.
Asisten SEKNEG Urusan Khusus (ASSUS) no.130.
3 lembar

90. Pusat minyak *Noord Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* di Sorong, tt.
KIT no.1060/48
1 lembar
91. Lelaki Papua menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tradisional,tt.
KIT no.1043/18
1 lembar
92. Tas tradisional wanita Papua, tt.
KIT no.1058/32
1 lembar

TRANSPORTASI

93. Persetujuan pembangunan landasan pesawat terbang di Serui beserta skets dan foto, 28 Januari 1936.
BOW no.72.
8 lembar
94. Penduduk gotong-royong membangun jalan baru di Nimboran,1951.
KIT no.1031/18
1 lembar
95. Kedatangan Dakota di lapangan terbang Kaimana, 1957.
KIT no.1036/68
1 lembar
96. Dua gerobak pendek yang ditarik oleh sapi dua ekor di pasar Merauke,tt.
NIGIS no.14-5-104/L8-30-120
1 lembar

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam perjalanannya telah menimbulkan berbagai persoalan, sehingga undang-undang ini disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Papua Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.